SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESELAMATAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK
BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA

Menimbang :

1. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administrasi meliputi rencana teknis, agar mengikuti keamanan, kesehatan dan kenyamanan bagi penghuni dan lingkungannya;
2. bahwa untuk mendapatkan penyelenggaraan bangunan gedung perlu dilakukan pemeriksaan dokumen rencana teknis ruang lingkup cakupan proses pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung berdasarkan data teknis;
3. bahwa dalam rangka mempercepat pelayanan dalam mendapatkan persetujuan teknis bangunan gedung sederhana yang tidak memerlukan rencana teknis bangunan gedung;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Keselamatan Persetujuan Bangunan Gedung Untuk Bangunan Gedung Sederhana.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956 tentang Pembentukan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Paser dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PERMUTAKHIRAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN DATA BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah.
6. Dinas Teknis adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
7. Jasa konsultansi merupakan penggunaan tenaga ahli untuk memberikan saran atau nasehat kepada pengguna jasa dalam pekerjaan dan atau melaksanakan Jasa Pelayanan Pemeriksaan Standar Teknis Bangunan Gedung untuk kepentingan data bangunan gedung.
8. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang terdiri dari proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan dan pembongkaran.
9. Data Bangunan Bangunan yang selanjutnya disingkat DBB adalah data yang mengacu bentuk bidang tanah yang telah boleh dibangun bangunan yang mencakup data bangunan beserta atap, dinding, lantai, dan pos ronda.
10. Bangunan Gedung sementara adalah bangunan gedung dibuat dengan struktur sederhana dan memiliki komplikasi dan teknologi sederhana.

11. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau instansi, dan/atau lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat adat, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
12. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah pemilik yang ditetapkan dapatan pemilik Bangunan Gedung untuk membangun, rawat, mengubah, memperbaiki, mengurung, dan atau memiliki Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
13. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan dan ditandatangani oleh pemerintah daerah untuk bangunan gedung fungsi bangunan gedung sesuai dengan standar teknis.
14. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang memiliki hak atas sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
15. Pengelola adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengelola pemeliharaan pemeliharaan PBG, SLF, Pemerintah Daerah Penyelenggara Bangunan Gedung dan atau Dinas Dalam Kependidikan Bangunan Gedung.
16. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki bangunan dan diberi tugas oleh Pemerintah Daerah untuk dengan bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
17. Pengelola dan adalah pemilik bangunan yang bertanggung.
18. Dengan Perizinan pemerintah adalah model gambar teknis Bangunan Gedung sebelumnya yang telah dengan persetujuan dan disetujui teknis yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk pemilik PBG.
19. Konsultan Manajemen Konstruksi adalah konsultan yang selanjutnya disingkat MKK adalah orang perseorangan atau badan yang dipercaya untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, Dinas Dalam Kependidikan Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah Penyelenggara Bangunan Gedung, dan pemilik Bangunan Gedung dikarena dengan informasi teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung.
20. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah standar yang mencakup keterkaitan, keterkait, mutu, material, dan/atau hal-hal yang harus dipenuhi dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
21. Tim Pakar ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas pakar ahli yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
22. Tim Pakar Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas unsurnya untuk penyelenggara bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses pelaksanaan bangunan Gedung dan SLF. Jumlah tenaga tinggi 1 (satu) orang dengan lulusan paling rendah S2 dan jumlah tenaga dan dalam jurusan dan tenaga tinggi tunggal 2 (dua) orang dengan dan dalam jurusan yang berbeda di dan bidang pada dalam jurusan untuk pemerintah dokumen pelaksanaan SLF perjanjian.
23. Sekretariat TPA, TPT, dan Pemilik yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim dan pertimbangan yang ditetapkan oleh kepala dinas teknis untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Pemilik.
24. Pengelola Pemerintah Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG.

10. Ketentuan Tata Ruang yang sebelumnya dituangkan RTR adalah hasil penyesuaian tata ruang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Tata Ruang ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan Bangunan Gedung.

(2) Peraturan Tata Ruang ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan Bangunan Gedung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Bangunan Gedung yang tertib dan sesuai dengan fungsinya;

b. mewujudkan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Bangunan Gedung dan sesuai kesesuaian, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan;

c. mewujudkan keserasian bangunan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan

d. mewujudkan kesinambungan dalam pemanfaatan prasarana Bangunan Gedung.

BAB III

PENETAPAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 3

(1) Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketentuan pemanfaatan bangunan tertentu, yang dibuat dari dari dan dilakukan dan dipertahankan sesuai dengan Bangunan Gedung.

(2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. fungsi hunian, meliputi:

1. rumah tinggal tunggal;
2. rumah tinggal deret; dan
3. rumah susun.

b. fungsi keagamaan, meliputi:

1. bangunan masjid termasuk musolla;
2. bangunan gereja termasuk kapel;
3. bangunan pura;
4. bangunan vihara;
5. bangunan klenteng; dan
6. bangunan perkantoran agamaagamaryatan lainnya yang diakui oleh negara.

c. fungsi usaha, meliputi:

1. Bangunan Gedung perkantoran, termasuk kantor yang disewakan;
2. Bangunan Gedung perdagangan, seperti warung, toko, pasar dan mall;
3. Bangunan Gedung perhotelan, seperti pondok, akomodasi, dan penginapan;
4. untuk Bangunan Gedung akomodasi yang termasuk dalam fungsi usaha dalam akomodasi yang hanya merupakan fasilitas wisata, kesehatan dan rehabilitasi;

7. Bangunan Gedung perkotaan, seperti wisma, kondo, hotel, mall, ruko, ruko sio, hotel, dan kondotel
6. bangunan wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, dialogal, sayangan, kondop, dan gedung pertunjukan;
7. bangunan budaya tradisional, seperti tradisi adat, rumah adat, rumah tradisional, kesenian, dan pemandian alam; dan
8. Bangunan Gedung tempat penyimpanan, seperti gudang, tempat penimbunan, dan gedung parkir
d. fungsi sosial dan budaya, meliputi:
1. bangunan Gedung pendidikan, termasuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan sekolah terpadu;
2. Bangunan Gedung kebudayaan, termasuk museum, gedung pemerintah, dan gedung kesenian;
3. Bangunan Gedung keagamaan, termasuk peribadatan, klinik terpadu, tempat praktek dokter bersama, rumah sakit, dan akomodasinya; dan
4. Bangunan Gedung pelayanan umum lainnya
e. fungsi khusus, meliputi:
1. mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya diatur kerahasiaan. Bangunan di sekitarnya dan atau mempunyai risiko bahaya tinggi, dan pertahanan dikecualian dari bangunan kerahasiaan termasuk markas tentara, tempat kesatuan militer yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dengan rencana;
2. sesuai bangunan fungsinya pertahanan termasuk satu-satu dan satu, pangkalan-pangkalan pertahanan (termasuk pulau terdalil), pangkalan dan dan pangkalan udara, serta dapat ditambah; dan
3. sesuai bangunan sesuatu bertujuan khusus (laboratorium khusus dan dapat ditambah).

(2) Selain fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Bangunan Gedung dapat berupa fungsi campuran.

(3) Fungsi bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan fungsi utama.

(4) Penetapan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan mayoritas yang dipergunakan pada Bangunan Gedung.

(5) Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri lebih dari 1 (satu) fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki Bangunan Gedung.

Pasal 4

Klasifikasi Bangunan Gedung ditetapkan oleh Bangunan Gedung dengan kriteria ketahanan dan memiliki kompleksitas dan teknologi ketahanan. Termasuk klasifikasi ketahanan antara lain:

a. rumah tinggal satu lantai atau yang lebih memiliki klasifikasi ketahanan untuk bangunan bentang atap, atap yang konstruksinya sederhana atap;
b. Bangunan Gedung yang memiliki fungsi Tunggal kurang dengan luas total bangunan 150 m² (Seratus lima puluh)
1. satu lantai; atau
2. dua lantai dengan menggunakan rumah prototipe yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
c. Bangunan Gedung rumah fungsi kurang dengan luas total bangunan 400 m² (lima ratus meter persegi)
d. bangunan yang berada pada tanah lereng dengan kemiringan tanah sisi maksimal 2% (dua persen);

4. struktur tidak menggunakan bahan bata dan harus memenuhi ketentuan:
   1. posisi tangga;
   2. jarak antar anak tangga minimum 2 m (dua meter);
   3. tinggi bidang tertinggi maksimal 3 m (tiga meter);
   4. lebar bidang datang maksimal 0 m (delapan meter perangkat); dan
   5. perlengkapan dan pelindung tangga dan tinggi tangga minimum 1,1 (satu koma satu) lipat;
5. tangga yang menggunakan bagian vertikal konvensional atau perpaduan bentuk konsol; dan
6. tangga dengan dua lintas tertinggi yang dimiliki dan tertutup pagar tangga lintas.

Pasal 3

Jenis Bahan Tangga

(1) Pilih Bata dengan pertimbangan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan mempertimbangkan garis sempadan samping kan dan kanan, serta bidang tangga terbuka antar pasal, yang dibuat di dalam rancang tata ruang, rancang tata tangga dan lingkungan, dan pertimbangan tangga lainnya.

(2) Dalam hal tidak tersedia jenis bahan samping mampu bidang tangga yang diterapkan. Wajib dan memenuhi persyaratan garis sempadan tertentu dengan mempertimbangkan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan, yang ditetapkan pada antap permohonan perizinan mendirikan bangunan.

(3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bangunan yang digunakan sebagai tempat pelayanan umum, maka yang mudah terbakar dan atau mudah terbakar, maka wajib atau tidak mudah pelayanan mengenai jenis yang harus dipenuhi.

(4) Pada daerah dimaksud bangunan publik, rumah, maka garis sempadan samping dan bidang tangga harus memenuhi persyaratan:

   a. bidang datang tertutup tidak boleh mudah pintu pelantangan;
   b. struktur dan produk bangunan tertutup harus terjaga paling tertutup di ca [illegible] dan produk bangunan, dan atau pelantangan, dan atau atau bangunan rumah tinggal;
   c. untuk perbaikan atau pemeliharaan bangunan yang untuk menggunakan bangunan datang bata tertutup dengan bangunan di sekitarnya, dipertahankan untuk membuat datang bata tertutup dengan datang bata tertutup; dan
   d. pada bangunan rumah tinggal rapat tidak tertutup jarak dalam samping, ketinggian jarak bata tertutup maksimum maksimal setengah dan bentuk garis sempadan bangunan.

(5) Pada daerah dimaksud bangunan rumah tinggal, maka jarak bata samping dan bidang tangga harus memenuhi persyaratan:

   a. jarak bata samping dan jarak bata bidang datangkan minimum 4 m (empat meter) pada kanan kiri, dan pada ruang pemadaman [illegible] bangunan jarak bata di ukuran dimulai 0,40 m (nol koma nol meter) dari jarak bata kanan di tambahkan ukuran maksimal jarak bata tertutup 12,5 m (dua bata kanan kiri), kecuali untuk bangunan rumah tinggal, dan ketinggian untuk bangunan gedung atau rumah dapat kurang tertutup; dan
   b. cat bangunan yang dibuatkan harus mempunyai jarak bata yang tidak dibangun pada bata di samping kan dan kanan serta bagian bidang yang berhubungan dengan pelantangan.

(6) Jarak bebas antara dua bangunan dalam satu tapak diatur sebagai berikut :

a. [illegible] dua bangunan [illegible] yang [illegible] yang [illegible] jarak bebas yang ditetapkan;

b. [illegible] yang [illegible] yang [illegible] yang [illegible] jarak bebas yang ditetapkan; dan

c. [illegible] yang [illegible] yang [illegible] jarak bebas yang ditetapkan.

(7) Jarak dinding antara pasangan dinding maksimal [illegible] dalam rumah apitan.

BAB IV

STANDAR PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

Bagian Pertama

Pasal 6

(1) Standar penyediaan dan pemanfaatan Bangunan Gedung [illegible] dan standar penyediaan prasarana [illegible] dan utilitas Bangunan Gedung [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible]

Pasal 8

(1) Dalam prototipe purwarupa wajib dipasang dalam pemasangan tanda untuk Bangunan Gedung.

(2) Dalam mempersiapkan dalam prototipe purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan pada:

a. pemenuhan Standar Teknis;

b. pemenuhan persyaratan yang telah ganda;

c. perhitungan dalam geologi dan geografi;

d. perhitungan kemampuan bahan bangunan;

e. pemenuhan artistik, dalam rangka dengan pelestarian pemanfaatan; dan

f. perhitungan konstruksi pelaksanaan konstruksi.

(3) Dalam Prototipe purwarupa disepakati dalam Bangunan Gedung dengan ketentuan dimana dan tiga 60 m², 45 m², 24 m², 60 m² dan 72 m² sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Bangunan Gedung tersebutkan yang telah memenuhi syarat Penyusunan Pelaksanaan dimana Tahap pada dan konstruksi Perwujudan Bangunan Gedung wajib dipasang mempati Dalam Bangunan atau dalam prototipe purwarupa Bangunan Gedung.

(5) Dalam hal dimaksudkan tidak menggunakan dalam prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mendapat persetujuan dari pejabat yang yang berwenang dalam tersebut.

(6) Dalam penggunaan dalam prototipe purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik wajib memberikan pemberitahuan, sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan bangunan.

(7) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan oleh ahli dan atau TPT.

BAB V

TATA CARA PEMBERITAHUAN PBG

Pasal 12

(1) Dokumen rencana teknis diajukan kepada Dinas Teknis untuk mendapatkan PBG setelah pelaksanaan konstruksi.

(2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan pernyataan pada.

(3) Pemohon wajib menggunakan dokumen rencana teknis dimaksud dalam bentuk prototipe purwarupa yang disetujui oleh Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8.

(4) Dokumen rencana teknis yang dimaksud tanda bersedemen tertulis dalam rangka pemenuhan standar teknis pemenuhan dan pemenuhan bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(5) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk mendirikan Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau atau memelihara Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.

(6) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipakai Pemilik setelah pelaksanaan konstruksi.

(7) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:

a. administrasi pemrosesan; dan

b. penerbitan.

(3) Dokumen rencana tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai dan dijadikan dasar proses konsultasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(4) Proses konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan:

a. pemberitahuan pelaksanaan Transfer Tanah dilakukan selama 30 hari kerja;

b. masa waktu pemberitahuan pertama dokumen tahun oleh TPA dan atau TPT dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dokumen sebagaimana 1 (pertama);

c. apabila tidak mencapai kata pemberitahuan pertama dan TPA dan atau TPT tidak memiliki tanggapan atau permohonanya tahun, maka dokumen rencana Bangunan Gedung dinyatakan telah memenuhi standar Teknis Bangunan Gedung;

d. proses pemberitahuan dokumen tahun tanggapan paling dokumen paling lama 4 (empat) hari kerja dan permintaan jika cara dokumenkanya tanggapan atau permohonanya oleh dari TPA dan atau dari TPT;

e. perbaikan dokumen tahun sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan paling lama 3 (tiga) hari pertama;

f. apabila tidak mencapai kata pemberitahuan pertama dan permintaan jika tidak menyampaikan tanggapan dengan perbaikan maka dokumen tahun dinyatakan telah memenuhi standar teknis dan dapat dibuat untuk rekomendasi permintaan jika dapat melakukan pembahasan ulang;

g. dalam hal permohonan dibuat, permohonan dibuatkan kesimpulan untuk menangani atau mempermasalah dokumen tahun dalam waktu yang telah ditentukan;

h. hasil pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilengkapi dengan permohonan tahun dilampiran dalam berita acara;

i. apabila pada proses konsultasi dokumen tahun telah mencapai pembangunan fisik bangunan maka proses PBG dapat tetap dilanjutkan dengan ketentuan dokumen tahun Bangunan Gedung sesuai pengaturan dan sesuai pengaturan dokumen;

j. proses pengajuan tahun bangunan bentang sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja.

k. jika hasil pengajuan tahun dinyatakan tahun Bangunan bertanggung tidak dimiliki tahun maka pemohon harus melakukan pengajuan dengan penyiapan terhadap standar tahun Bangunan Gedung lainnya.

l. rencana tahun sebagai pengajuan dengan Bangunan dimungkinkan dalam dokumen tahun dan harus melalui pemberitahuan oleh TPA/TPT; dan

m. pembangunan dapat dimulai dilakukan setelah Dokumen fisik telah lengkap.

(5) Dalam proses pemeriksaan PBG penyelenggara berkewajiban memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedung.

(6) Pemilik yang belum dapat memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap harus memenuhi persyaratan tersebut secara bertahap selama 5 (lima) tahun.

(7) Pemilik yang belum dapat memenuhi standar Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka IMB tidak dapat diterbitkan.

Pasal 11

(1) Pemeriksaan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan secara tetap:

a. pemeriksaan dokumen rencana teknis; dan

b. pemeliharaan dokumen rencana struktur, material, elektrikal, dan perjalanan (*planning*).

3) Pemeriksaan dokumen rencana teknis yang menggunakan desain prototipe dilakukan terhadap dokumen antara dokumen yang dibuatkan sesuai ketentuan dalam prototipe itu sendiri.

4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang dituangkan dengan pertimbangan teknis dituangkan dalam berita acara.

5) Berita acara pada pemeriksaan tertentu dilengkapi dengan rekomendasi dari TPA/TPT dan dituangkan oleh Sekretariat ke dalam SIMBG.

6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

a. rekomendasi persetujuan atau penyempurnaan Persyaratan Teknis; atau

b. rekomendasi penolakan atas PBG.

7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dituangkan apabila dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis.

8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dituangkan apabila dokumen rencana teknis tidak memenuhi Standar Teknis.

Pasal 12

1) Acara Penyiapan Persyaratan Standar Teknis dilaksanakan oleh Dinas Teknis setelah dilakukan verifikasi oleh Kepala Dinas Teknis berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a.

2) Dalam hal TPT melakukan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b acara acara Penyiapan Persyaratan Standar Teknis dapat dilaksanakan dan Pemohon harus memperbaiki rencana teknis.

3) Dalam hal Pemohon harus memperbaiki rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis dituangkan dengan berita acara acara konsultasi rencanaan.

4) Dalam hal Pemohon memperbaiki rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dituangkan berita acara konsultasi rencanaan.

5) Acara Penyiapan Persyaratan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acara yang dipersiapkan untuk memperoleh Hasil dengan dituangkan pertimbangan teknis untuk verifikasi.

Pasal 13

1) Persyaratan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b meliputi:

a. persetujuan atas rencana Daerah;

b. persetujuan rencana Daerah; dan

c. persetujuan PBG.

2) Persetujuan atas rencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan pertimbangan teknis untuk rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

3) Atas rencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan indeks terintegrasi dan fungsi rencana rencana.

4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitungan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.

5) Fungsi rencana rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

6) Persetujuan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah setelah ditetapkan oleh rencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

7) Persetujuan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah DPMPTSP menerbitkan hasil persetujuan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP.

(4) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. dokumen PBG; dan

b. lampiran dokumen PBG.

(5) Dalam hal Pelaksanaan PBG, DPMPTSP bertanggung jawab terhadap penerbitan Perizinan Dasar; dan Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (1), tanpa mencakupi pemeriksaan terhadap dokumen administrasi dan dokumen hasil konsultasi pelaksanaan standar teknis pada Dinas Teknis.

Pasal 14

(1) Dinas Teknis melakukan konsultasi terhadap pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung setelah mendapatkan informasi dari Pemilik.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian standar yang cepat dan efisien dalam rangka pengendalian konstruksi di setiap tahapannya.

(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:

a. pelaksanaan struktur utama;

b. pelaksanaan struktur atap, arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan penyediaan plumbing; dan

c. pengujian dan penyiapan laporan pelaksanaan.

(4) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Dinas Teknis menerima informasi dari pemilik.

(5) Dalam hal konsultasi tidak dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemilik dapat melanjutkan pelaksanaan konstruksi ke tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali untuk kebutuhan pada setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 15

(1) Dinas Teknis menyampaikan informasi kepada Pemilik terkait jadwal konsultasi pada setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (4) ayat (3) melalui SIMBG.

(2) Dinas melaksanakan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Pemilik menggunakan Pemilik.

(3) Pada saat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawas dan pengendalian konstruksi atau penyedaan konstruksi harus menyampaikan laporan pengawasan konstruksi kepada Pemilik.

(4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan pada hasil pengawasan konstruksi dengan dan laporan pengawasan konstruksi terhadap pelaksanaan standar PBG dan, atau dokumen SIMBG.

(5) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan surat atau surat elektronik hasil konsultasi setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diunggah ke dalam SIMBG oleh Pemilik.

Pasal 16

(1) Dalam hal dilakukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan konstruksi dengan PBG dan/atau Sertifikat SLF, Pemilik melaporkan kepada Dinas Teknis.

(2) Dalam hal ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan konstruksi tidak sesuaian, Pemilik harus melakukan penyesuaian konstruksi terhadap konstruksi yang sesuai.

(3) Dalam hal Pemilik tidak melakukan penyesuaian konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik harus mengurus ulang PBG.

(4) Dalam hal penyesuaian konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pengurusan ulang PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan oleh Pemilik, Dinas Teknis dapat menghentikan pelaksanaan konstruksi hingga pengurusan ulang PBG selesai.

(5) Dalam hal ketidaksesuaian pelaksanaan konstruksi dengan ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dikesampingkan oleh Pemilik, maka dapat dengan pelaksanaan konstruksi.

Pasal 17

(1) Dalam hal dilakukan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berupa pelaksanaan konstruksi melebihi lampiran Gedung, Pemilik harus mengurus ulang PBG.

(2) Sebelumnya pengurusan ulang PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dan ketidaksesuaian dinyatakan konstruksi lapangan.

(3) Dalam hal terhadap ketidaksesuaian dimaksudkan dan konstruksi lapangan, Pemilik memenuhi persyaratan teknis kepada Pemilik.

(4) Dalam hal Pemilik tidak menyampaikan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pemilik dapat dengan pelaksanaan konstruksi hingga Pemilik memenuhi persyaratan teknis.

(5) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, Dinas Teknis menyelesaikan pelaksanaan konstruksi dapat dilanjutkan kembali.

(6) Dalam hal Pemilik tidak menyampaikan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan sejak dilaksanakan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(7) Dalam hal terjadi pelanggaran dan/atau penyimpangan pelaksanaan konstruksi terhadap PBG dalam proses pelaksanaan konstruksi, harus mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Dalam hal bangunan Gedung ketentuan tertentu dengan 1 (satu) lantai dengan luas lantai paling maksimal 100 m² (lima ratus meter persegi) Pemilik harus menyampaikan dokumen/data teknis pelaksanaan konstruksi bangunan Gedung sederhana. Pemilik pada saat terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

(2) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan pada saat pengajuan kondisi lapangan dan dokumentasi teknis pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung terhadap kesesuaian dengan PBG dan/atau ketentuan teknis.

(3) Dalam hal dilakukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan konstruksi dengan PBG dan/atau ketentuan SLF, Pemilik melaporkan kepada Dinas Teknis.

(4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap PBG, Pemilik memberikan rekomendasi kepada Pemilik.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
   a. penyusunan konstruksi dengan bentang terbatas (Kelas sisa);
   b. pengurusan izin laik fungsi.

(3) Rekomendasi penyusunan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dimuat/diuraikan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pemilik secara dengan kompleksitas penyusunannya.

(4) Dalam hal Pemilik tidak membutuhkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia dapat menyampaikan pelaksanaan konstruksi hingga rekomendasi terpenuhi.

(5) Dalam hal Pemilik tidak membutuhkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka hasil konstruksi pelaksanaan konstruksi dapat dimanfaatkan langsung.

(6) Pemilik membuat berita acara sebagai hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

(7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus ditanggali di dalam BMBO oleh Pemilik.

Pasal 19

(1) Jangkau sebagaimana dimaksud dalam dikenyakan dengan tidak pengujian commissioning test.

(2) Tidak pengujian commissioning test sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk semua instalasi mekanikal, elektrikal, dan pengujian spontaneous dengan Bangunan Gedung terpenuhi.

(3) Tidak pengujian commissioning test sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertujuan untuk mencerminkan instalasi mekanikal, elektrikal, dan pengujian spontaneous dengan Bangunan Gedung terpenuhi dan berhubungan sebagaimana semua dengan rencana teknis.

(4) Dalam pelaksanaan pengujian commissioning test, penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi dan/atau pemilik bangunan dapat melibatkan instansi dan/atau Pemerintah Daerah yang berwenang.

(5) Hasil pengujian commissioning test dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi dan instansi dan/atau Pemerintah Daerah yang berwenang.

(6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditanggali dalam BMBO oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi.

Pasal 20

(1) Dalam hal Bangunan Gedung berupa Bangunan Gedung Sederhana tempat dengan 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 500 m² (lima ratus meter persegi) yang tidak dibangun dengan menggunakan penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi, pengujian commissioning test sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemilik.

(2) Dalam hal Bangunan Gedung berupa Bangunan Gedung Sederhana tempat dengan 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 500 m² (lima ratus meter persegi) yang tidak dibangun dengan menggunakan penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi, hasil pengujian commissioning test dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pemilik.

(3) Dalam hal Bangunan Gedung berupa Bangunan Gedung Sederhana tempat dengan 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 500 m² (lima ratus meter persegi) yang tidak dibangun dengan menggunakan penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditanggali di dalam BMBO oleh Pemilik.

Pasal 31

(1) Penyedia jasa pengerjaan konstruksi atau manajemen konstruksi atau Pemilik membuat daftar cacat hasil pemeriksaan lapangan fungsi berdasarkan laporan pengawasan, hasil inspeksi, dan hasil pengujian (commissioning test).

(2) Daftar cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara partisipatif konstruksi cacat.

(3) Surat penyataan kelaikan fungsi diskualifikasi oleh penyedia jasa pengerjaan konstruksi atau sebagaimana konstruksi atau Pemilik berdasarkan daftar cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Surat penyataan kelaikan fungsi diskualifikasi oleh Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) unit atau ruang kan paling sedikit 70 m² tujuh puluh dua meter persegi dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) unit atau ruang kan lantai paling sedikit 30 m² tiga puluh puluh meter persegi yang dibangun oleh penyedia jasa pengerjaan konstruksi sebagaimana konstruksi.

(5) Surat penyataan kelaikan fungsi diskualifikasi oleh penyedia jasa pengerjaan konstruksi atau manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Bangunan Gedung selain Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Surat penyataan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diskualifikasi berdasarkan verifikasi berdasarkan [illegible].

(7) Surat penyataan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diskualifikasi berdasarkan laporan pelaksanaan konstruksi dan Pemilik.

(8) Laporan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

a. dokumentasi [illegible] pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung; dan

b. surat penyataan Pemilik selesai pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung telah selesai dikerjakan secara lengkap [illegible].

(9) Surat penyataan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diskualifikasi setelah Bangunan Gedung dimanfaatkan.

(10) Daftar cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat penyataan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), dan gambar Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dimaksud [illegible] diserahkan oleh [illegible] oleh penyedia jasa pengerjaan konstruksi atau manajemen konstruksi atau Pemilik.

Pasal 32

(1) Dalam rangka meningkatkan pemeliharaan terhadap standar teknis tertinggi pemeliharaan dan pemeliharaan bangunan gedung, tertinggi daftar cacat yang disiapkan oleh Pemilik untuk [illegible] m² [illegible] [illegible] [illegible]

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 April 2026
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

AFTA TARIFF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 April 2026
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FATIK SUDIR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR 227

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Bagian Hukum,

ASRAF FURQAN, SH
Pembina / IV a
NIP. [illegible]

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 24 TAHUN 2021
TENTANG: PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA

DENAH PROTOTIPE TIPE 36 MODEL 1

1. Denah dan Dinding luar

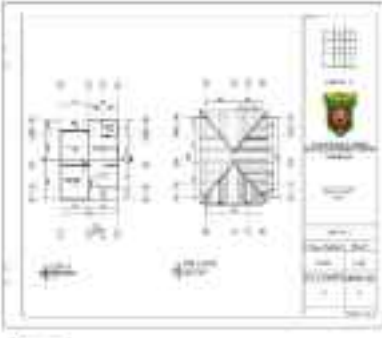

2. Potongan

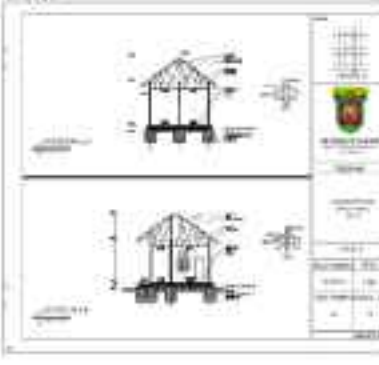

1 Terrasse

2 Gebäudeplan

4. Detail Pondasi

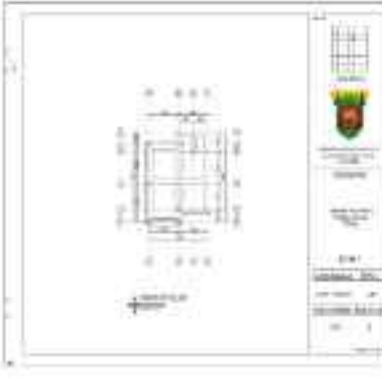

5. Detail Kolom

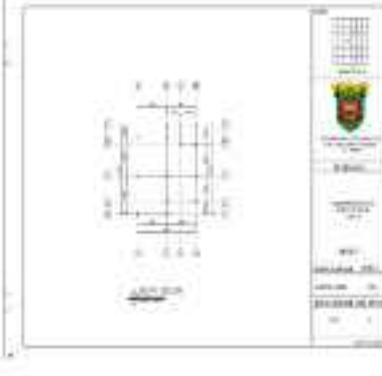

1. [illegible]

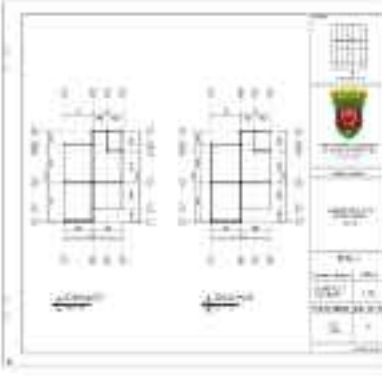

2. [illegible]

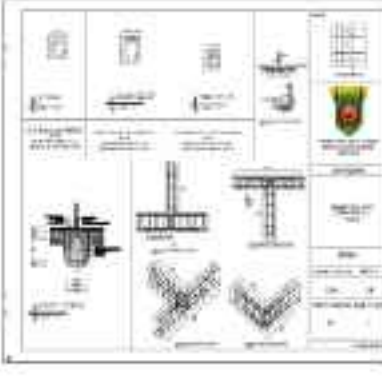

[illegible]

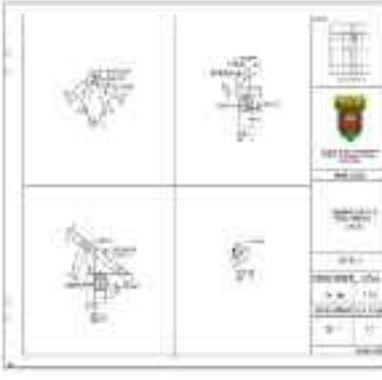

[illegible]

1. Detail Air Kolam Ikan Kolam

2. Detail Deil

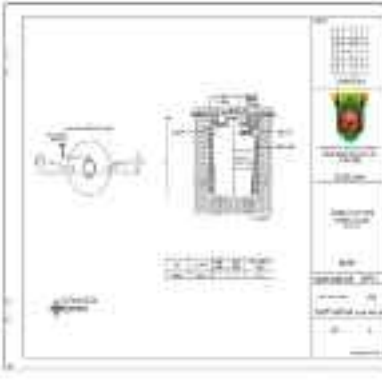

13. Detail 1700 Layout del accessorio

14. Wiring Diagram

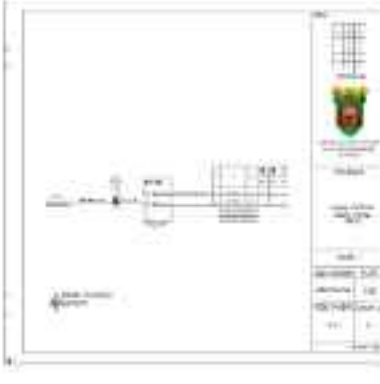

DEMAN PROTOTIPE TIPE 36 MODEL 3

1. Denah dan Detail Atap

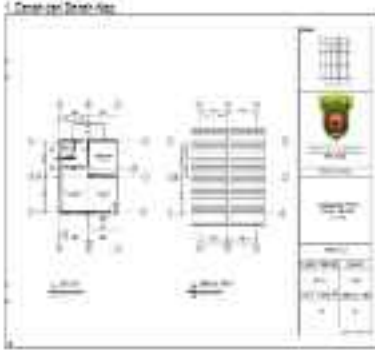

2. Potongan

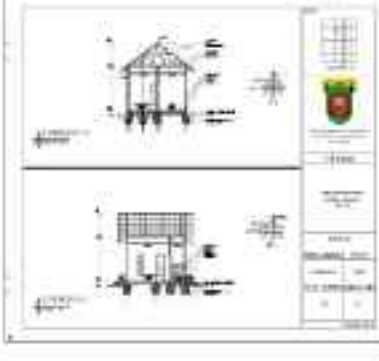

3. [illegible]

4. [illegible]

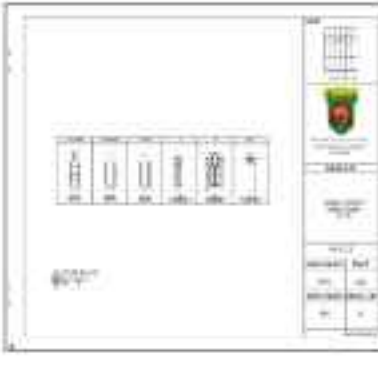

a. Dengan Perintah

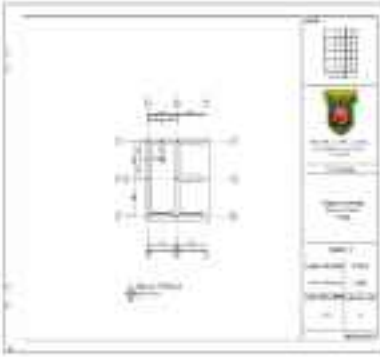

b. Dengan Kursor

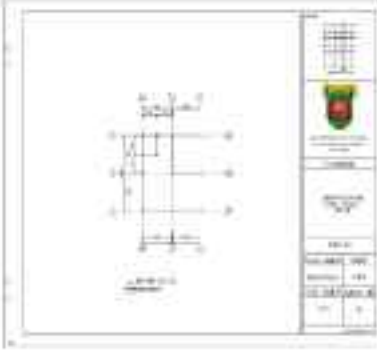

1. [illegible]

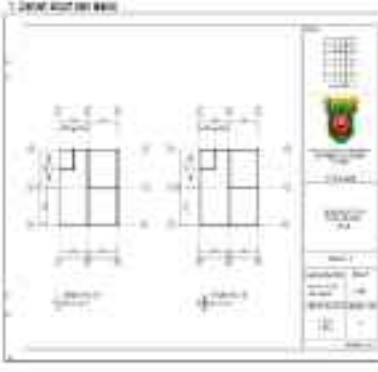

2. [illegible]

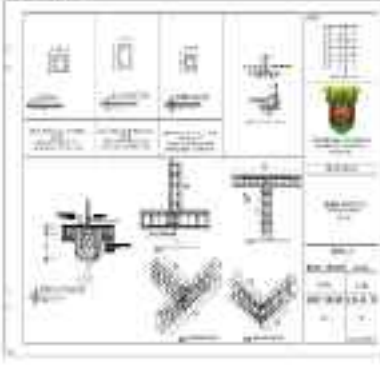

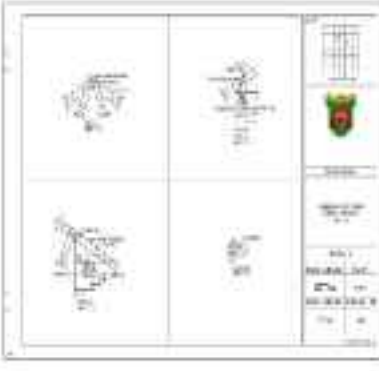

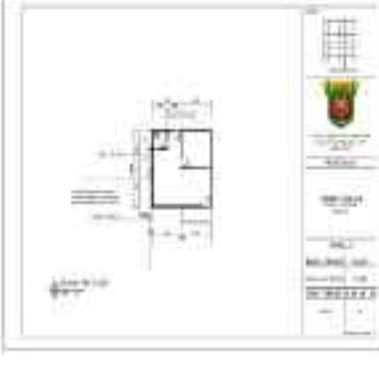

1. [illegible]

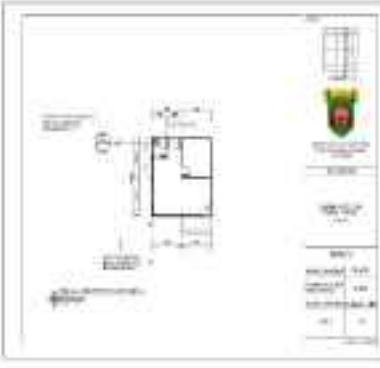

2. [illegible]

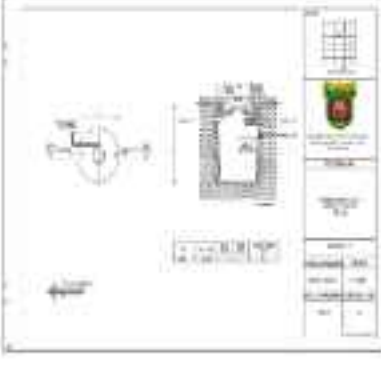

13. Circuit Tile Layout and Dimensions

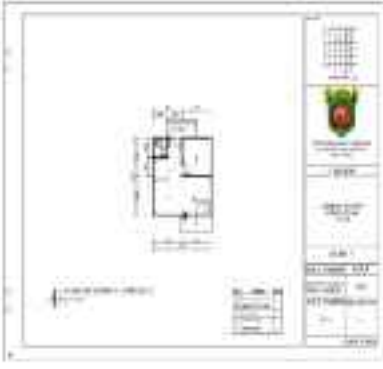

14. Wiring Diagram

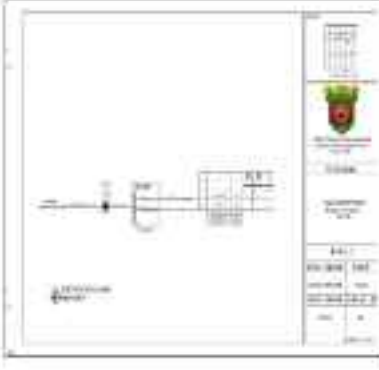

DENAH PROTOTIPE TIPE 36 MODEL 3

1. Denah dan Denah Atap

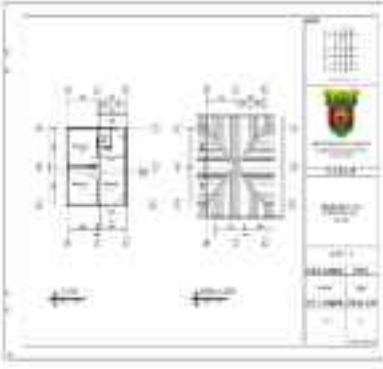

2. Potongan

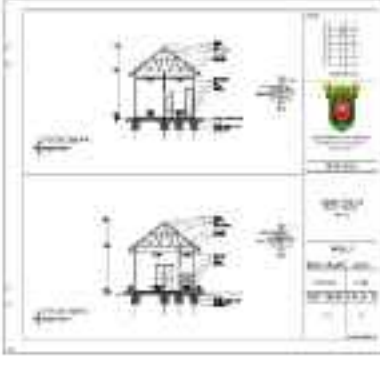

3. [illegible]

4. [illegible]

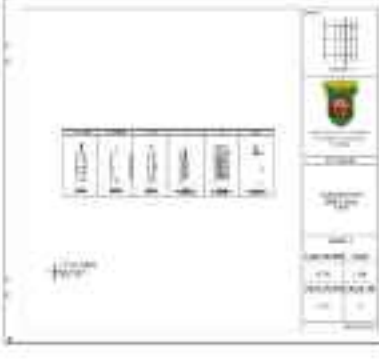

[illegible]

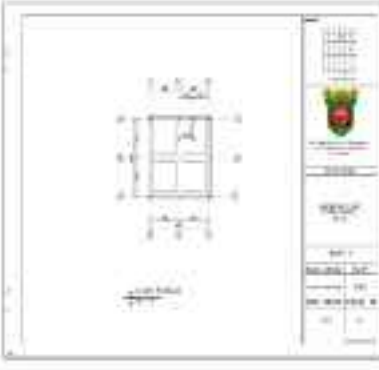

[illegible]

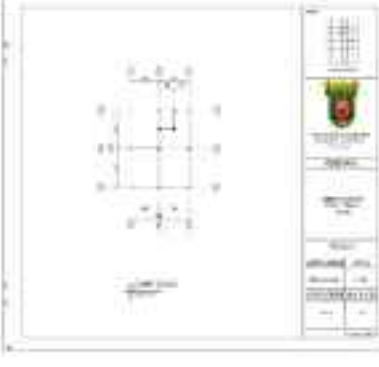

7. Detail Stud Iron Mesh

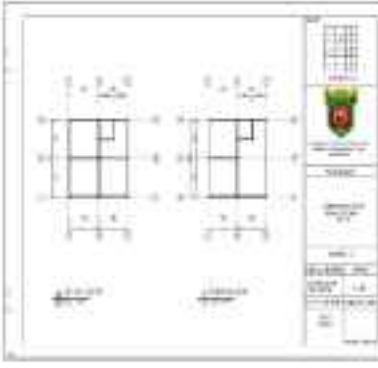

8. Detail Formwork

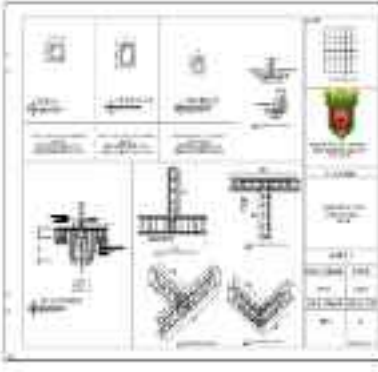

[illegible]

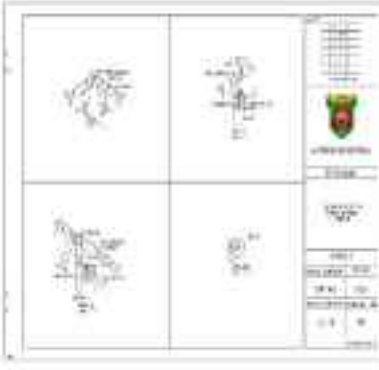

[illegible]

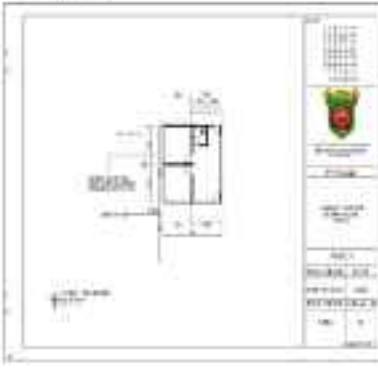

1. [illegible]

2. [illegible]

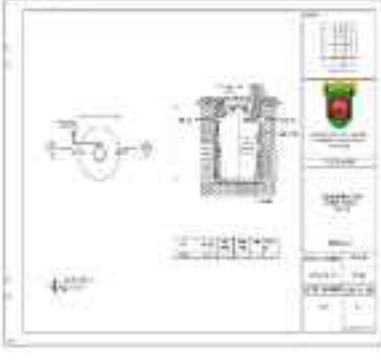

13. Detail Titi Lampu dan Boosster

14. Wiring Diagram

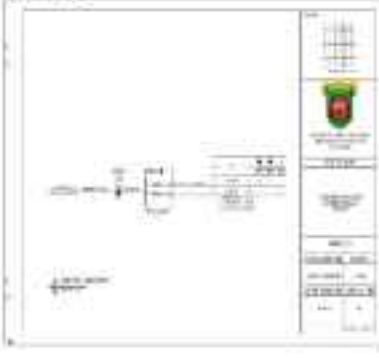

DENAH PROTOTIPE TIPE 36 MODEL 4

1. Denah dan Detail Atap

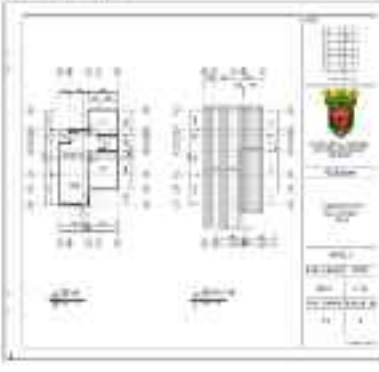

2. Potongan

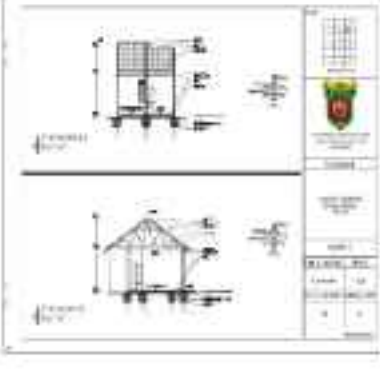

[illegible]

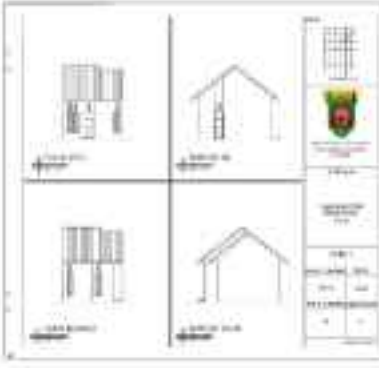

[illegible]

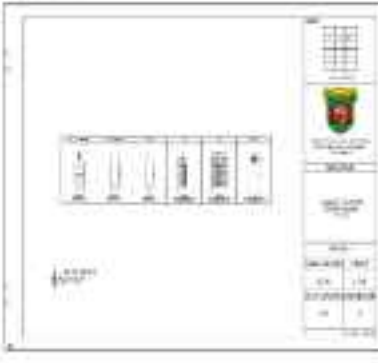

[illegible]

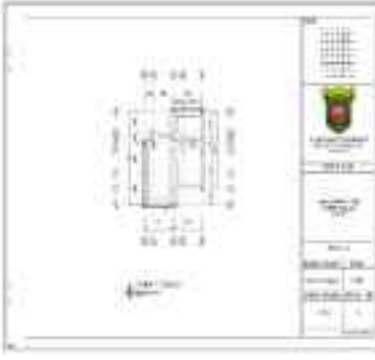

[illegible]

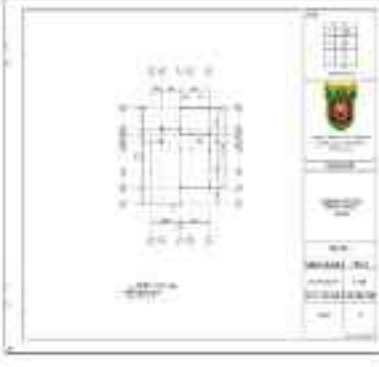

7. [illegible]

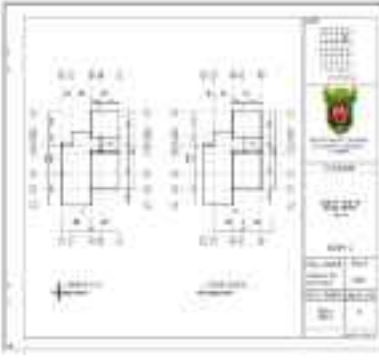

8. [illegible]

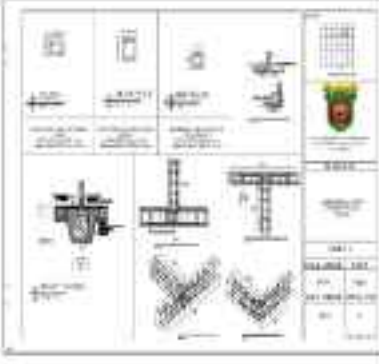

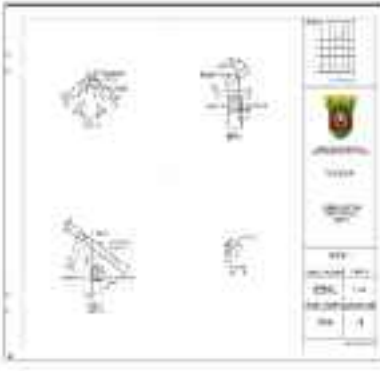

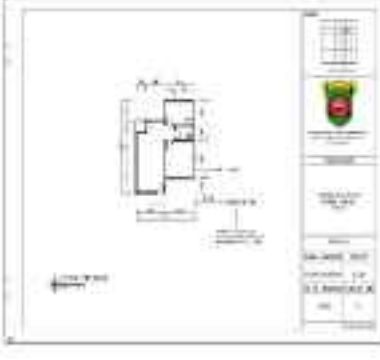

7. [illegible]

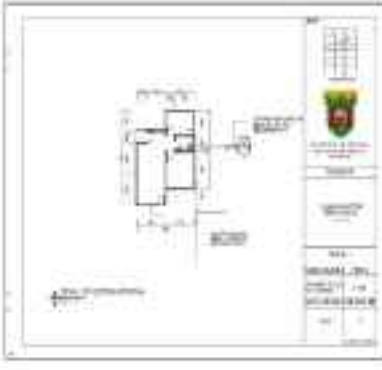

12. [illegible]

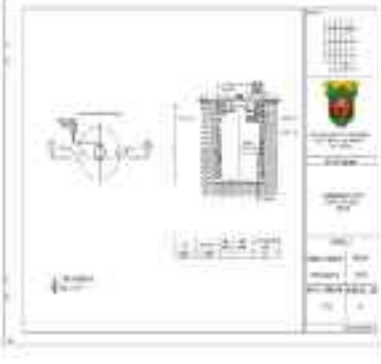

13. Detail Titi Lampu dan Boosster

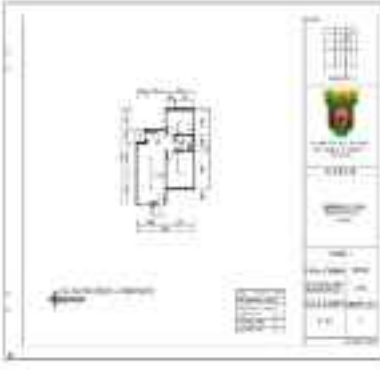

14. Wiring Diagram

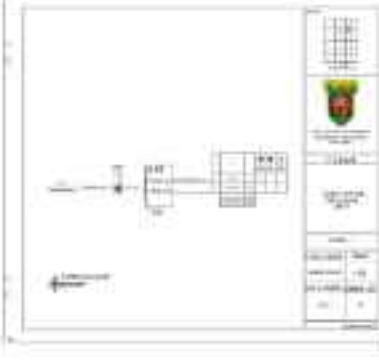

DENAH PROTOTIPE TIPE 36 MODEL B

1. Denah dan Detail Atap

2. Potongan

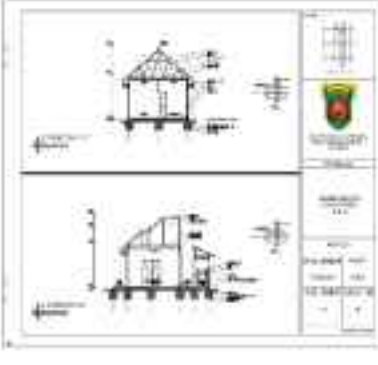

[illegible]

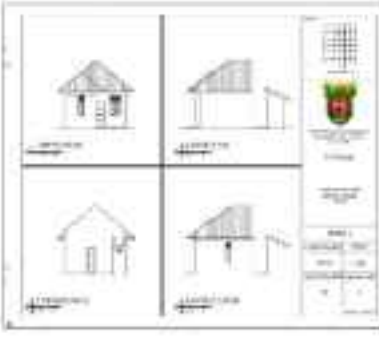

[illegible]

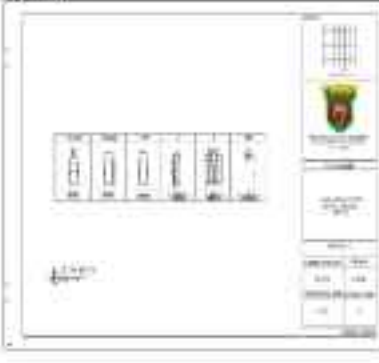

[illegible]

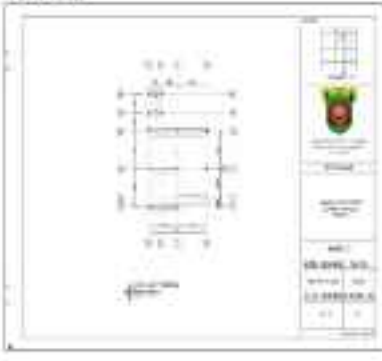

[illegible]

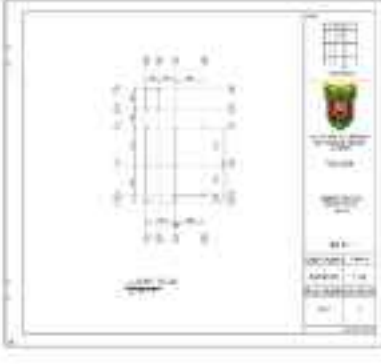

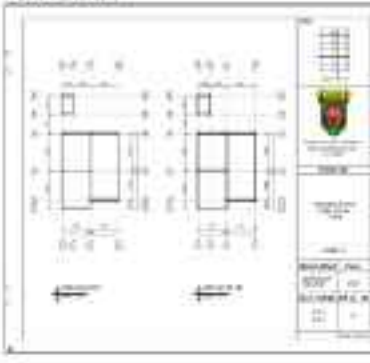

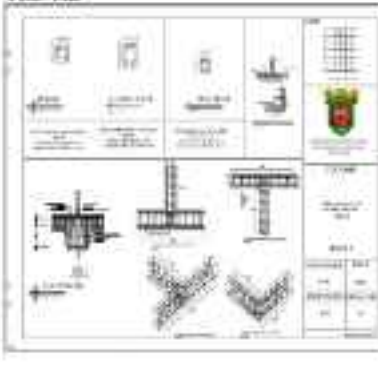

[illegible]

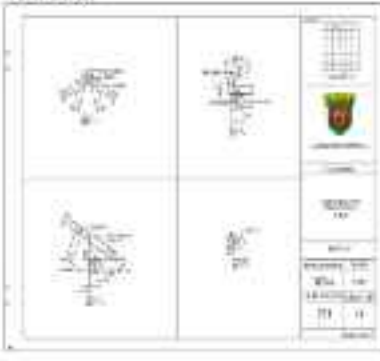

[illegible]

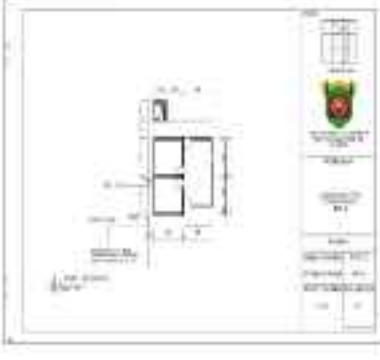

7. [illegible]

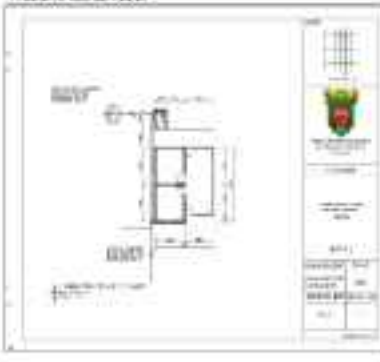

8. [illegible]

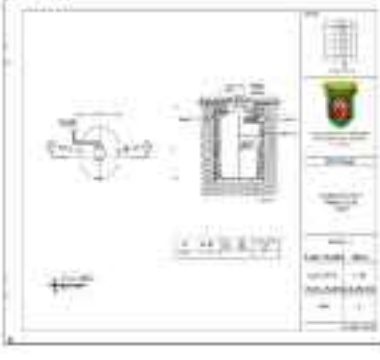

13. Detalle Pila Lampu dan accesories

14. Wiring Diagram

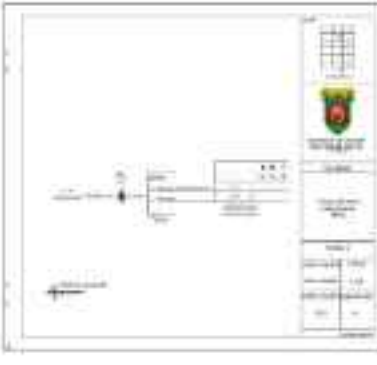

DENAH PROTOTIPE TIPE 40 MODEL 1

1. Denah dan Denah Atap

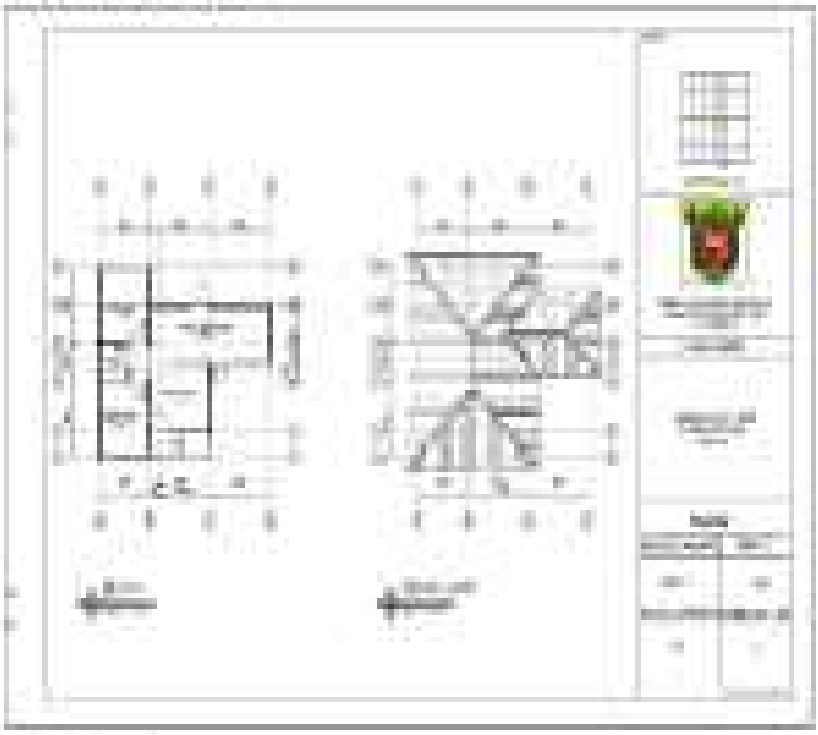

2. Potongan

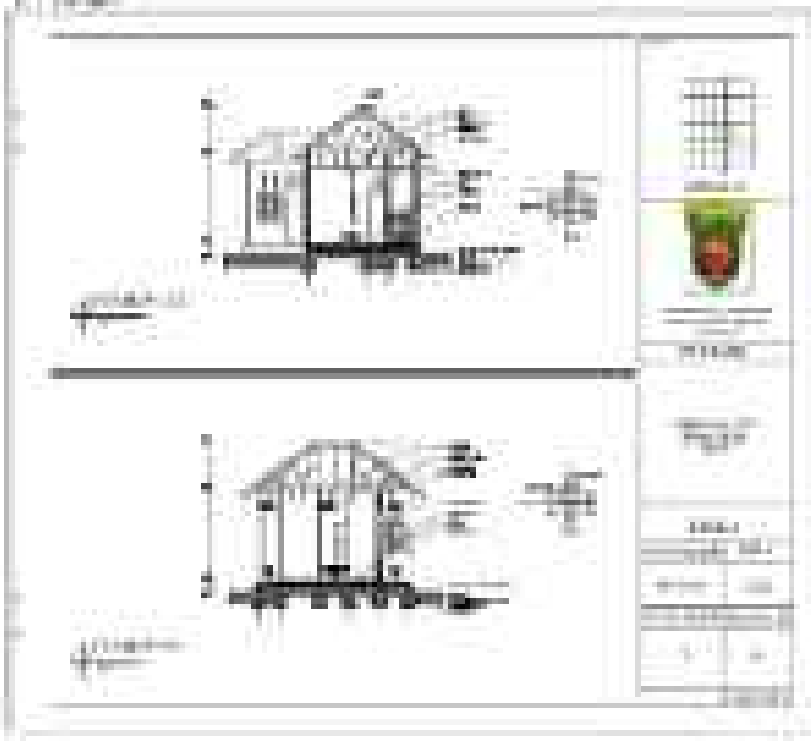

2. Tymczasowy

4. Zabudowa

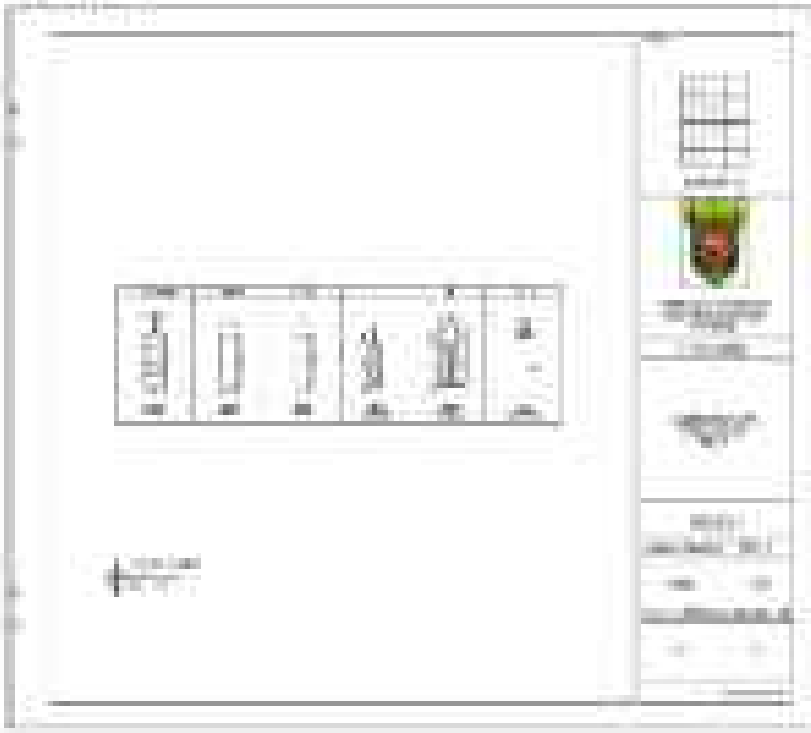

1. Denah Pondasi

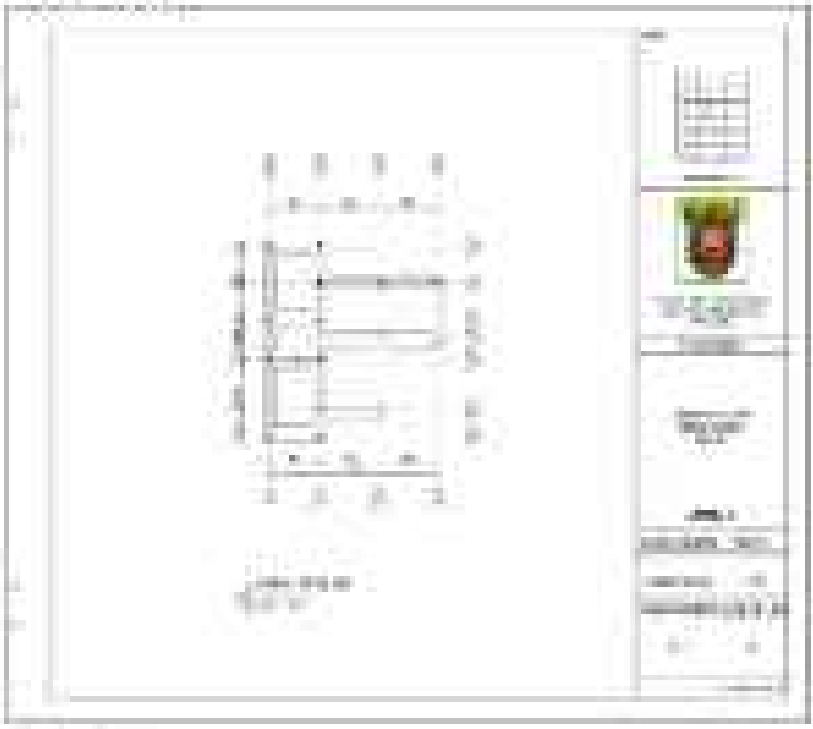

2. Denah Kolom

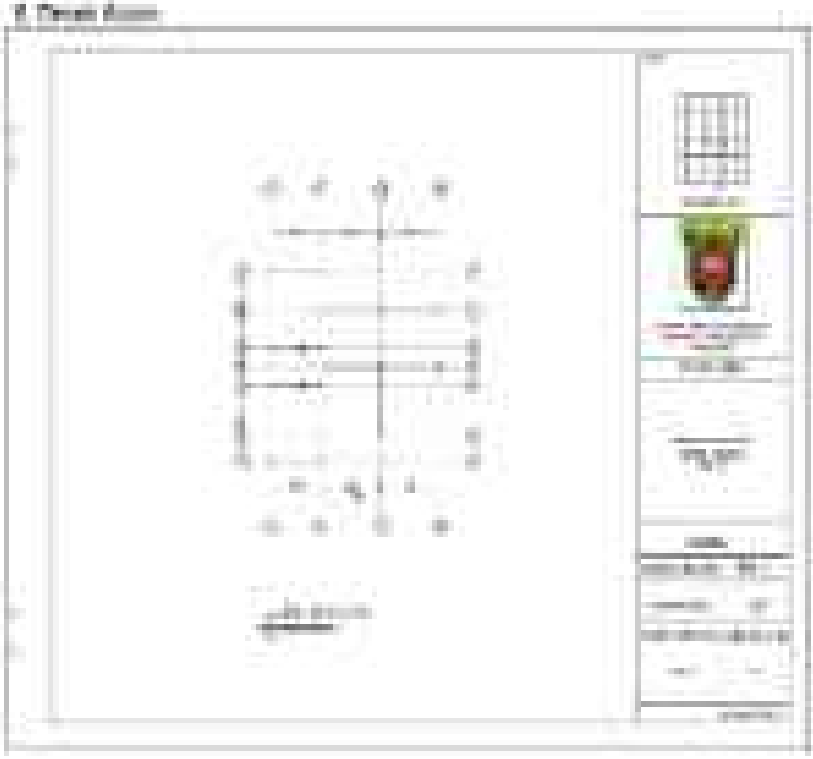

7. Dewan Diagram Bata

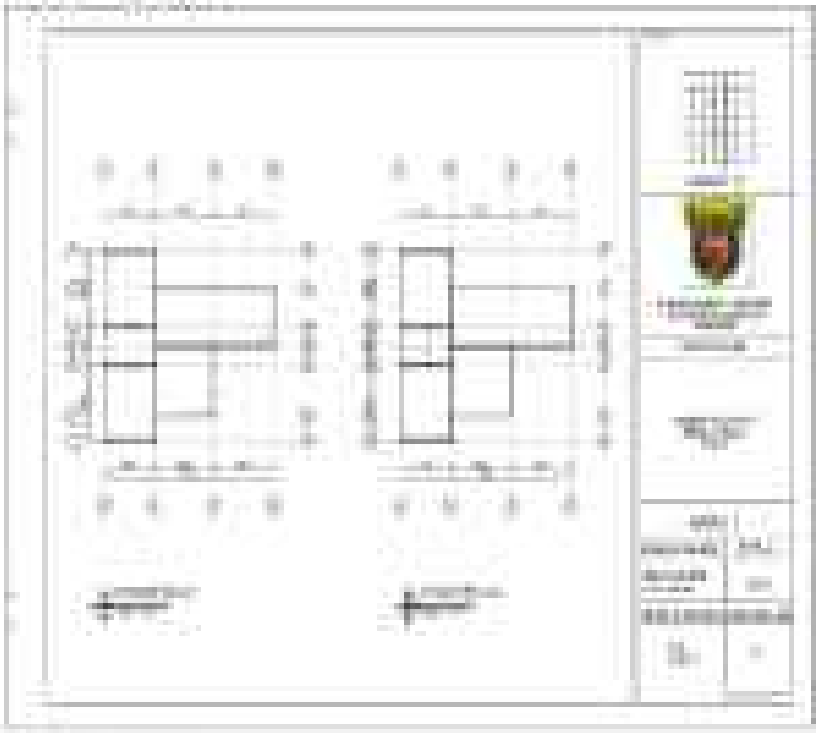

8. Lane Frame

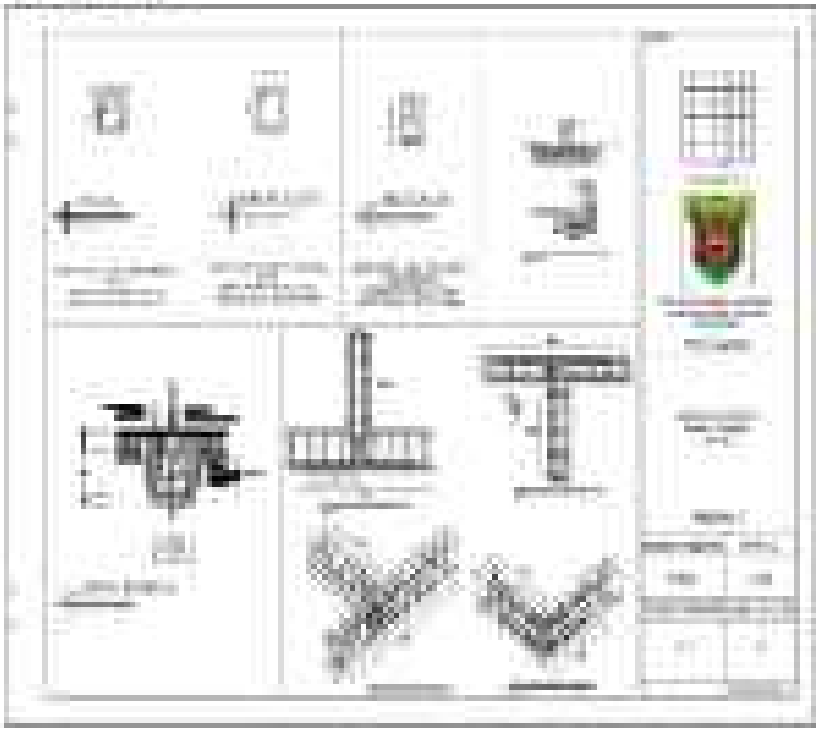

[illegible]

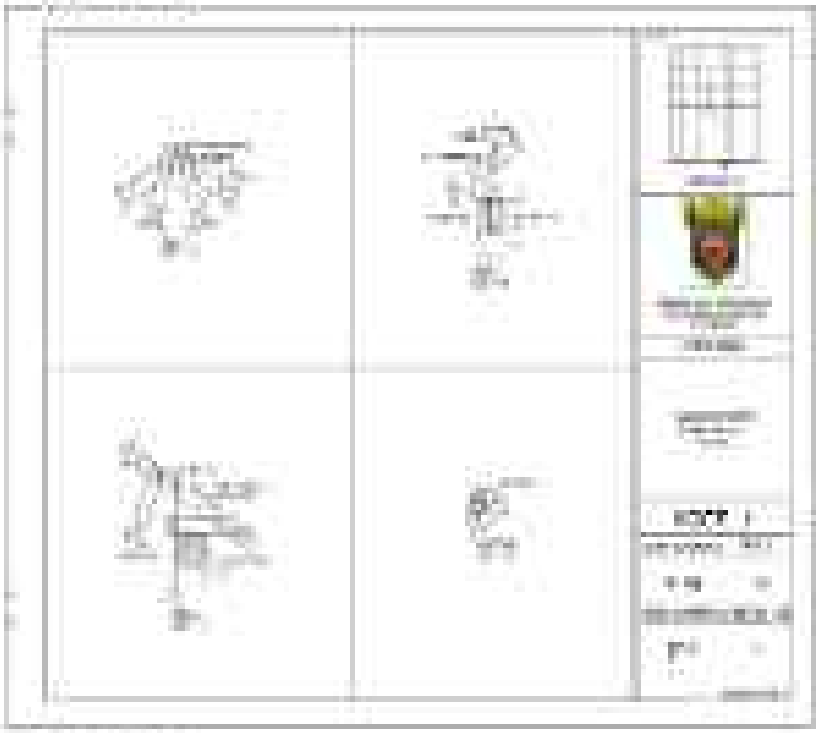

[illegible]

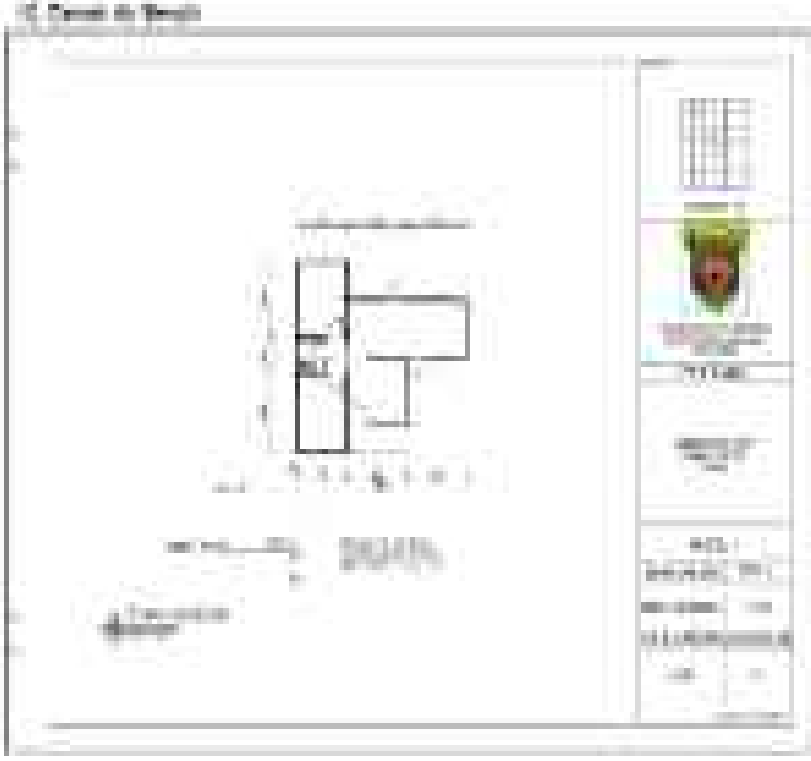

14. Danach im Keller und Kitchen

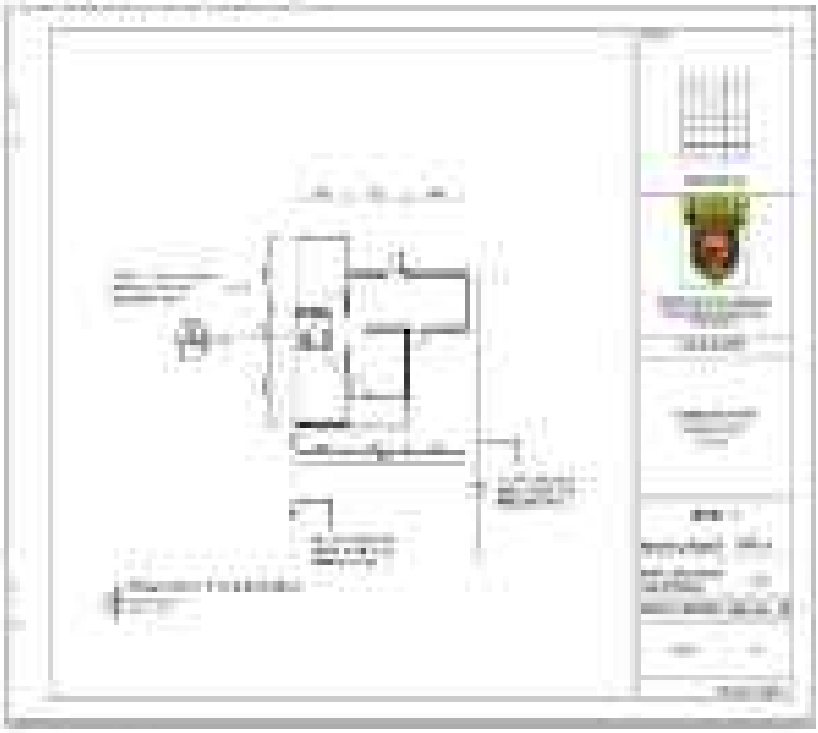

14. Dann wird

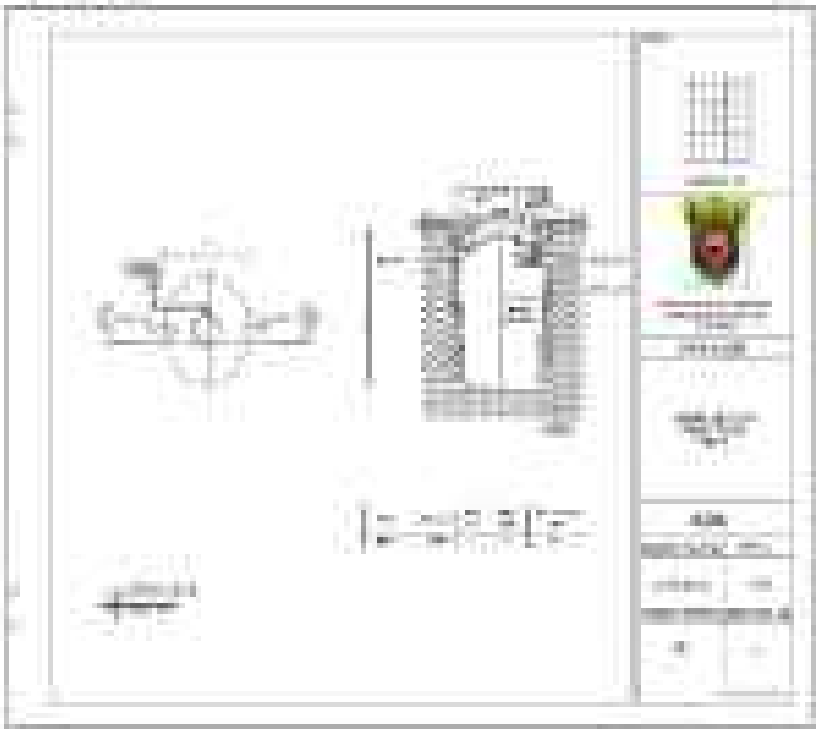

12. Denah Tiki Lengu dan Diagonal:

13. Wong Sagem:

DENAH PROTOTIPE TIPE 45 MODEL 3

1. Denah dan Denah Atap

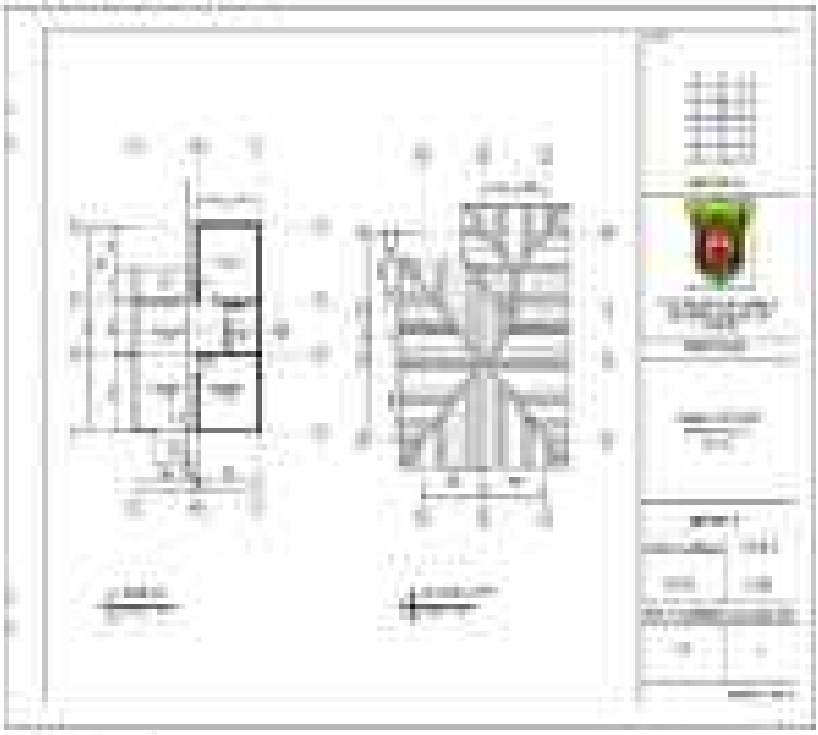

2. Potongan

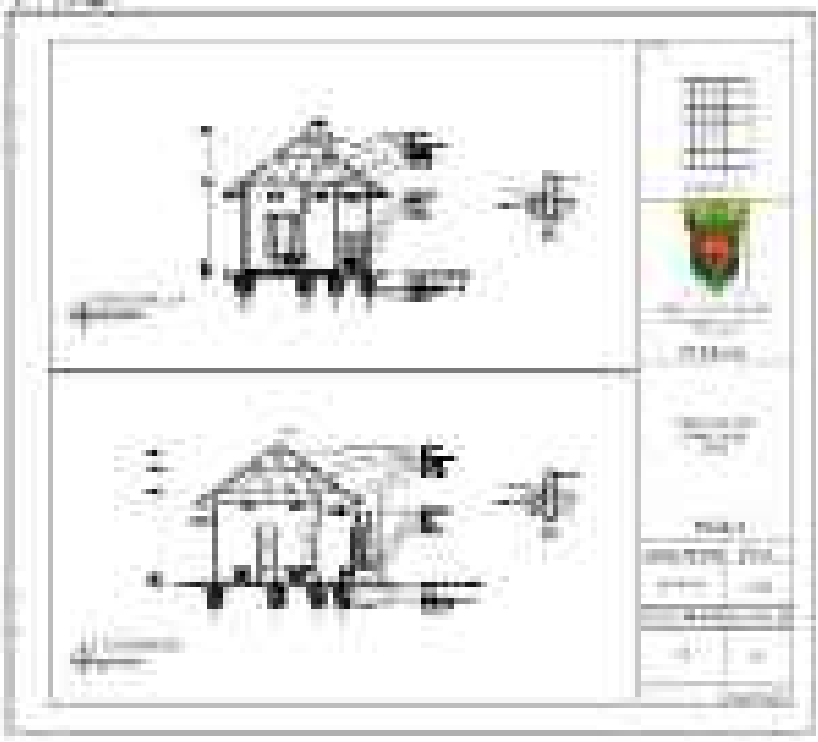

2. Tenuti

3. Lato sud

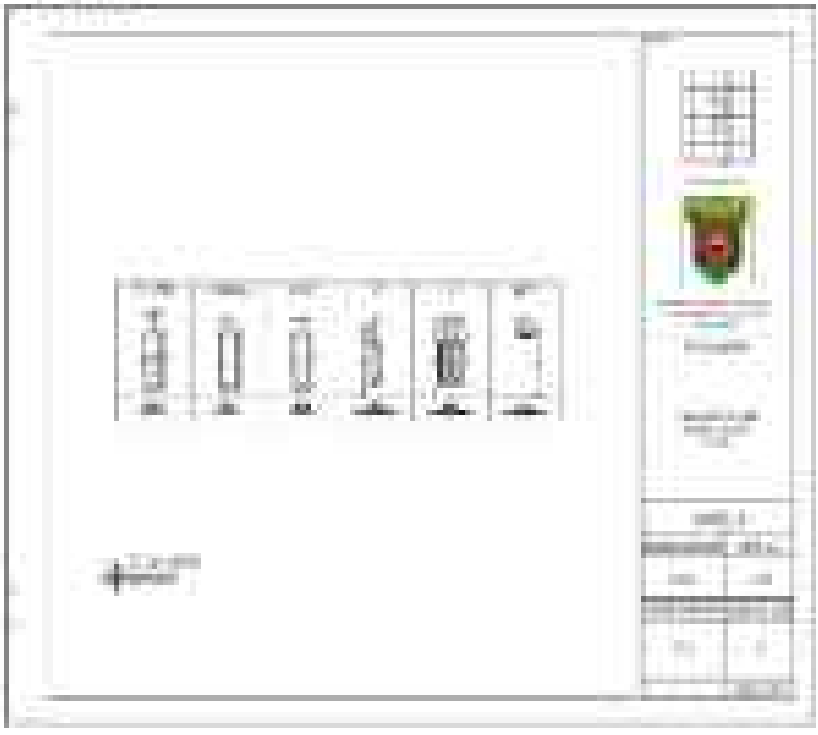

3. Denah Pondasi

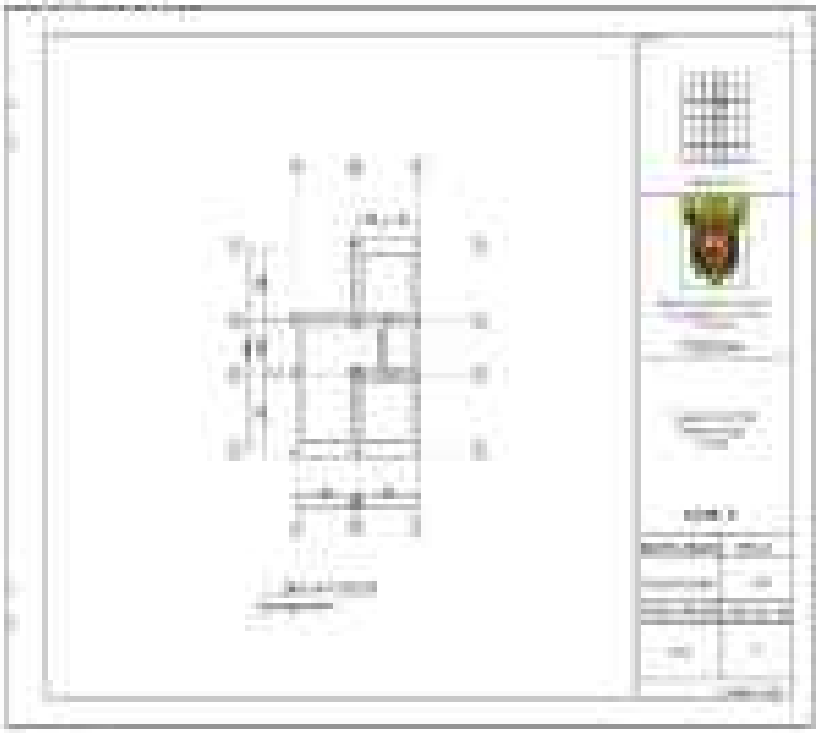

4. Denah Kolom

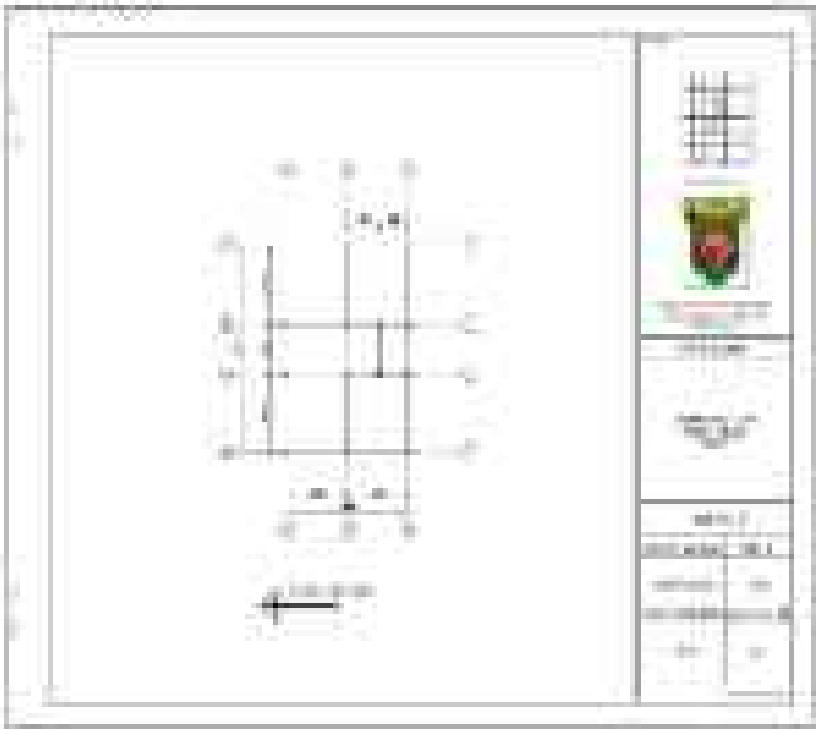

7. Dewan Disorder Bank

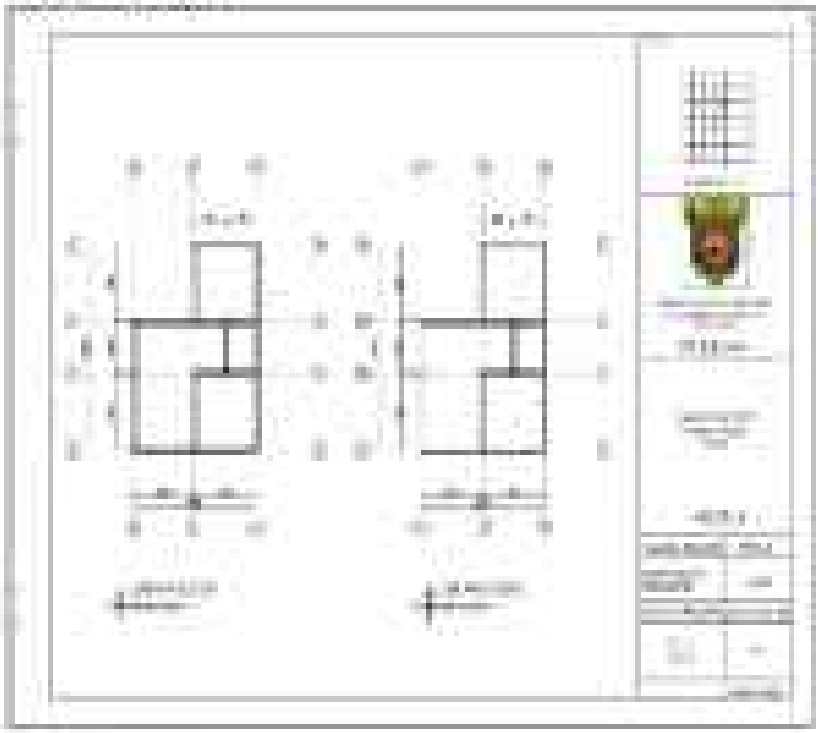

8. Lahan Parkir

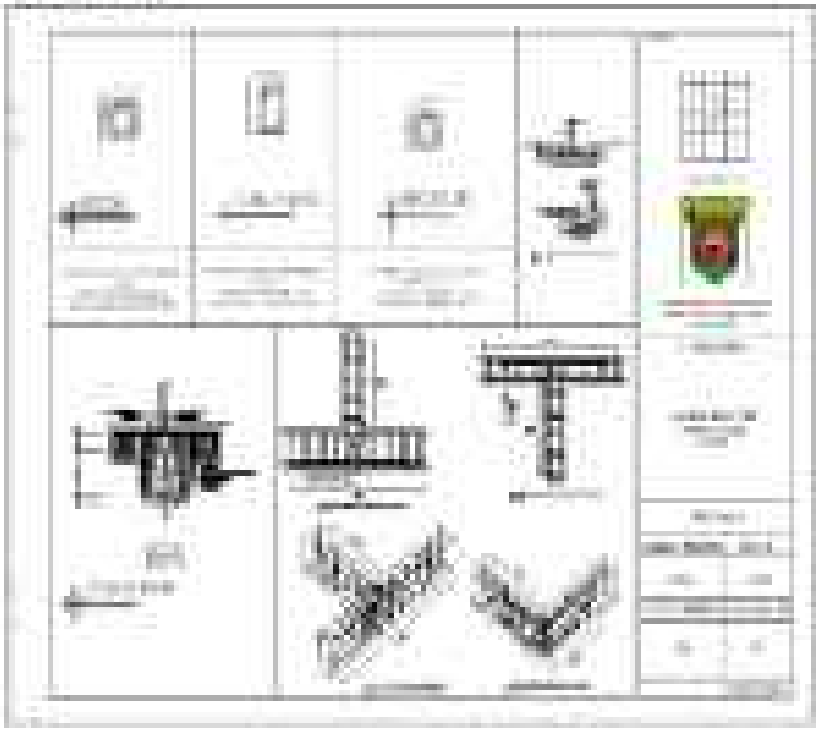

5. Detail Kuda-Kuda

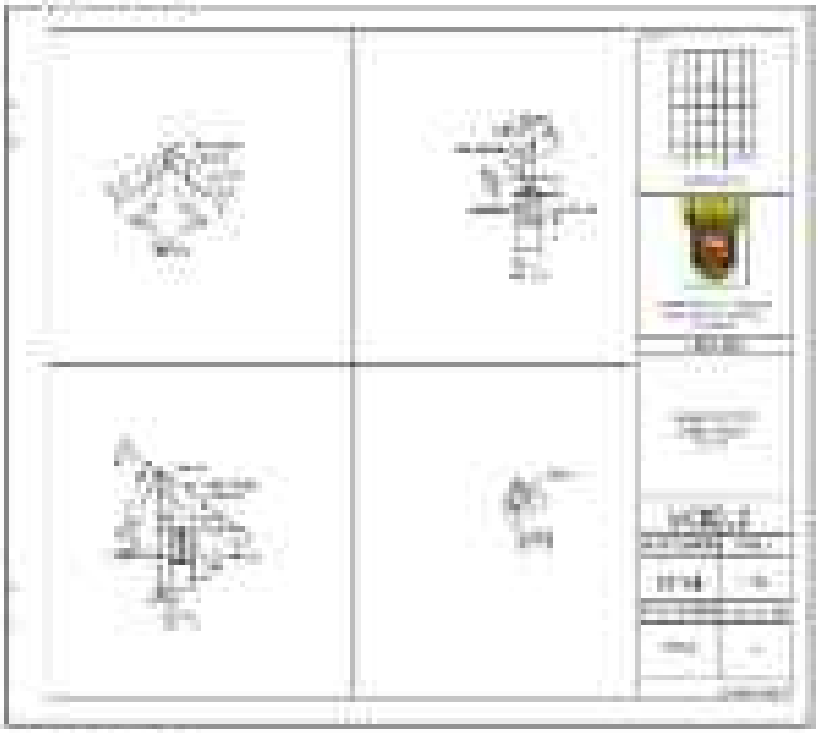

6. Detail Ari Bangkh

11. Detail Ini Dapur dan Kitchen

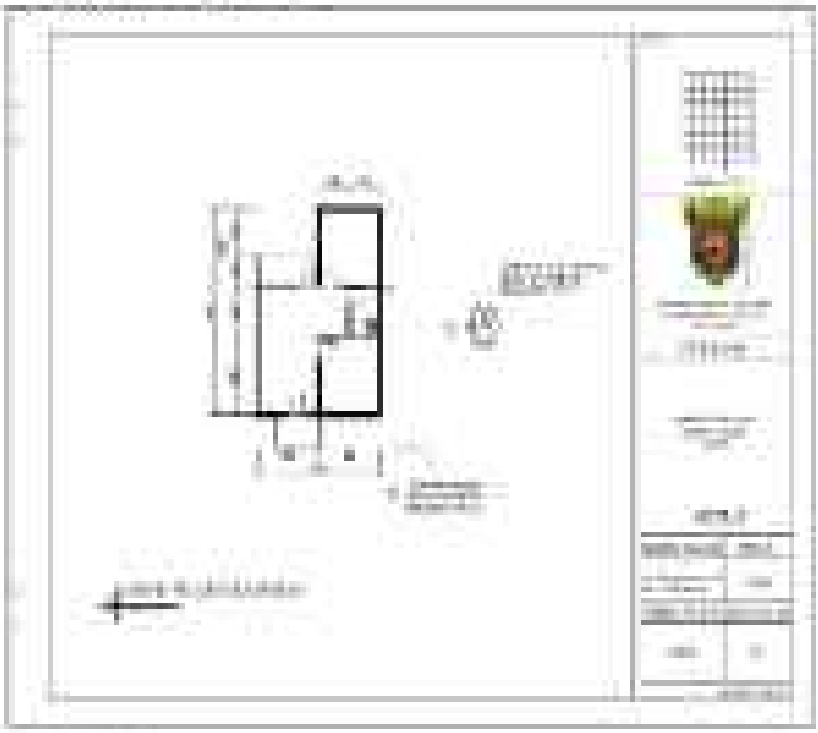

12. Detail Kom

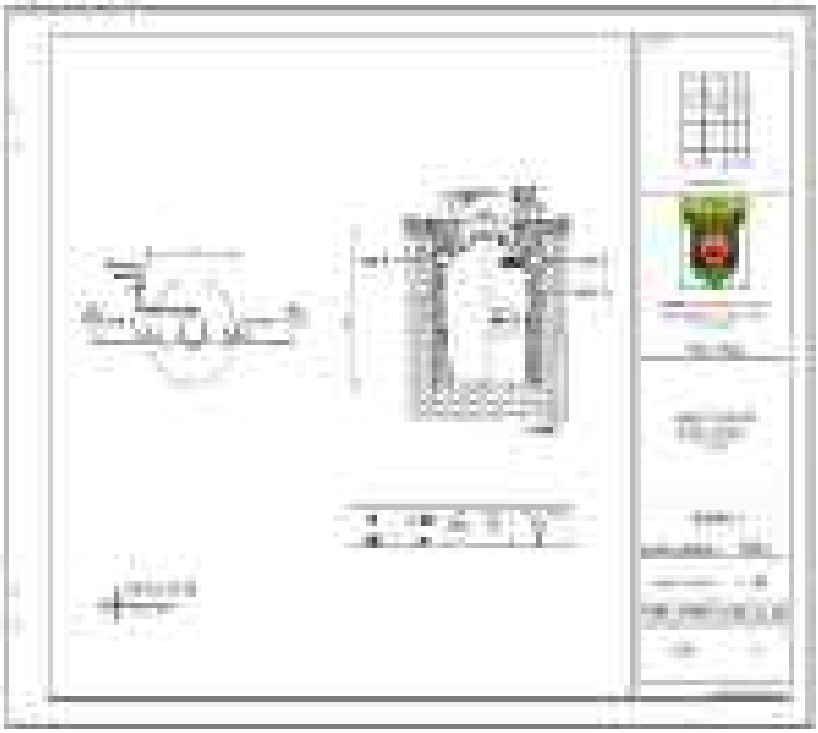

12. Detail Tiki Lampu dan Dispenser

13. Wiring Diagram

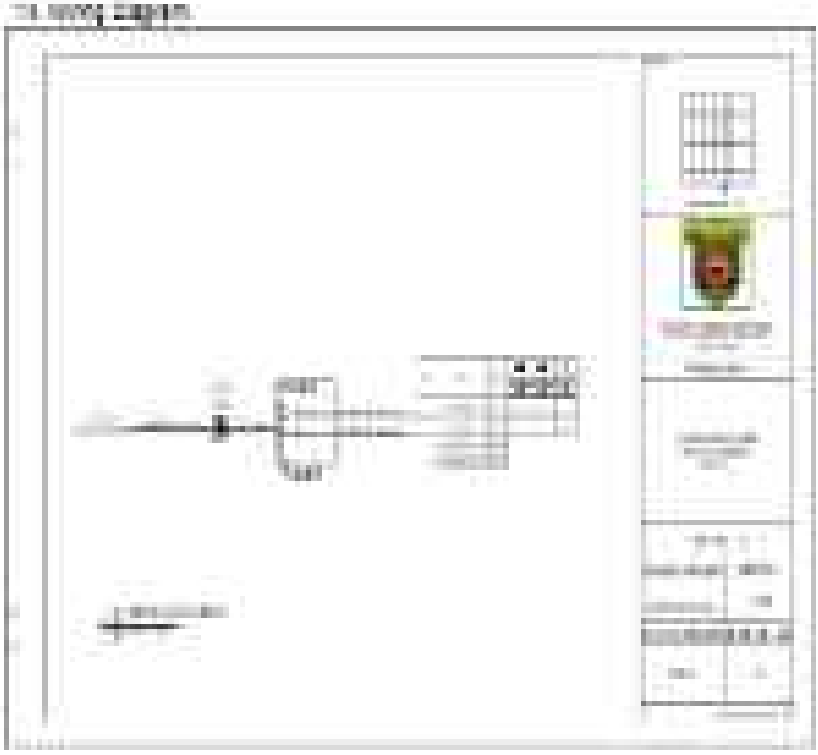

DENAH PROTOTIPE TIPE 45 MODEL 3

1. Denah dan Denah Atap

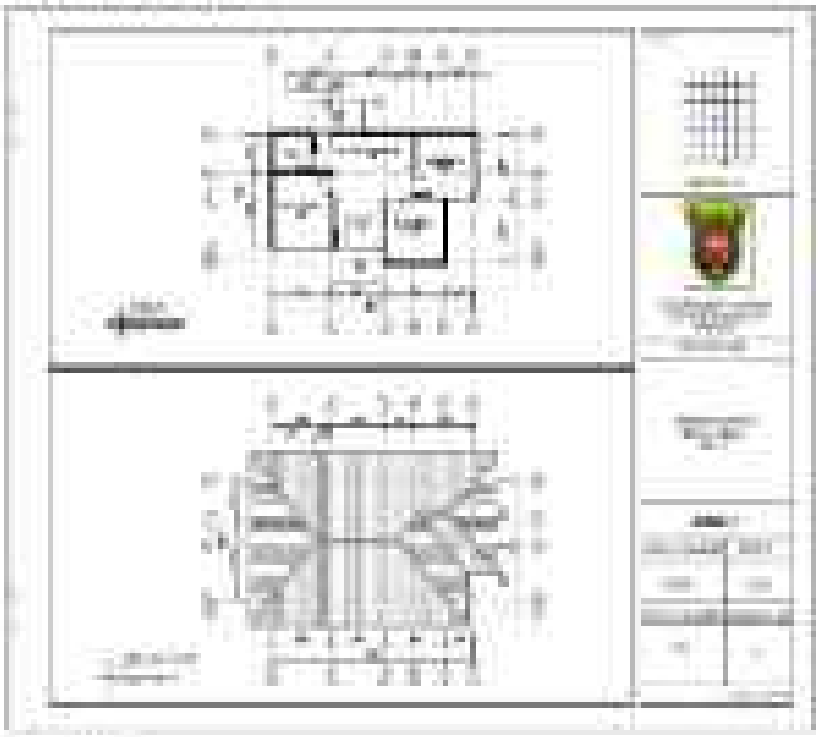

2. Potongan

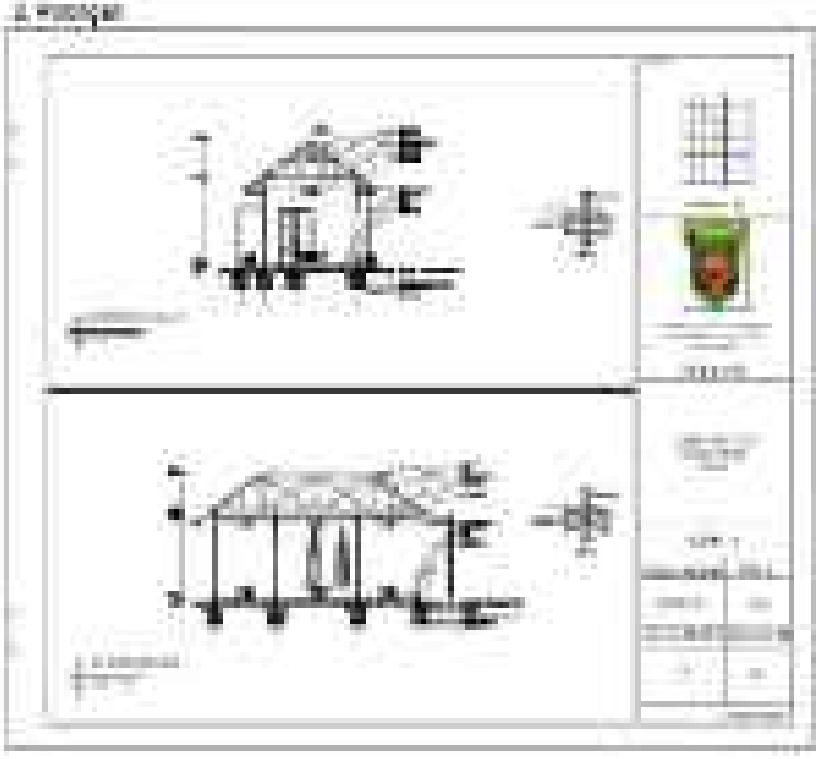

5. Terrace

4. Detail Gutter

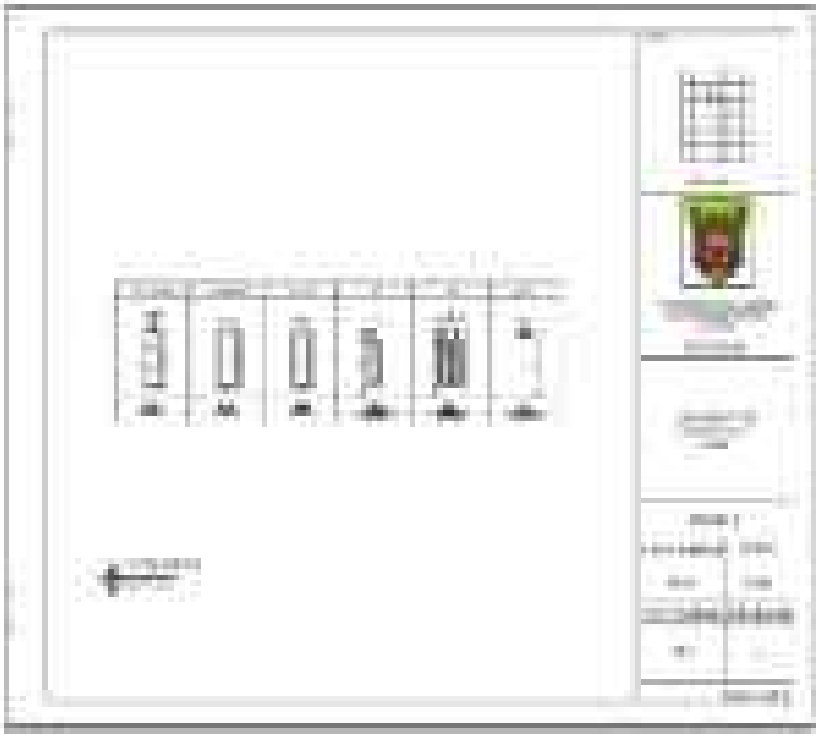

2. Denah Pondasi

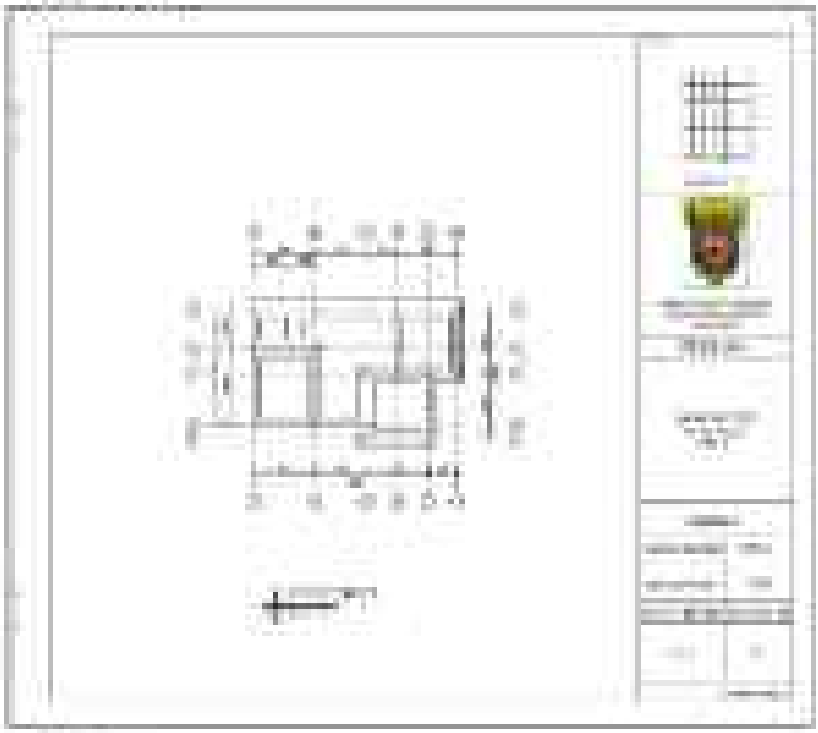

3. Denah Kolom

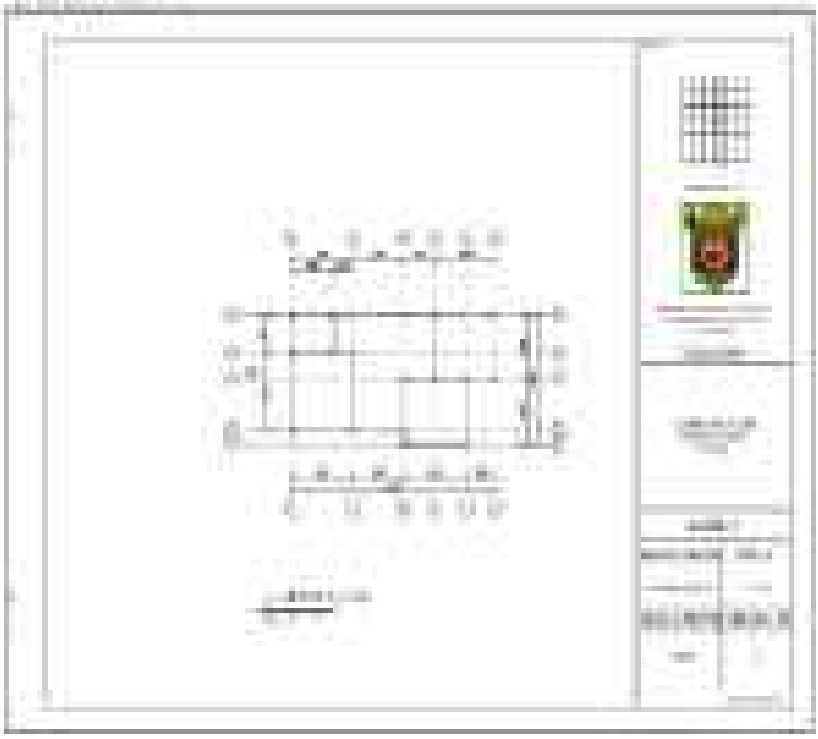

7. Dewan Diorama Bawah

8. Detail Pintu

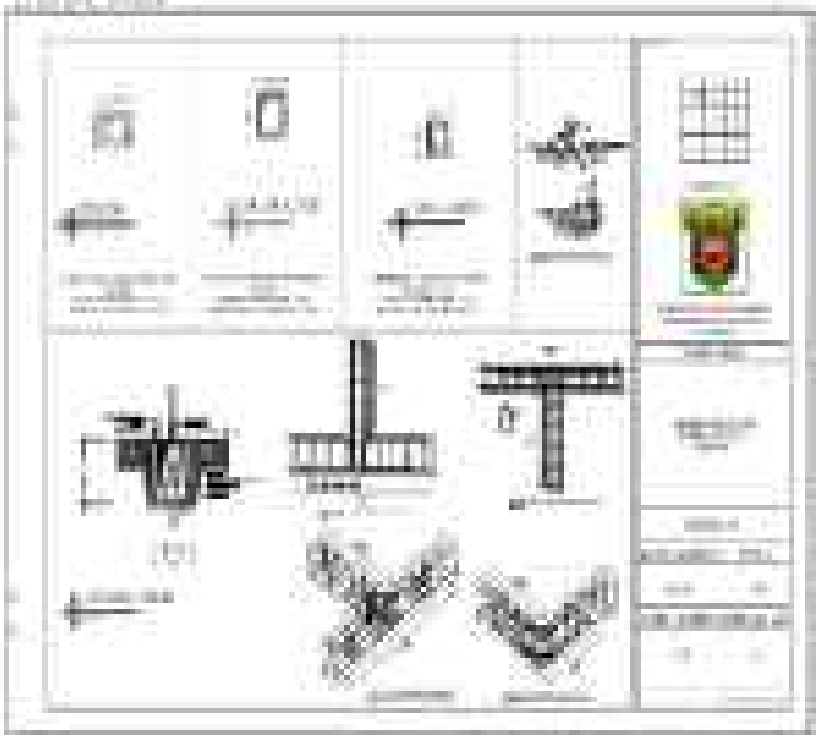

3. Orient Scale Code

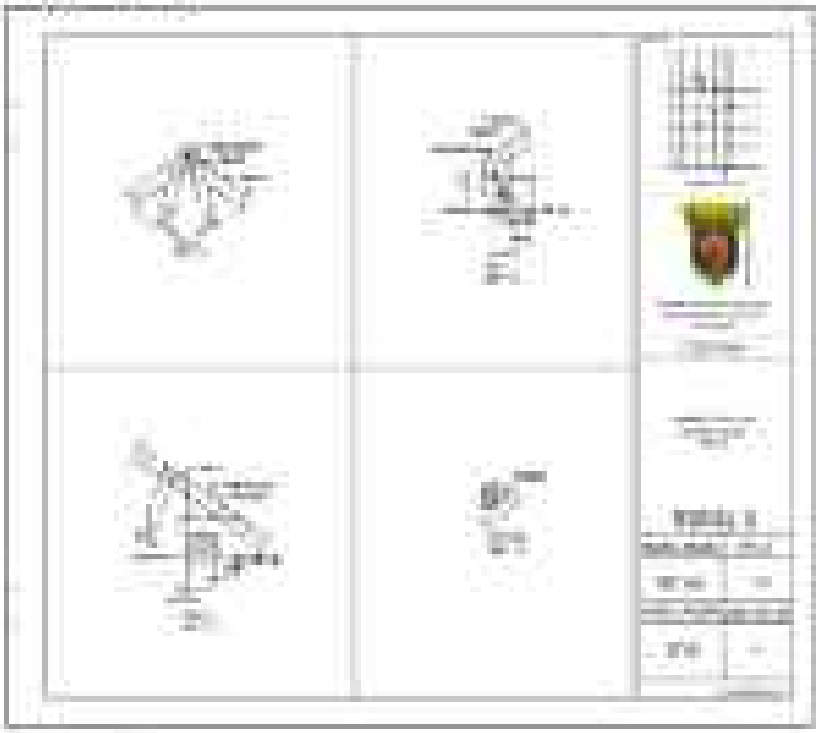

10. Center of Mass

11. Denah Ruang Kelas dan Kitchen

12. Detail atap

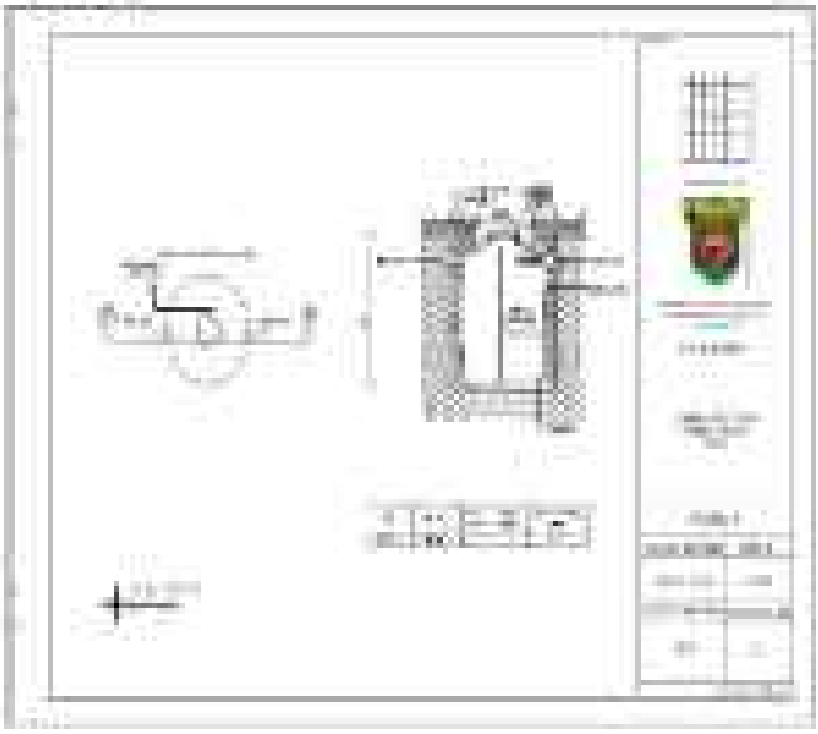

12. Detail 784 Lampu dan Stopkontak

14. Wiring Diagram

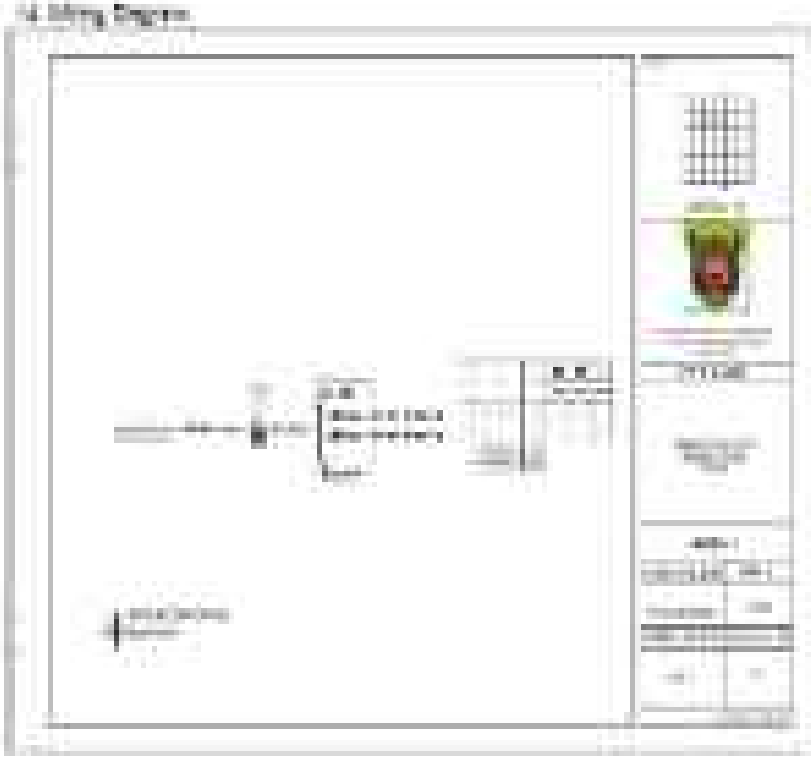

DENAH PROTOTIPE TIPE 45 MODEL 4

1. Denah dan Denah Atap

2. Potongan

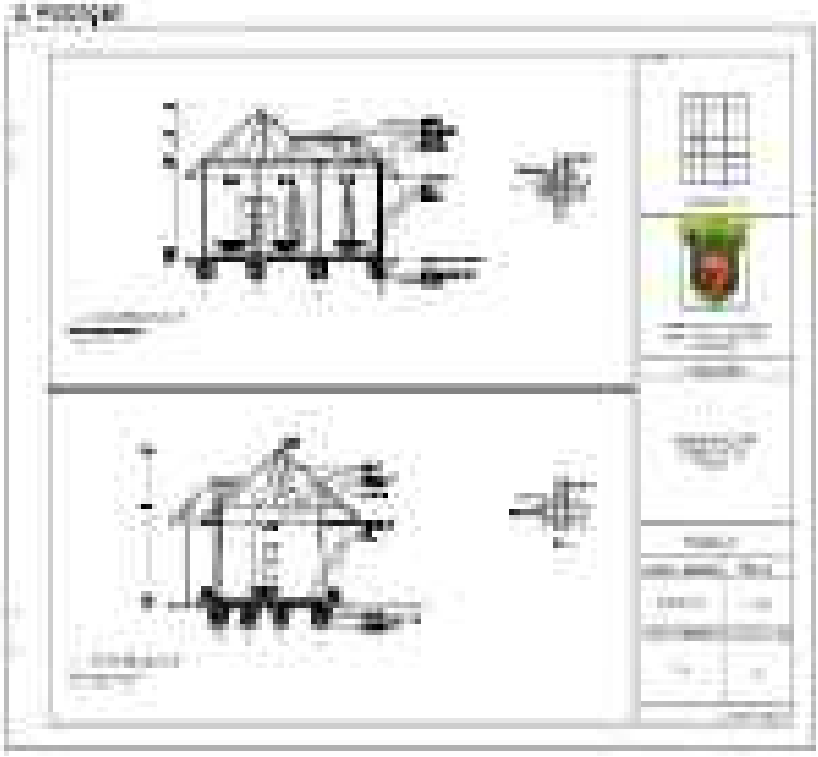

3. Texas

4. Orbel Scam

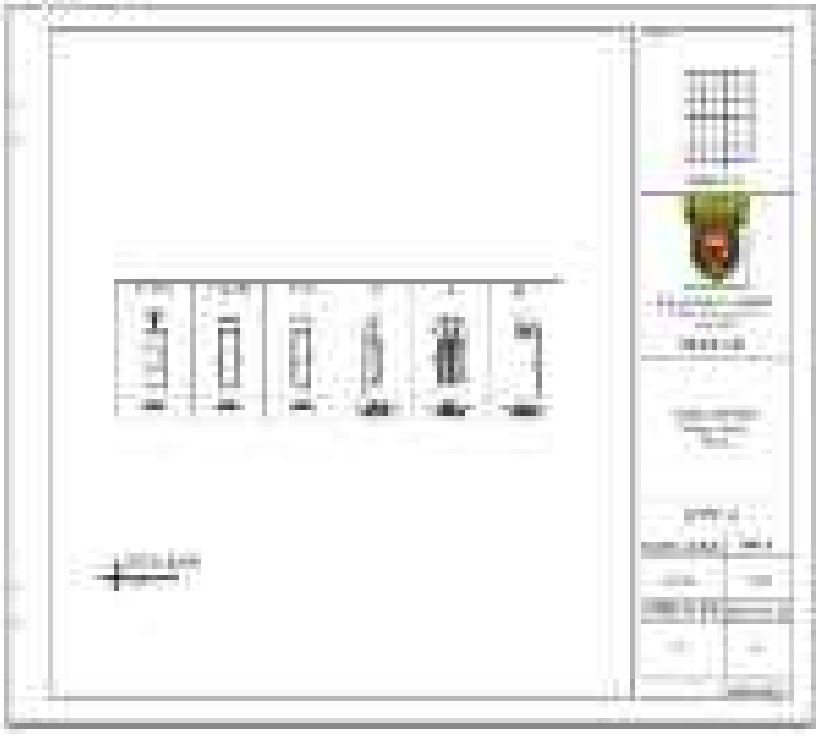

2. Denah Pondasi

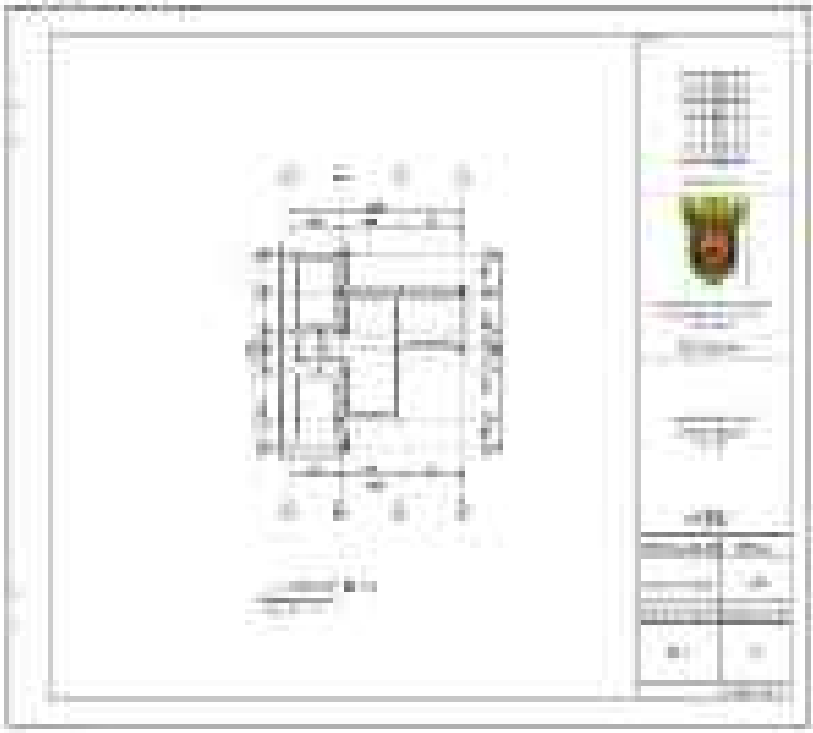

4. Denah Kolom

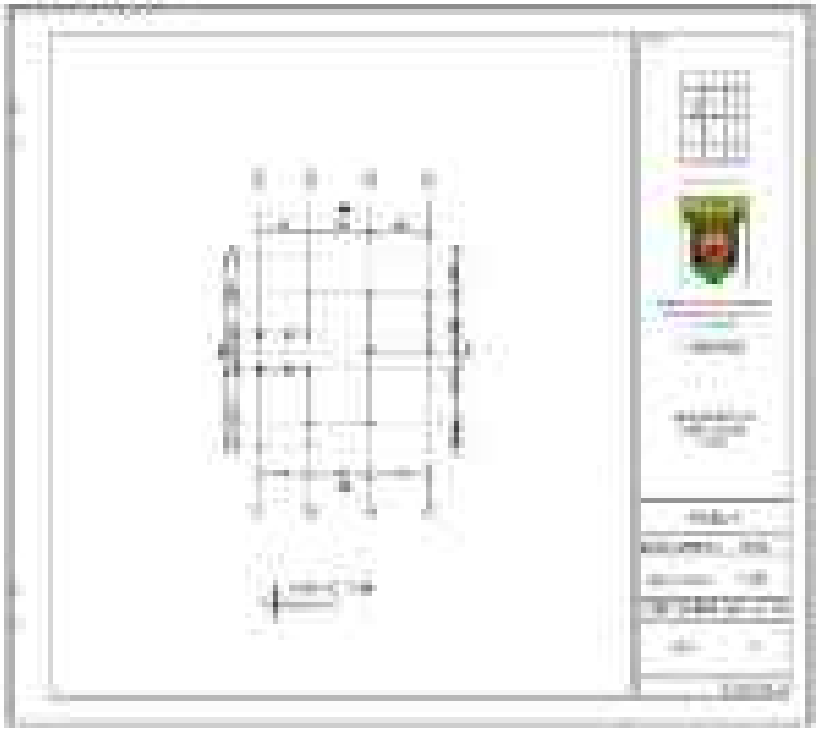

7. Dewar Stockton Stock

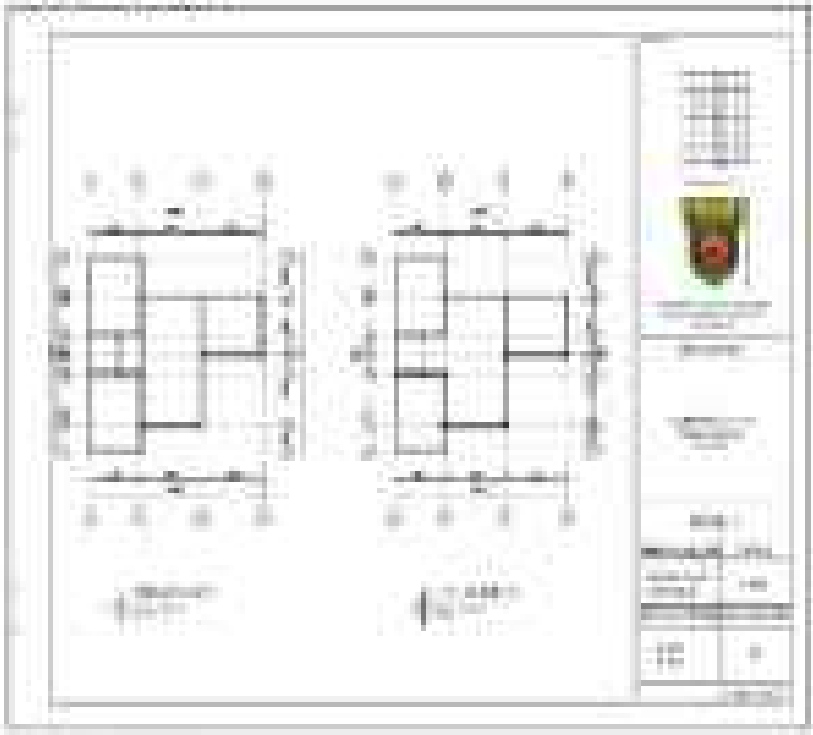

8. Lower Portage

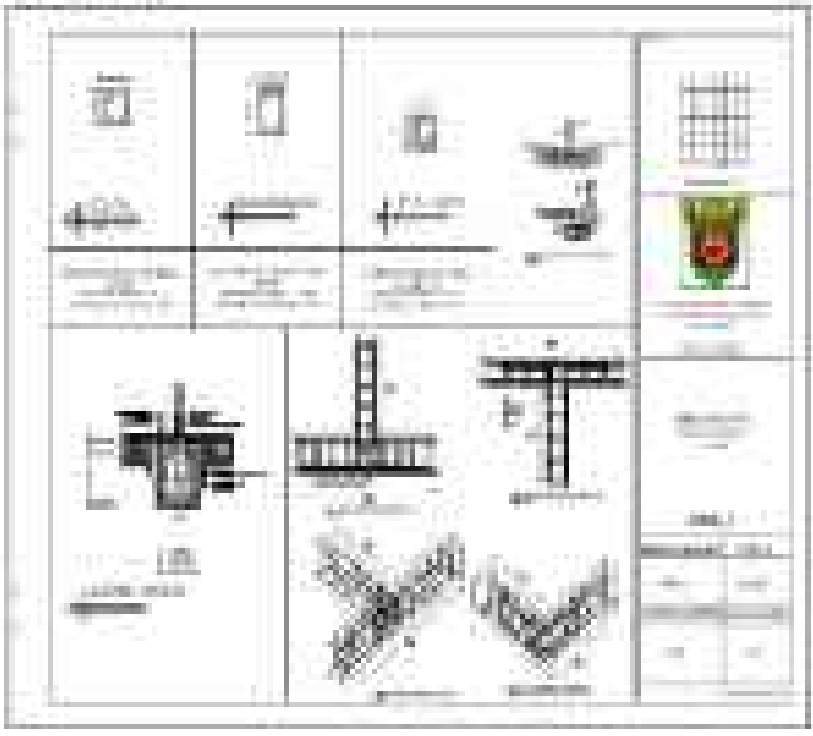

3. Orient Scale Code

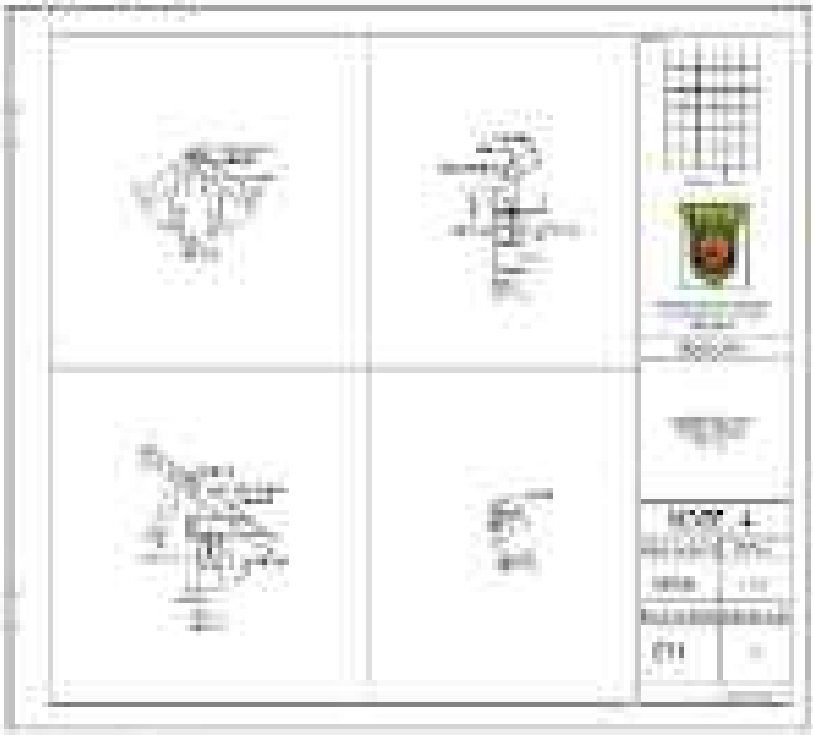

14. Center At Width

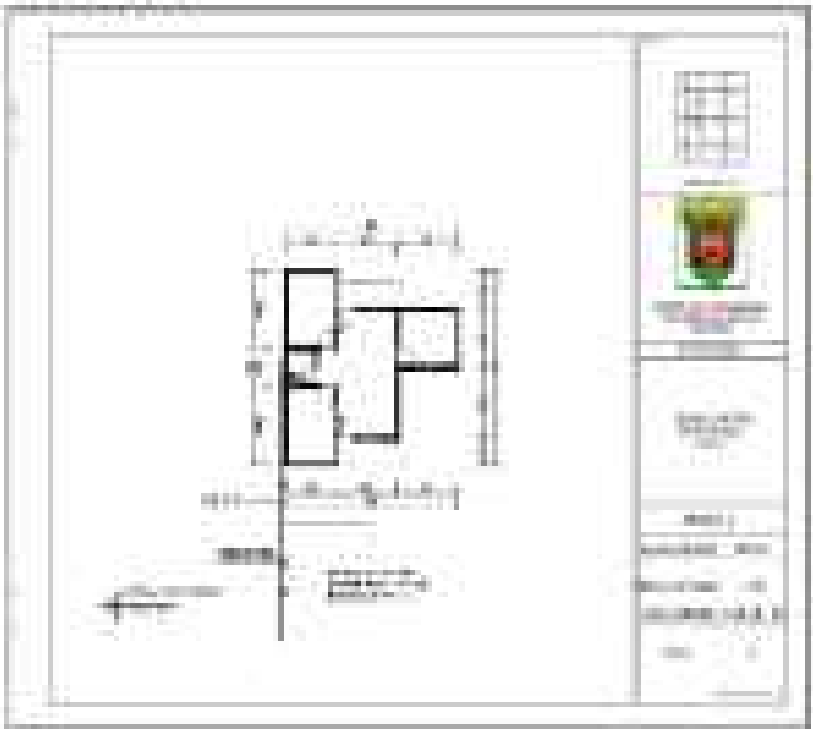

1. Detail Ki Eder del Kitzen

2. Detal kom

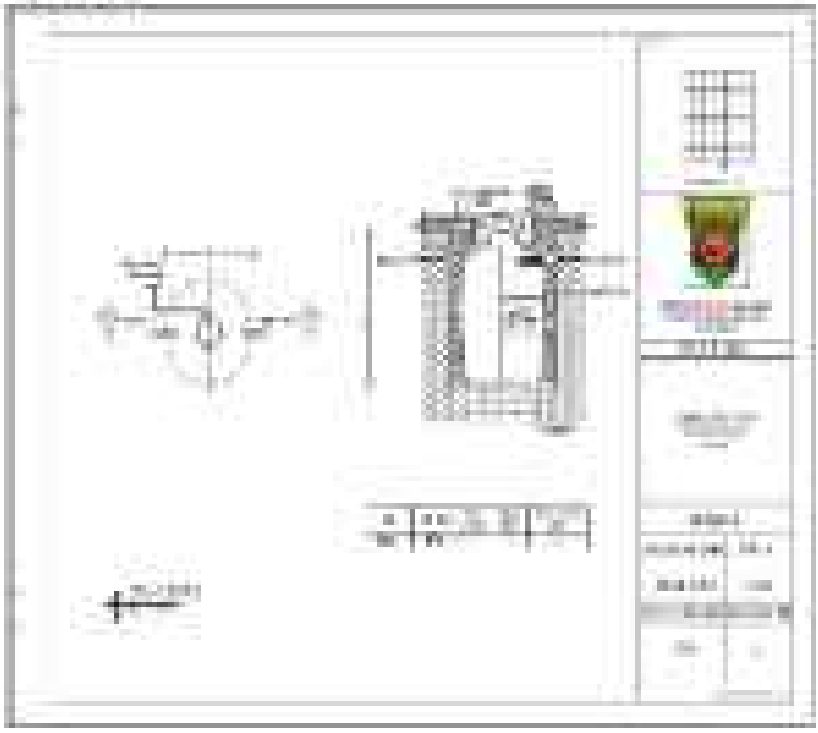

12. Denah Tiik Lampu dan Stopkontak

13. Wiring Diagram

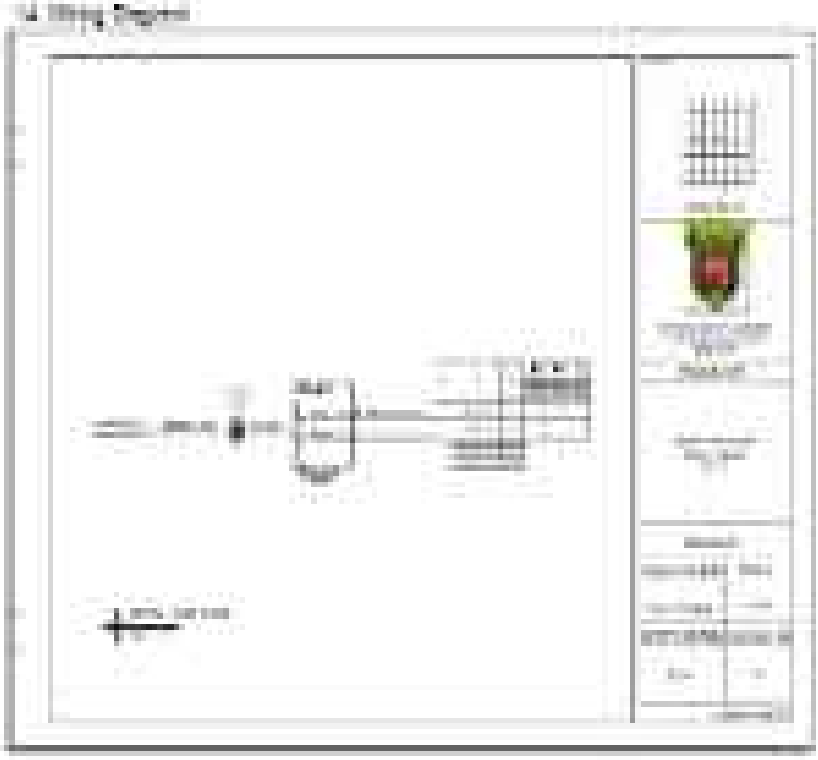

DENAH PROTOTIPE TIPE 45 MODEL 5

1. Denah dan Denah Atap

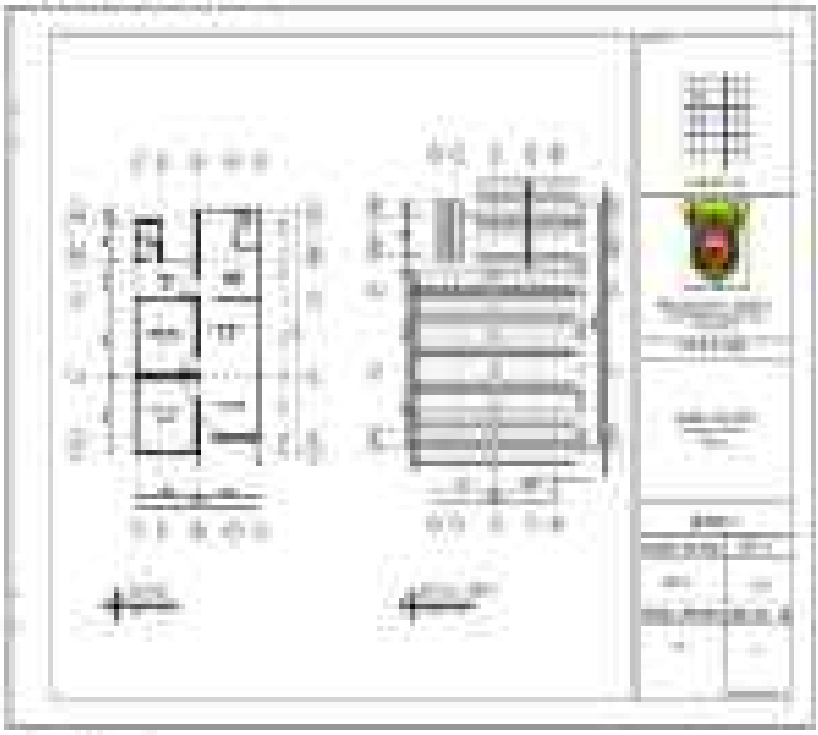

2. Potongan

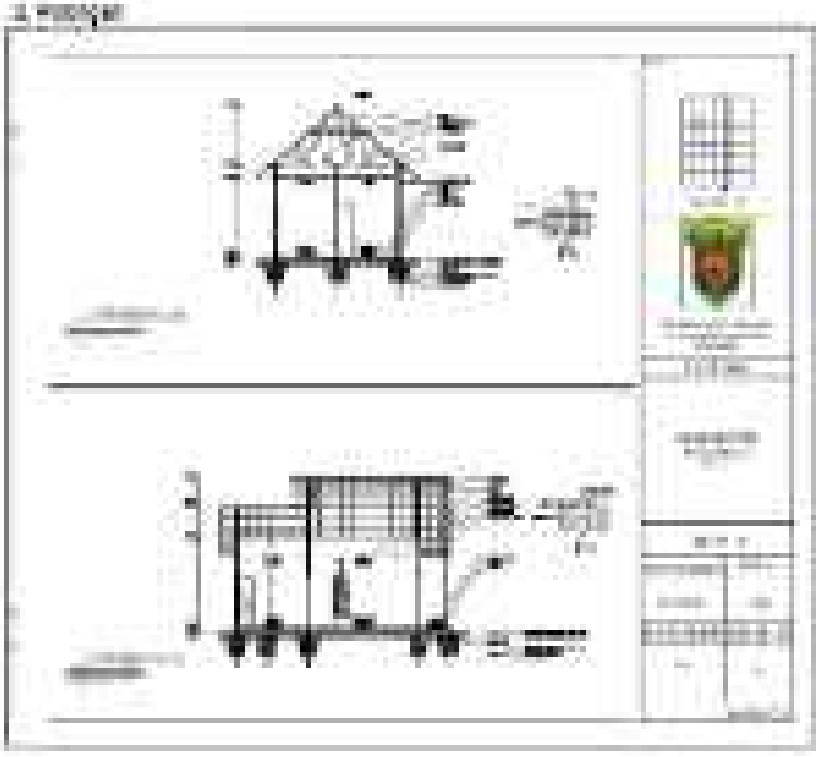

5. Terrace

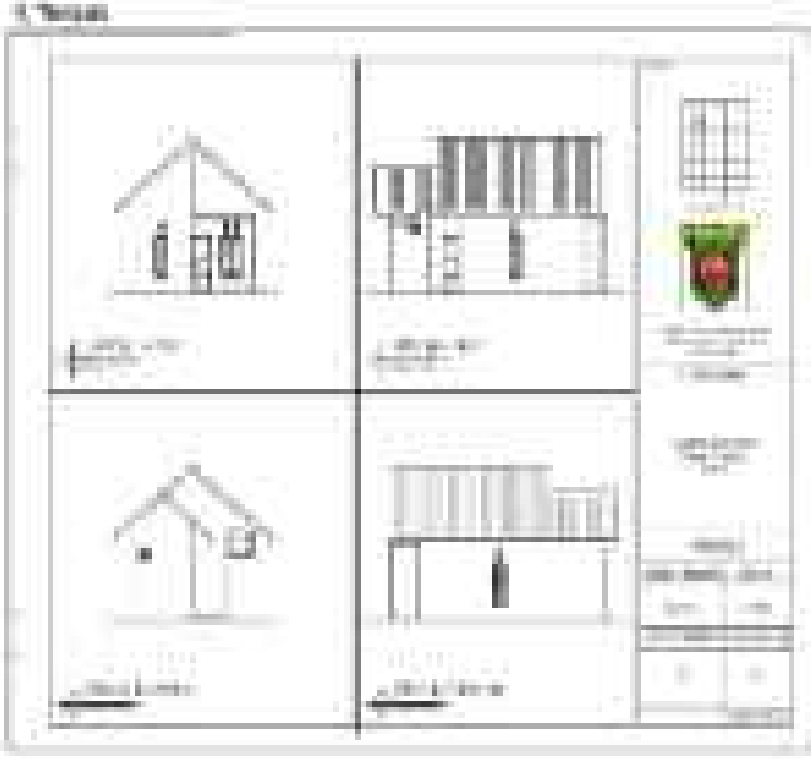

4. Detail Gutter

K Details Periodic

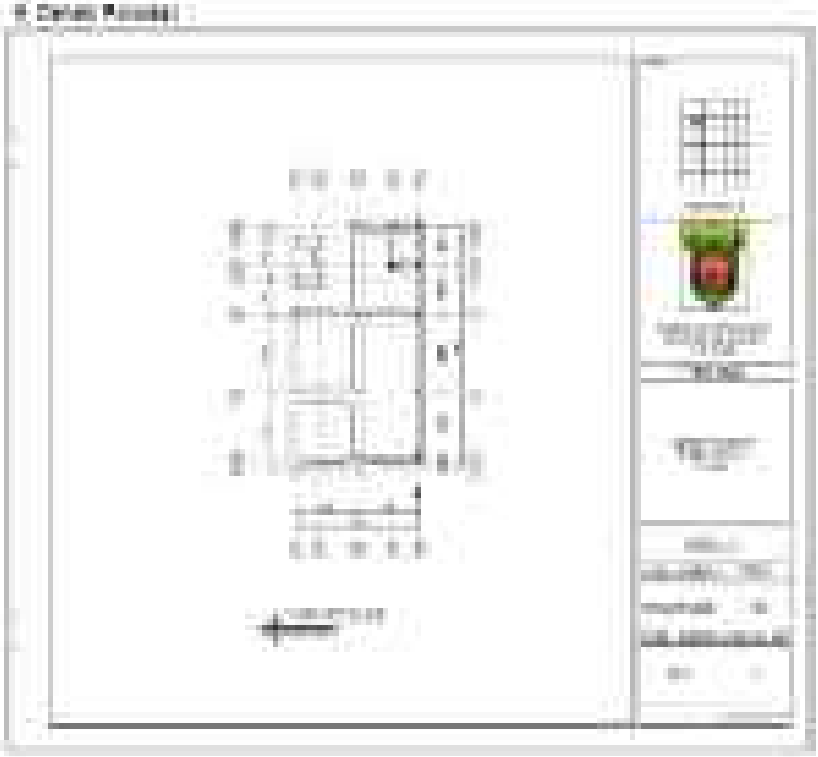

L Details Acces

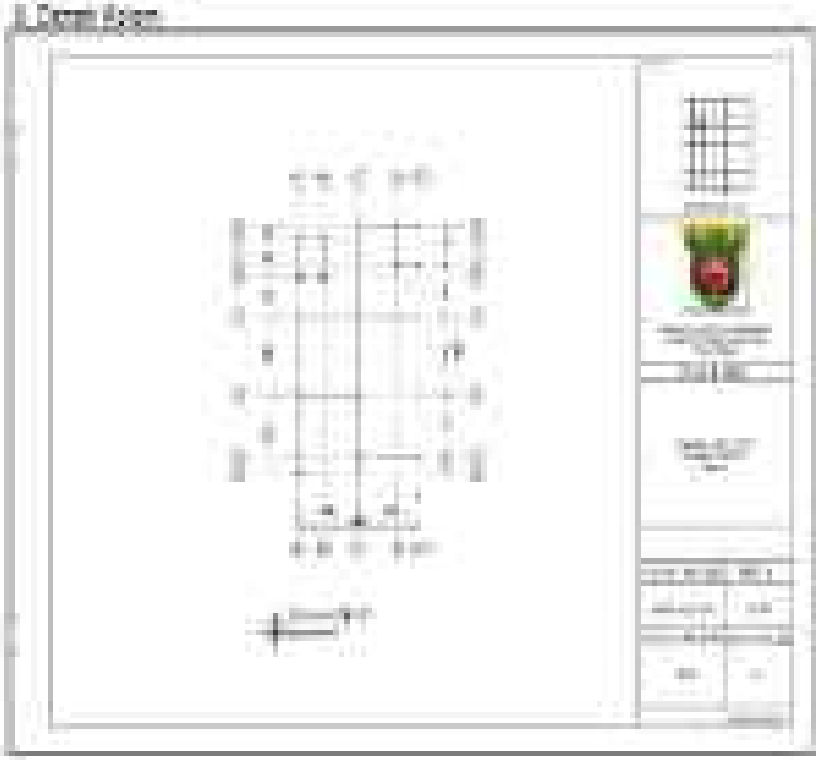

7. Detail Stairhouse Block

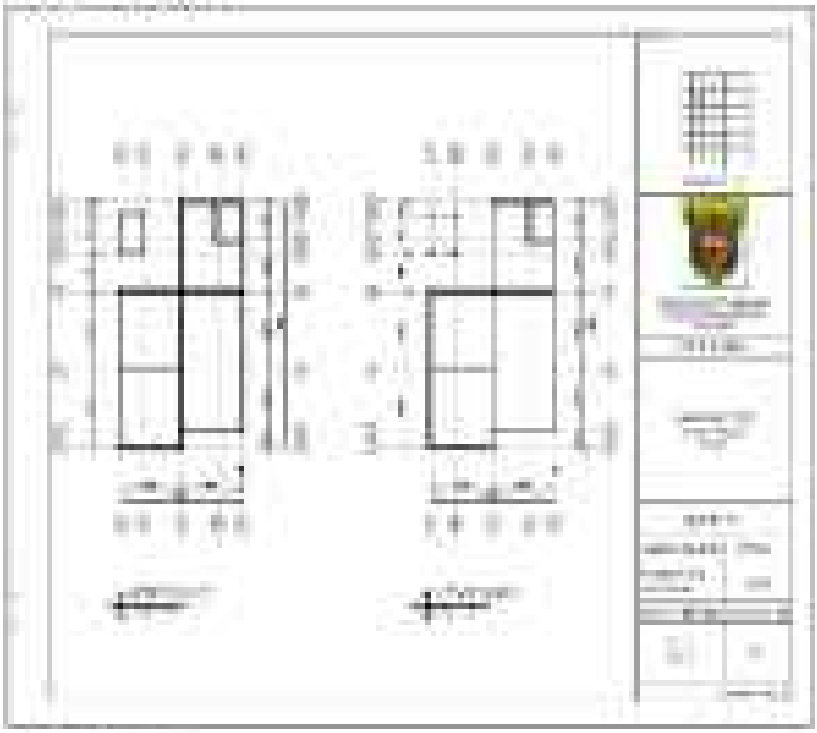

8. Detail Facades

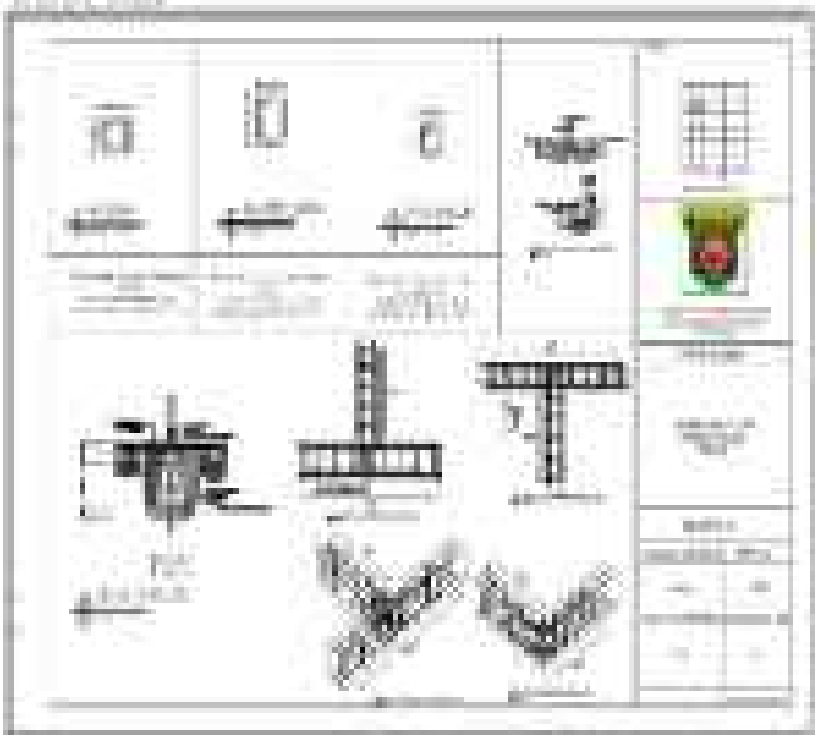

5. Orient Solar Cells

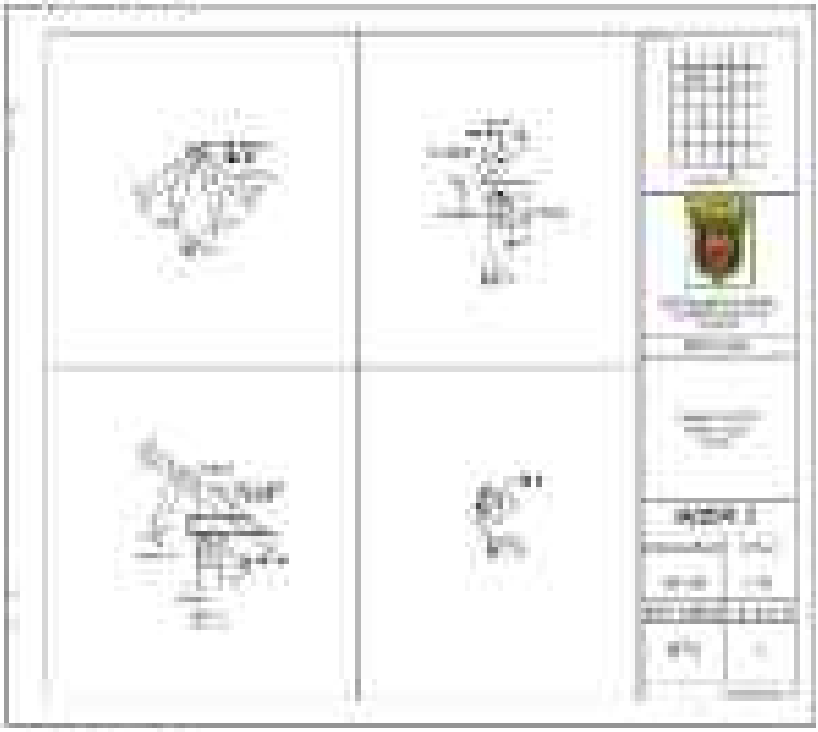

6. Design the Result

1. Denah Ruang Kolam dan Kitchen

2. Detail Kolam

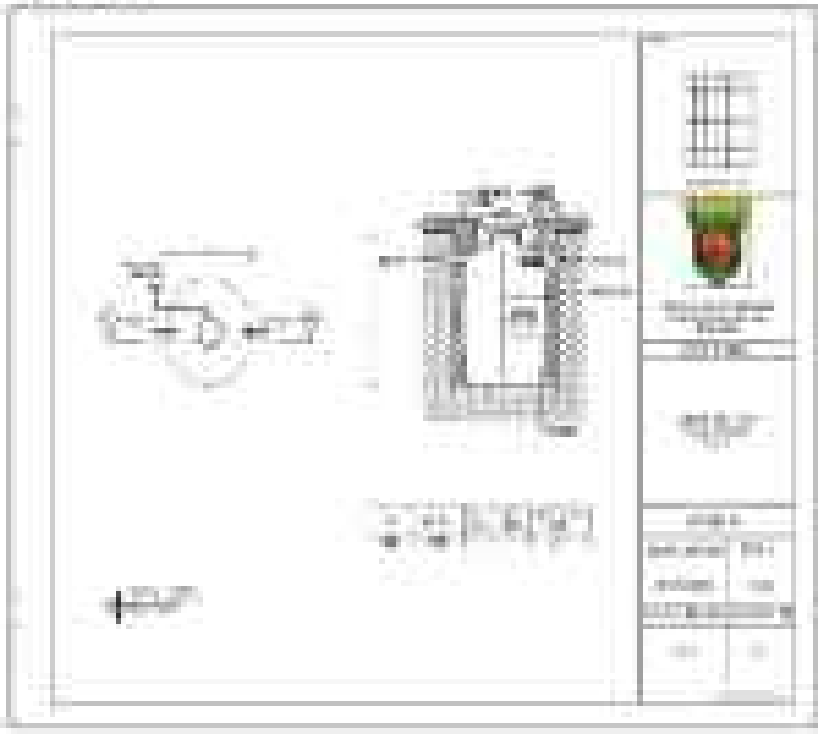

12. Detail 784 Lampu dan Stopkontak

13. Wiring Diagram

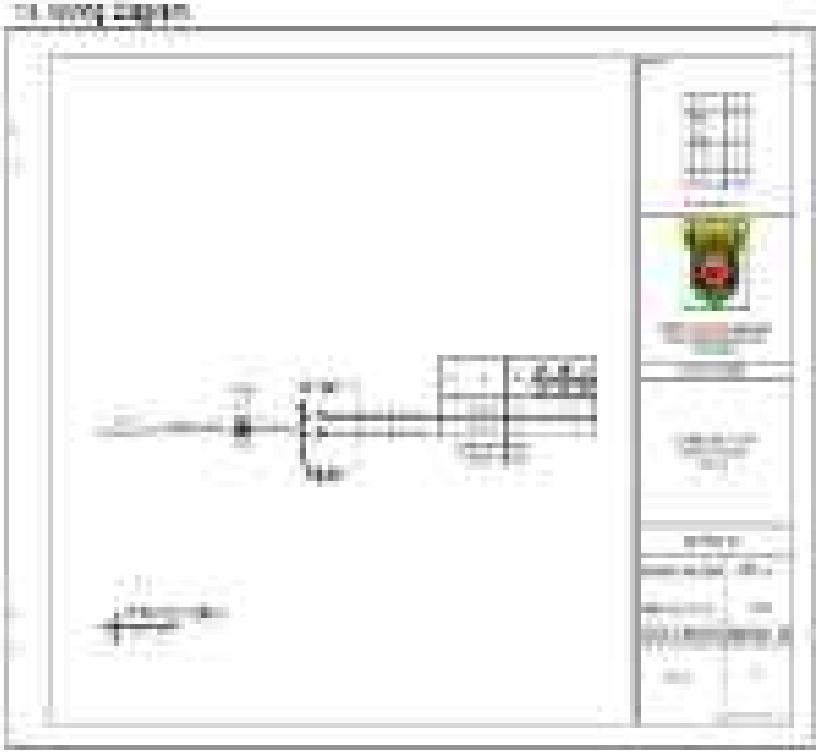

Dendo Prototipe Tipe : 34 Model 1

1. [illegible]

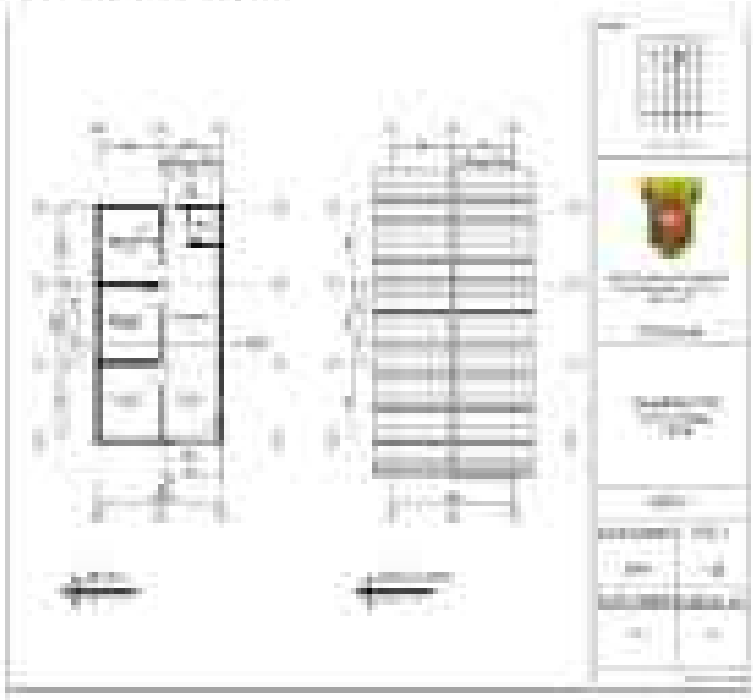

2. Detail

1.Denah Pondasi

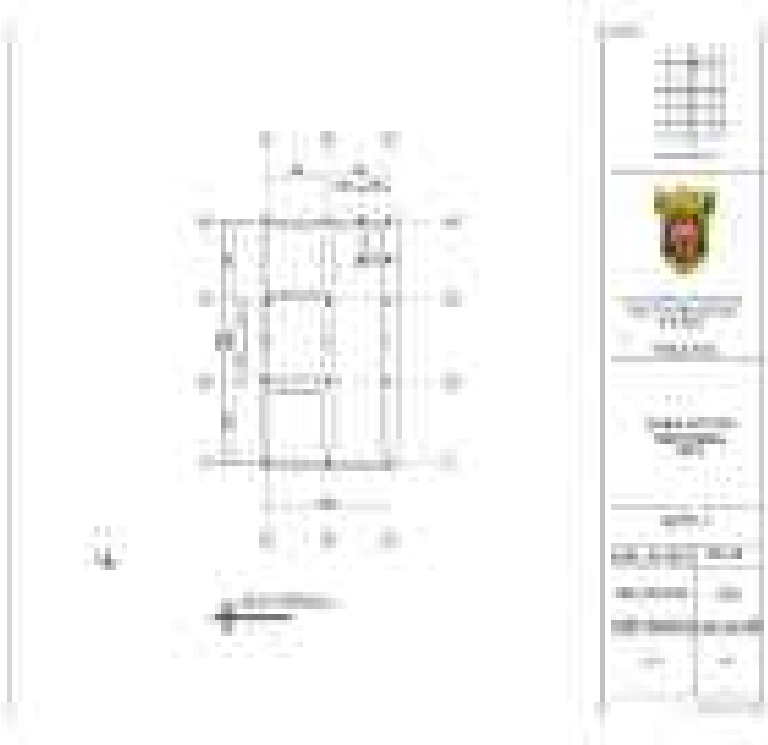

4.Detail Kolom

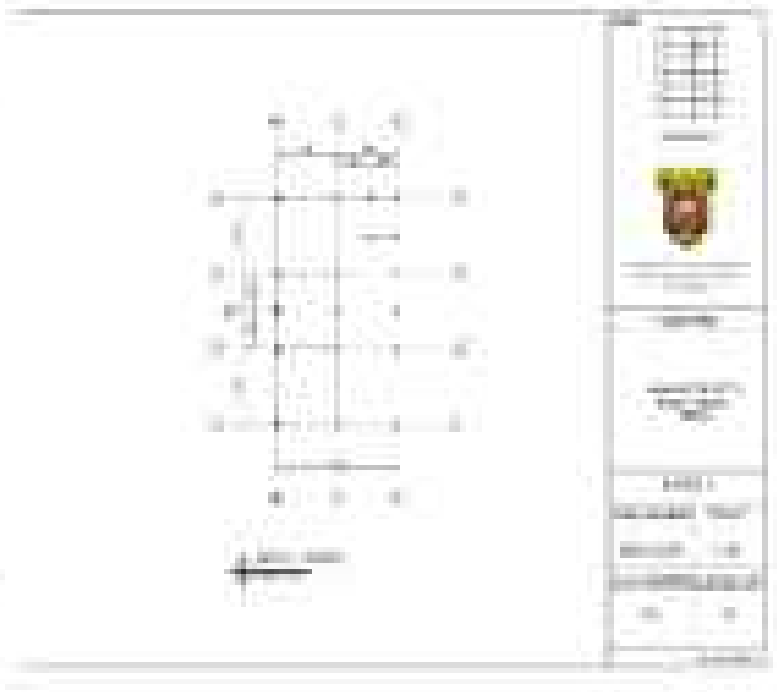

1.Dever section-east

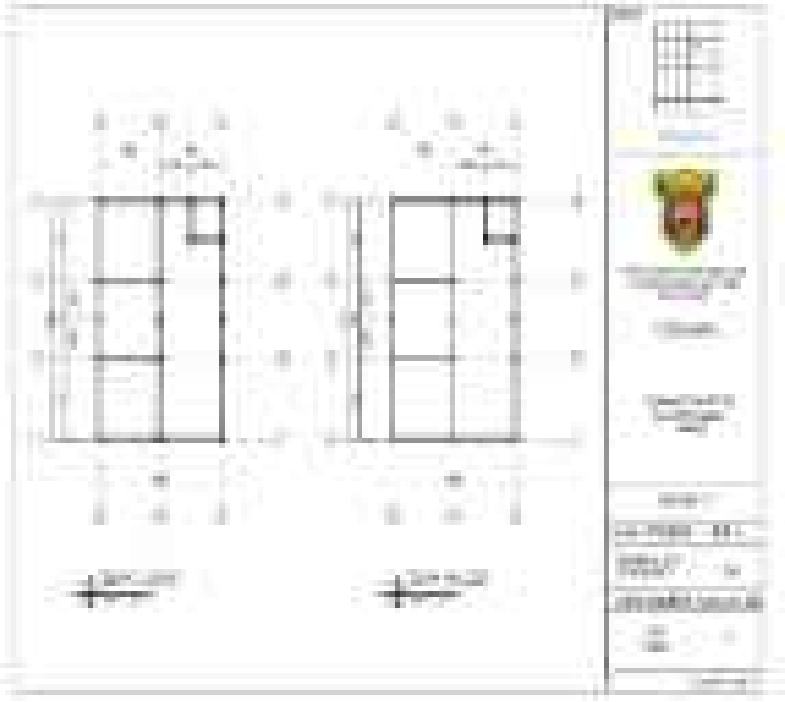

1.Dever section

[illegible]

[illegible]

3.Design

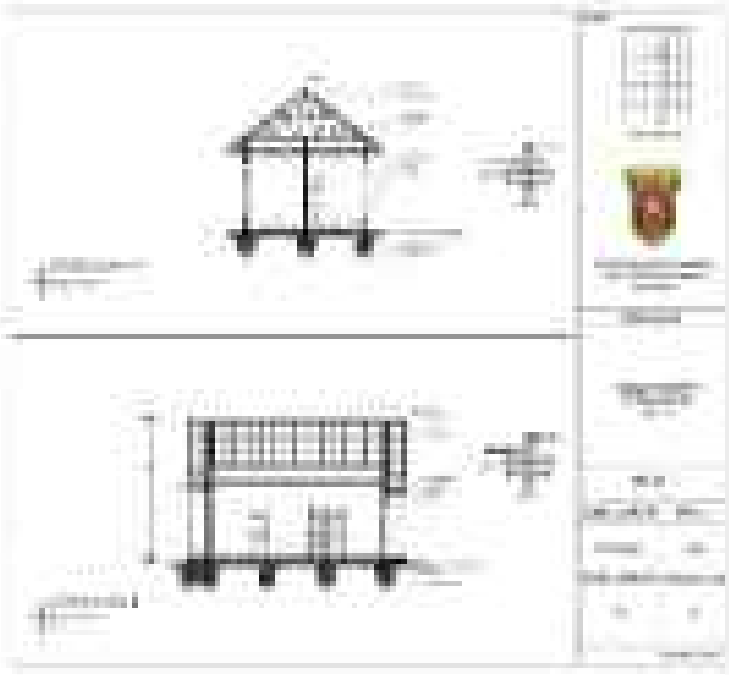

4.Detail Reading and Ring Lift Jaw Jaws

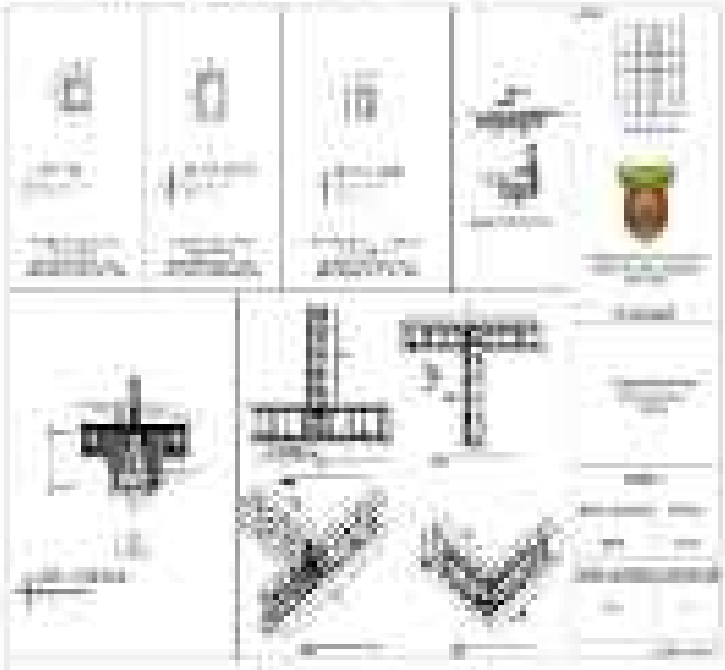

11 Detail beams

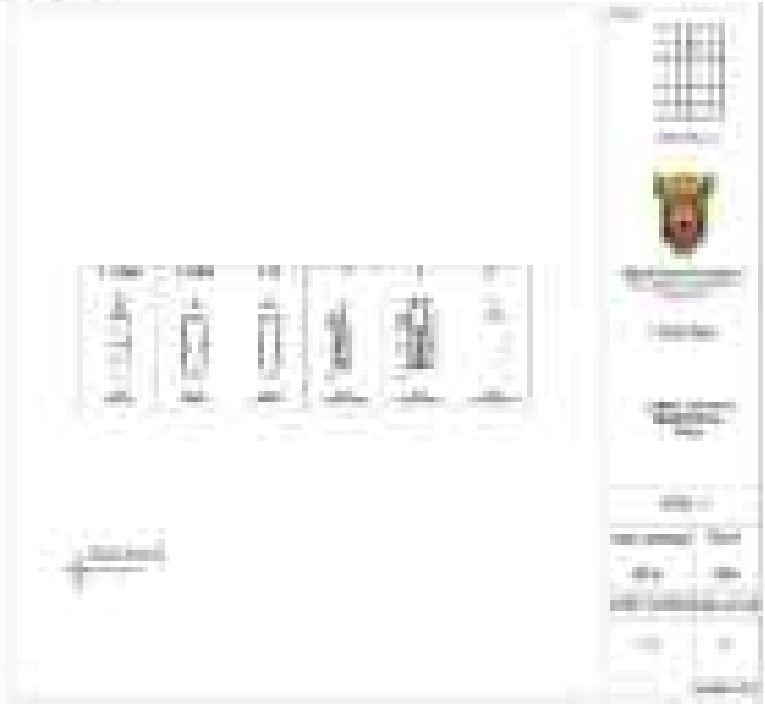

12 Detail cell

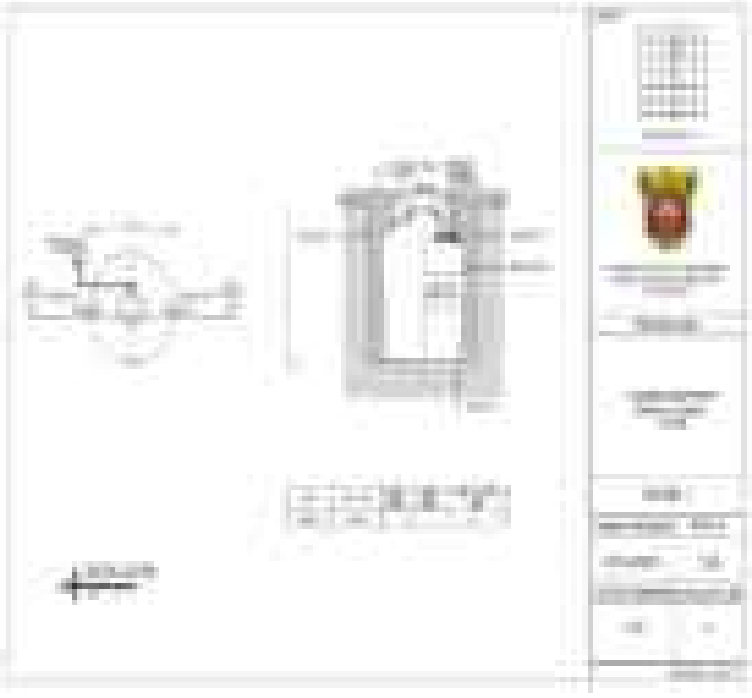

13 Detail Gate Gate

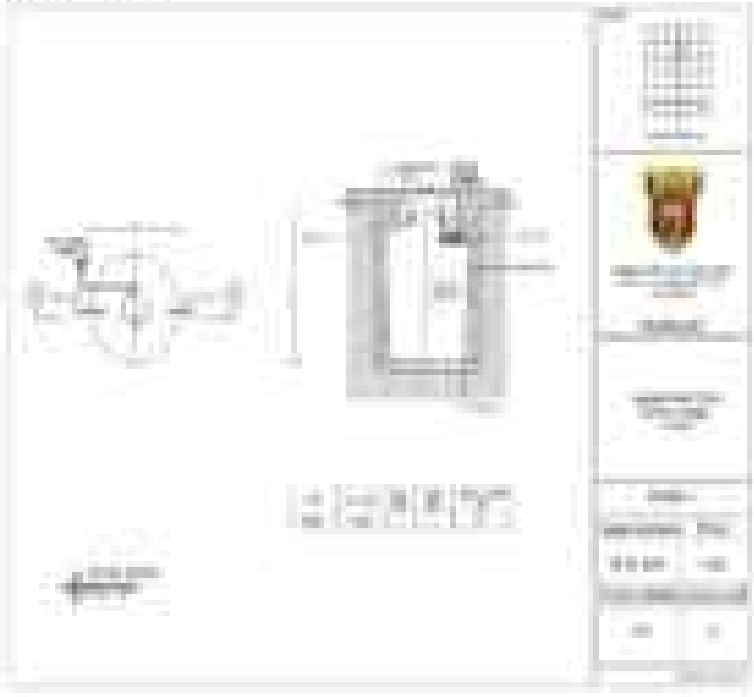

14 Wiring diagram

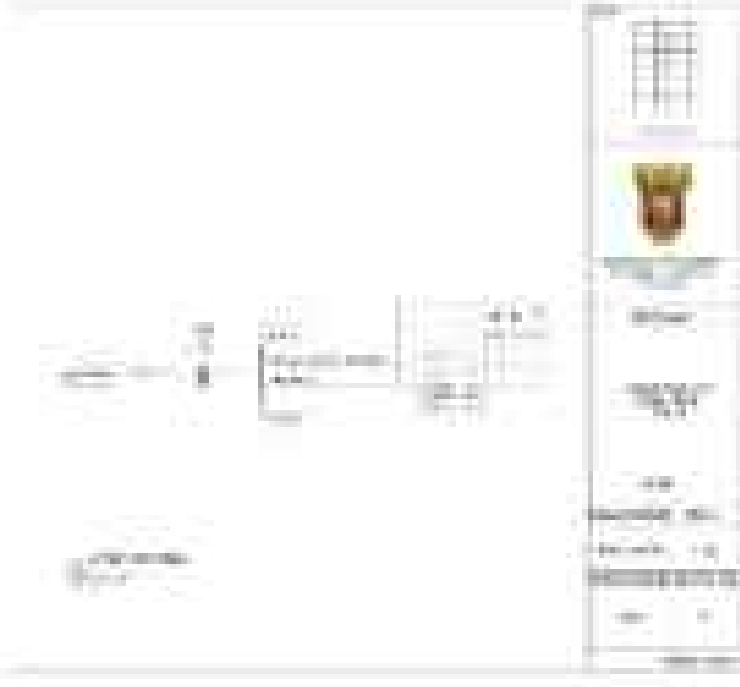

Detail Prototipe Tipe - 54 Model 2

1 Denah Rumah con Denah Atap

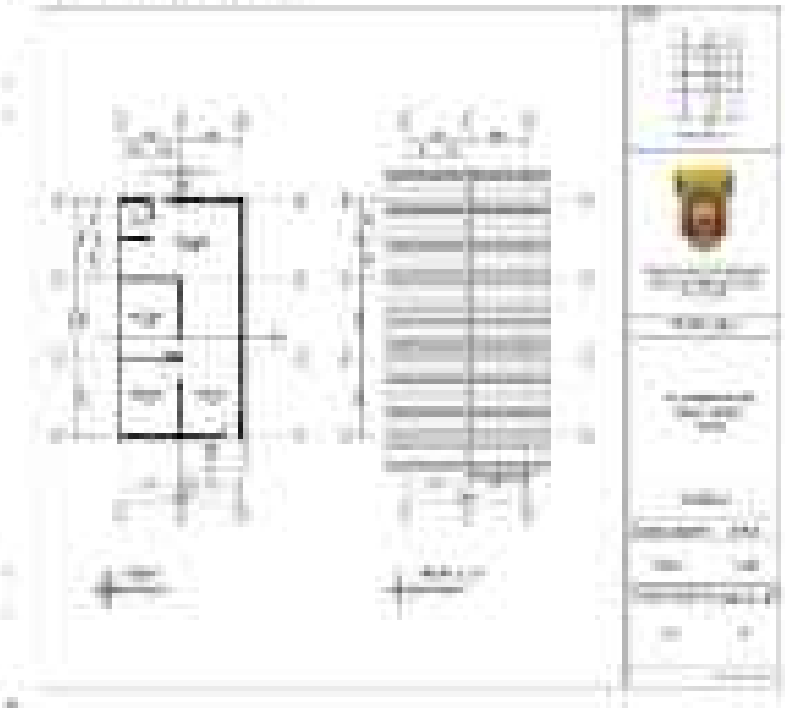

2 Tampak

3.Green Fencing

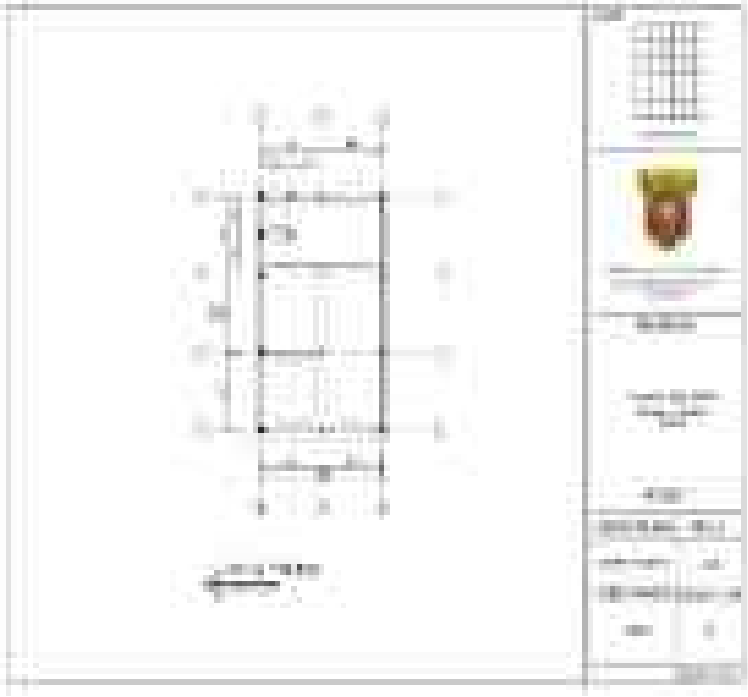

4.Green Gate

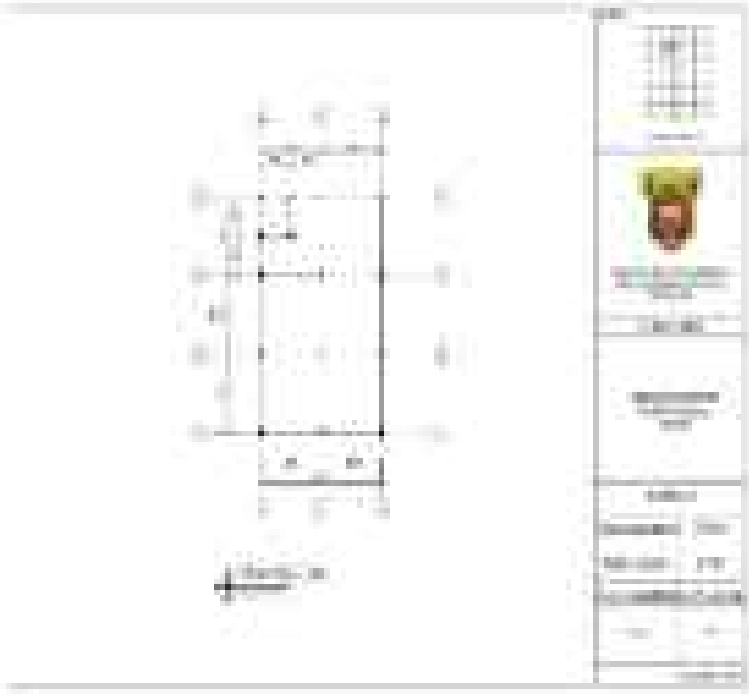

3 Dinner shelf one book

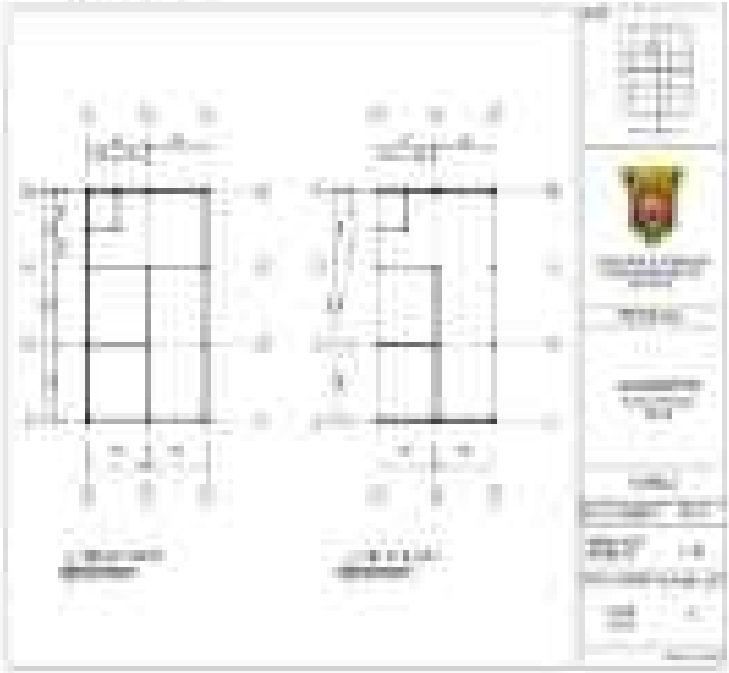

4 Dinner or one book

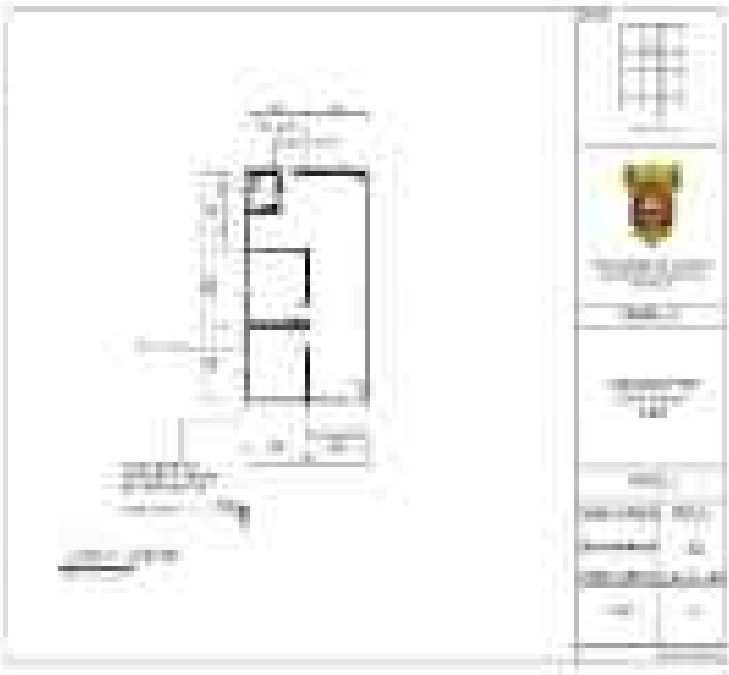

7. Detail an kolo

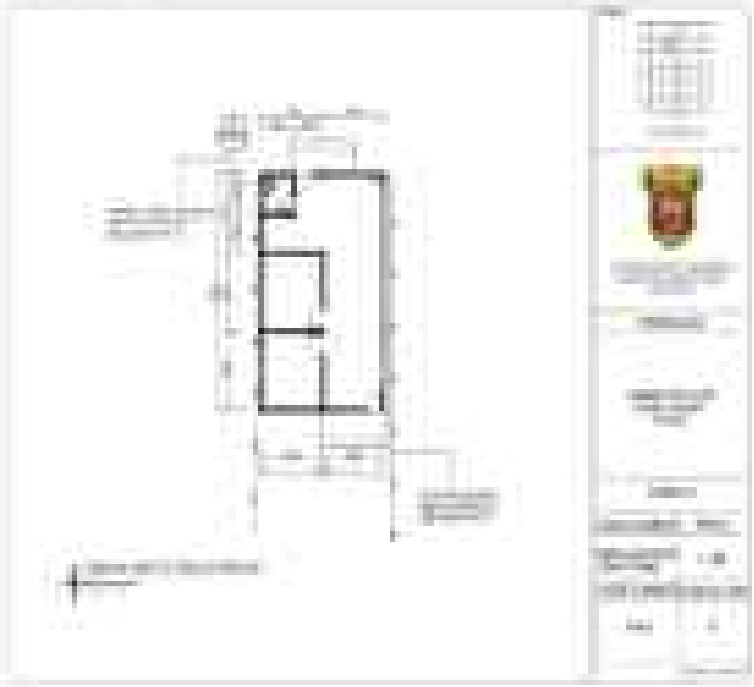

8. Detail Dreiecks-Kassette

1.Pergola

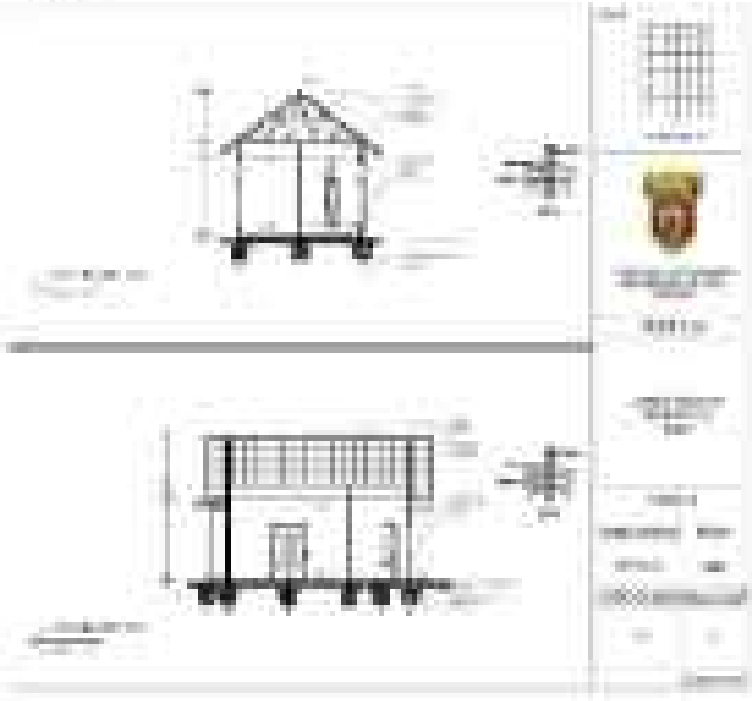

1.1.Deck/Pergola and Roof detailed below

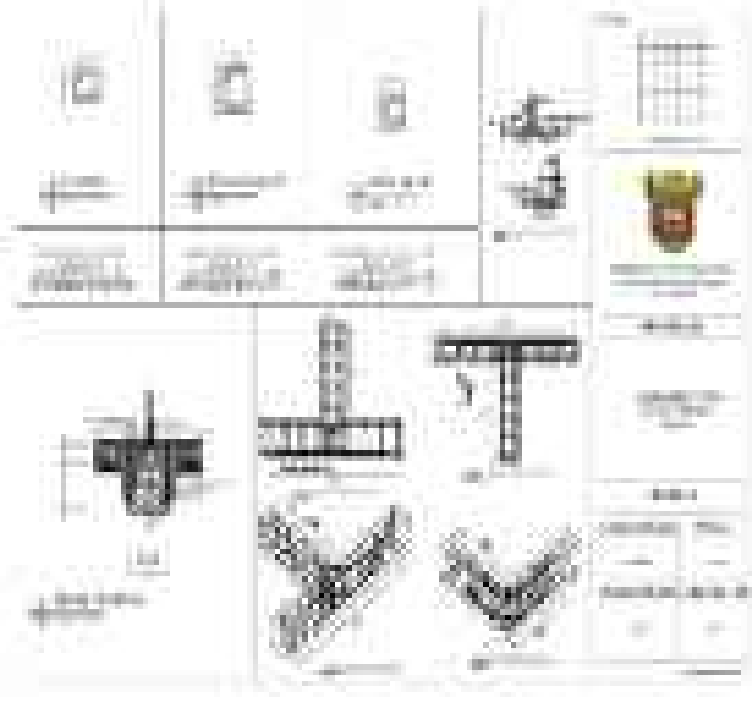

11 Detail beam:

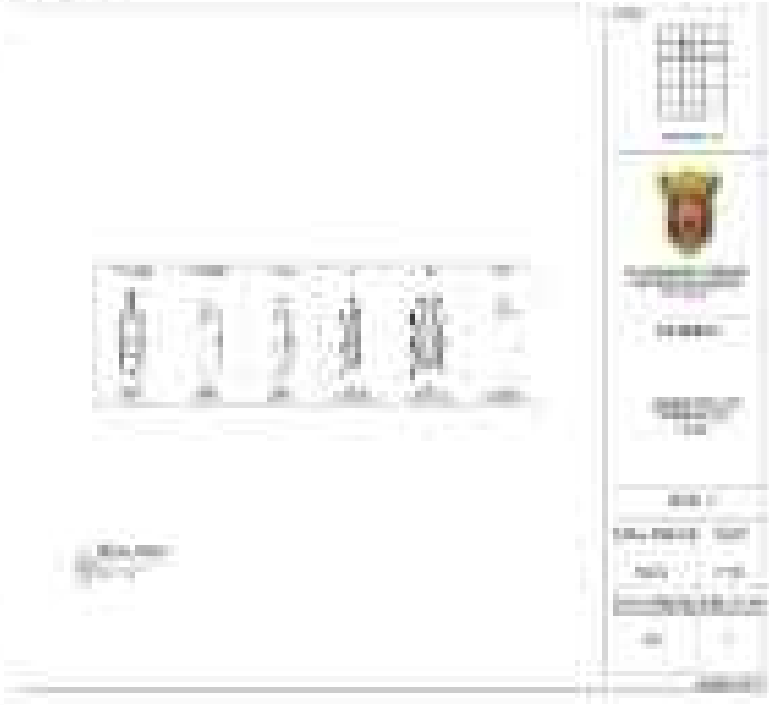

12 Detail cell:

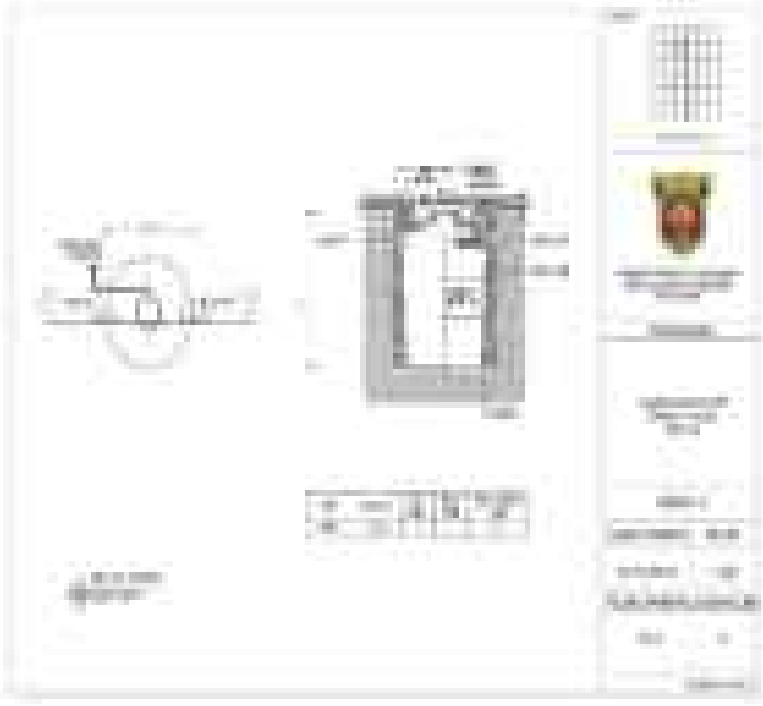

12.Detail Gate Plate

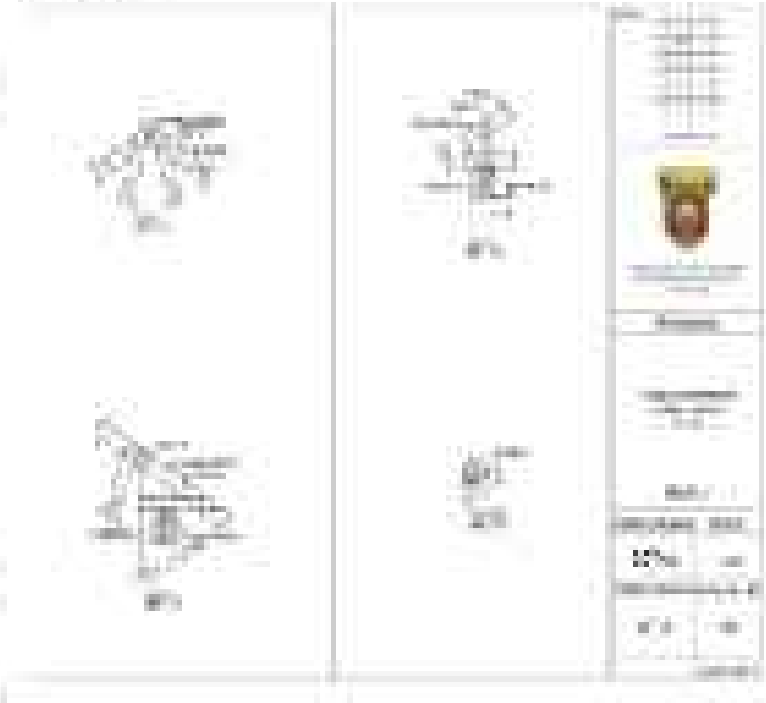

14.Wing Gate Iron

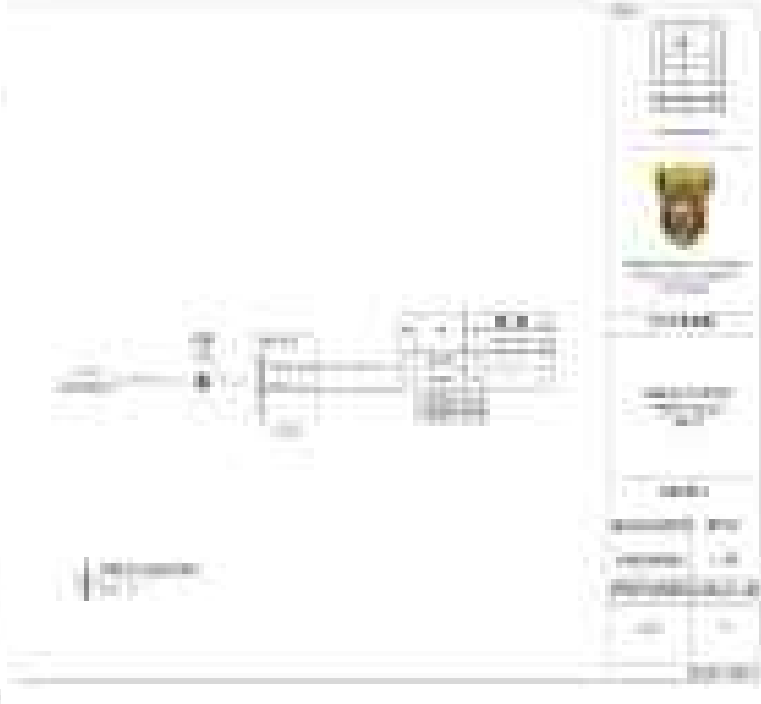

Detail Prototipe Tipe - 34 Model 3

1 Denah Rumah con Denah Atap

2 Tampak

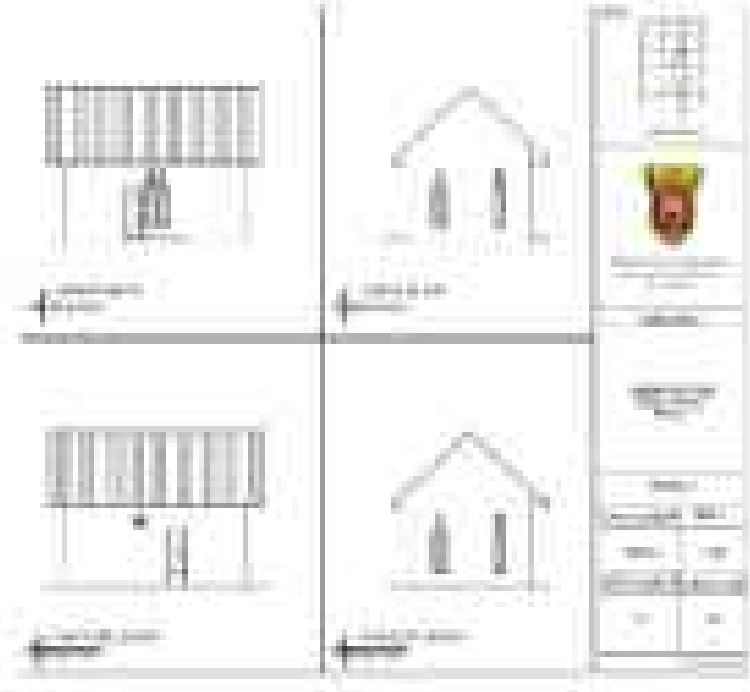

1 Dorset Rentals

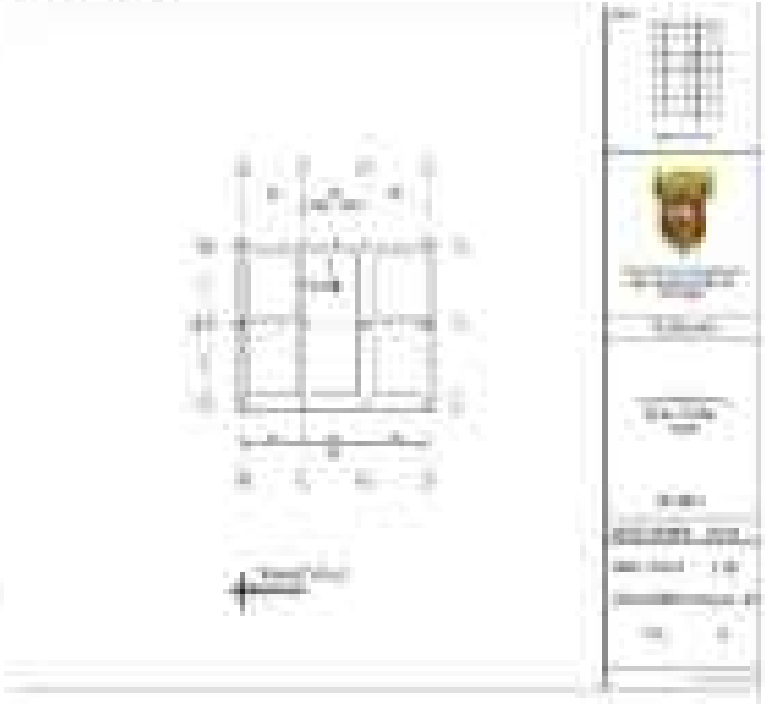

4 Dorset Gone

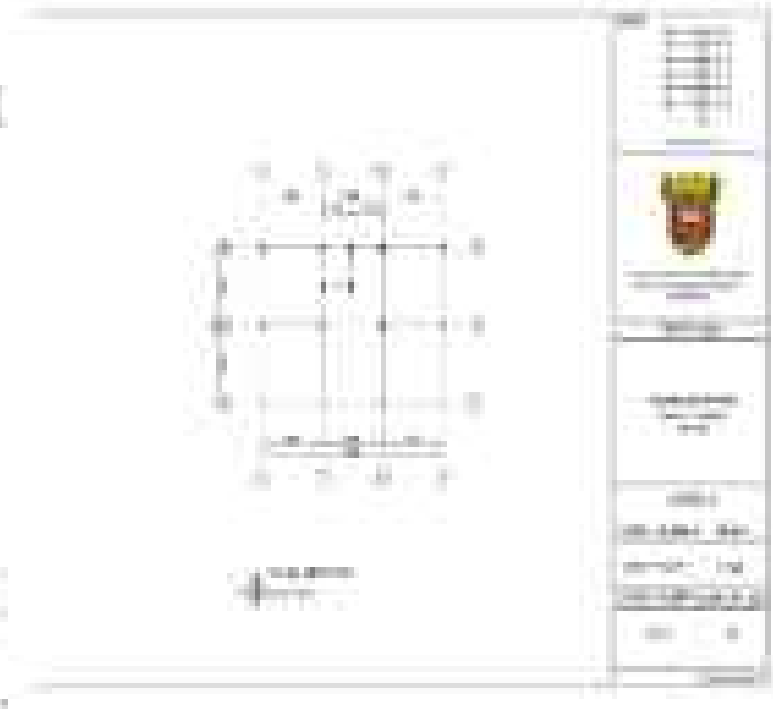

1 Dimensionnel des socles

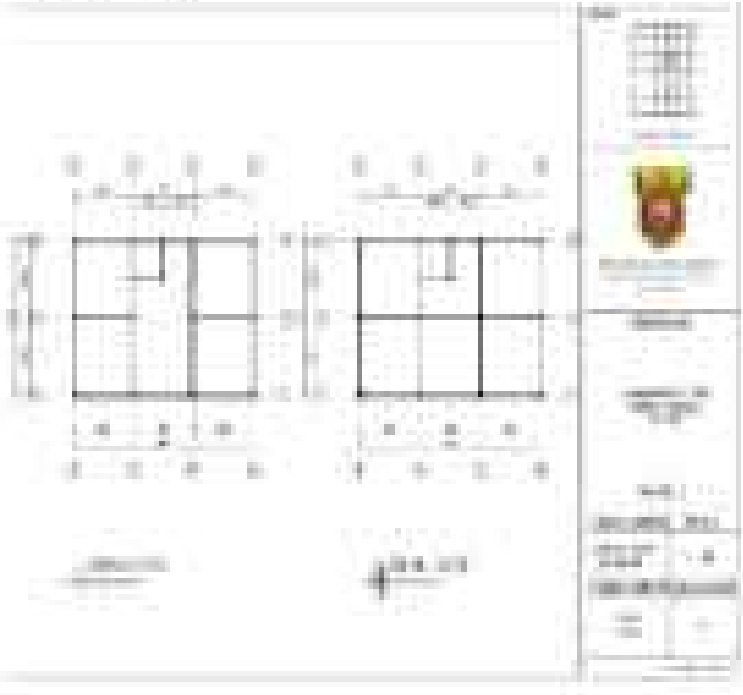

1 Dimensionnel des socles

7 Dhaka ki kaise

8 [illegible]

1.Pressor

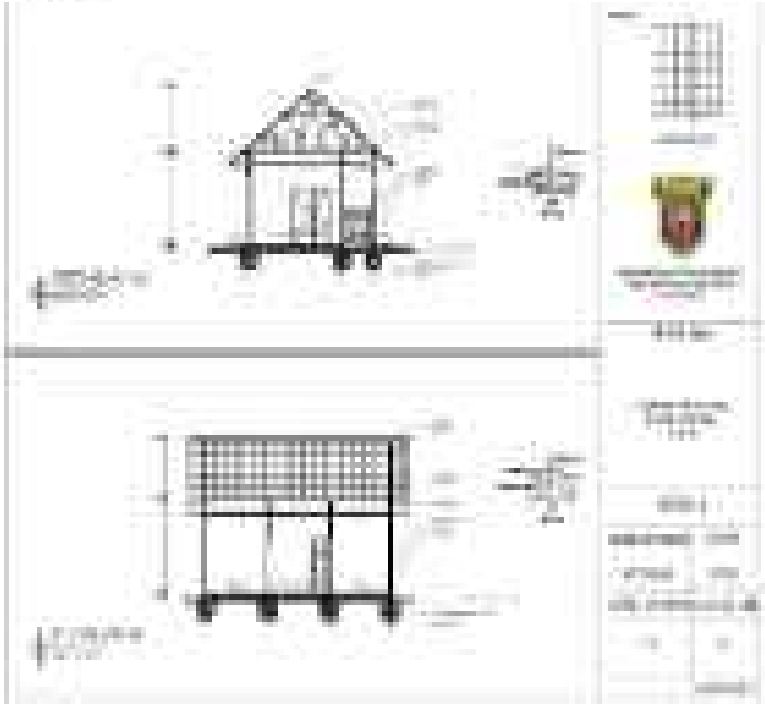

(1.Cast/Pressboard Ring defuser below

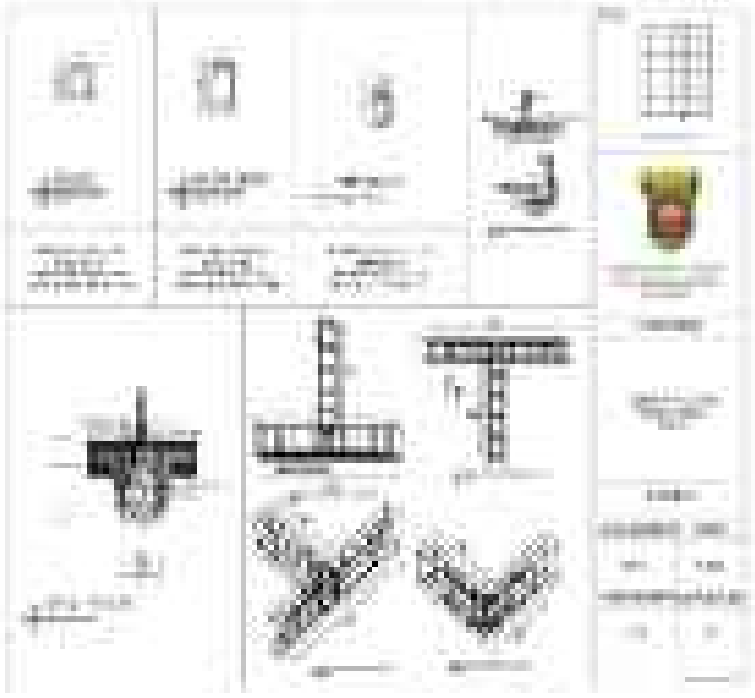

11 Detail beam:

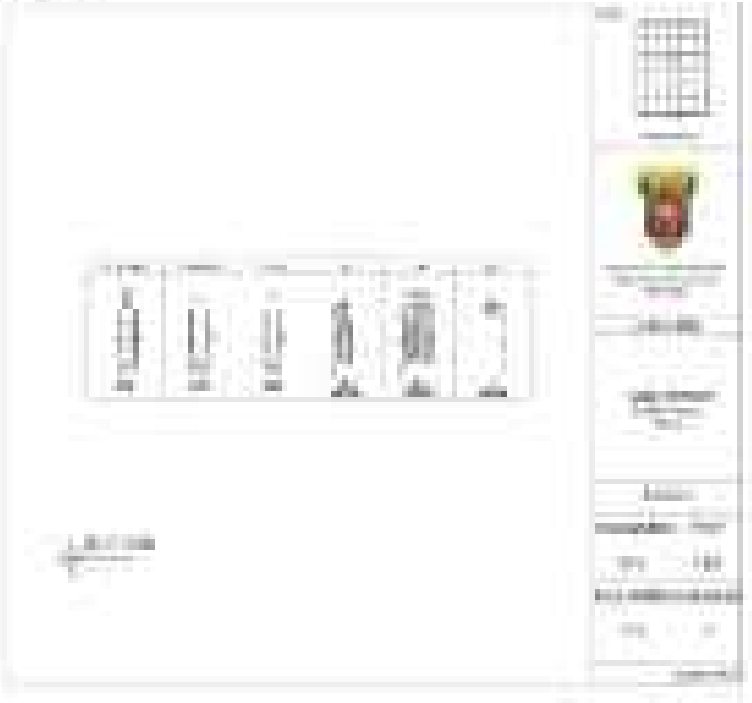

12 Detail cell:

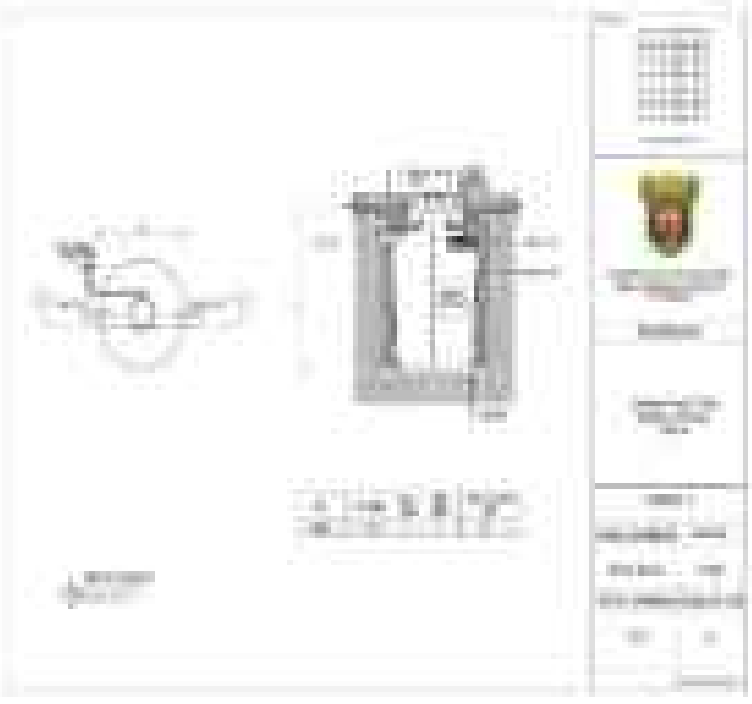

13 Dyed Gate Food

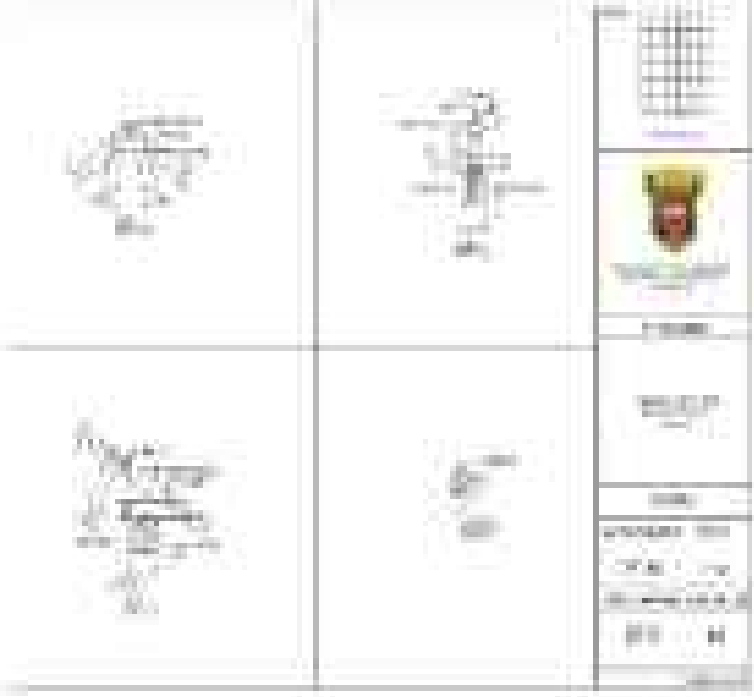

14 Drink Dagger

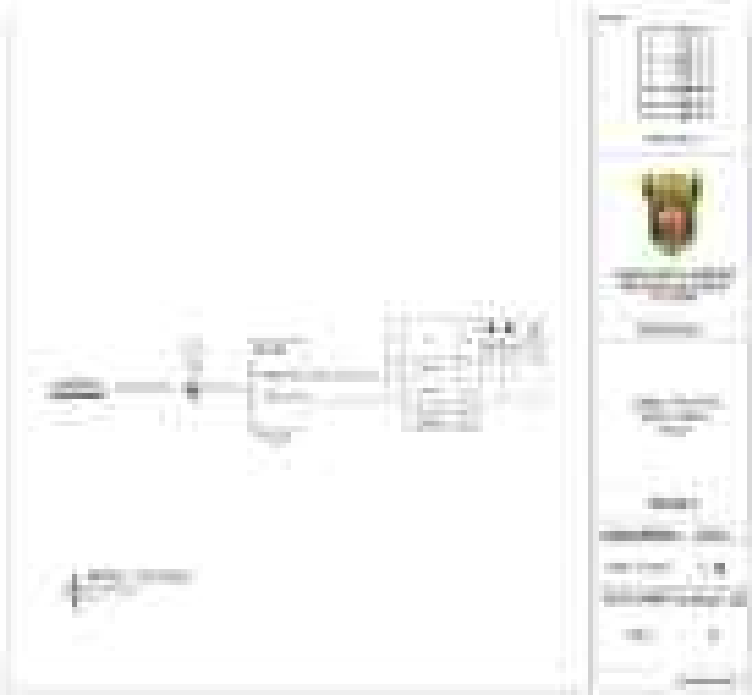

Detalle Prototipo Tipo - 34 Modal-4

1 Denen Numerico Denen Nes

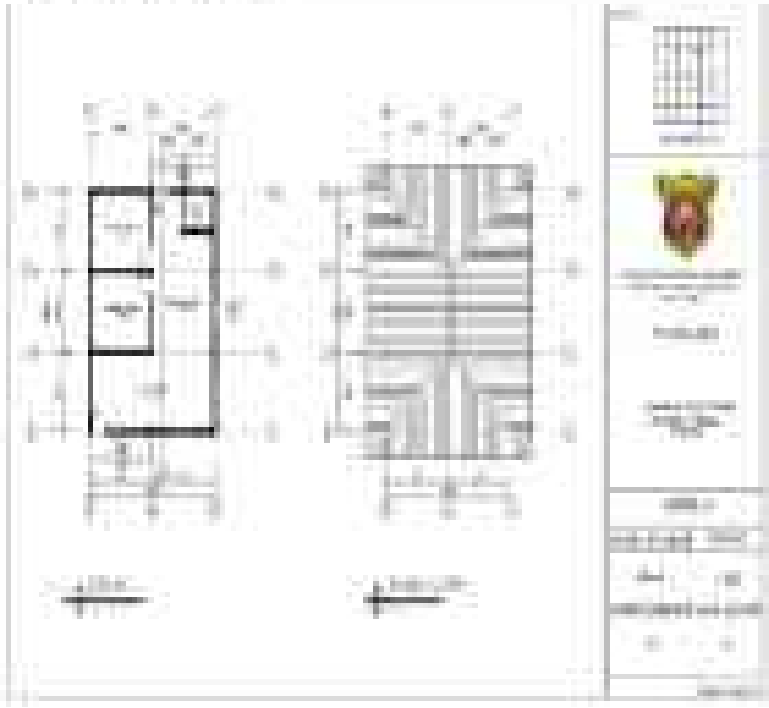

2 Denen

3.Dorset Rentals

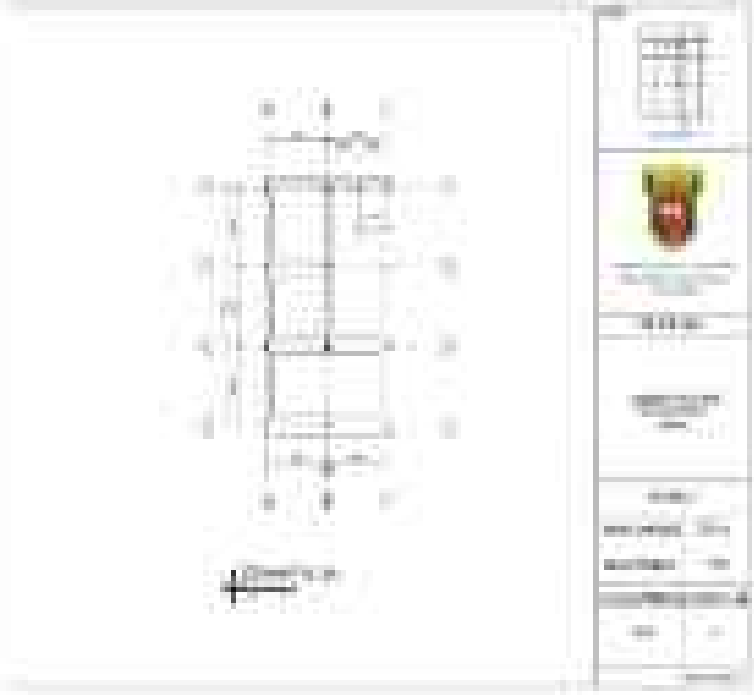

4.Dorset Gaze

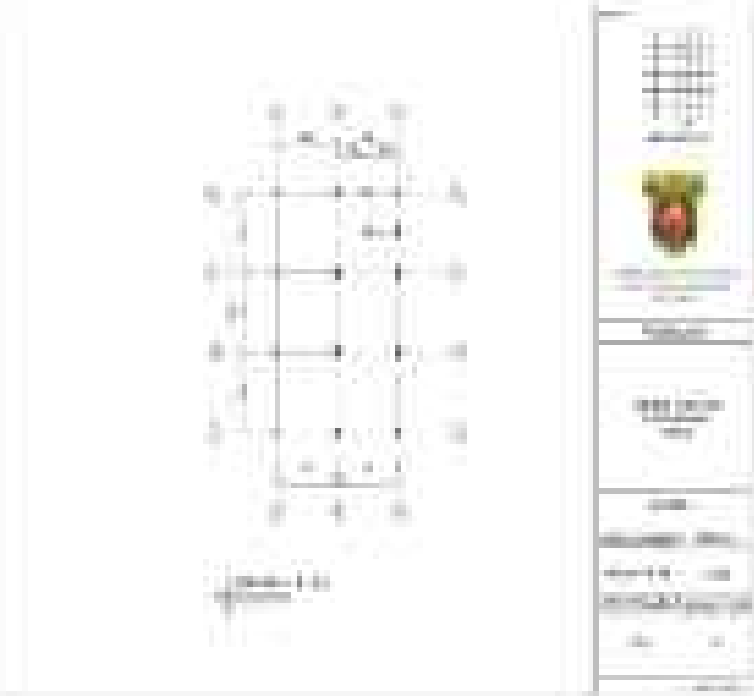

5 Dense shelter tents

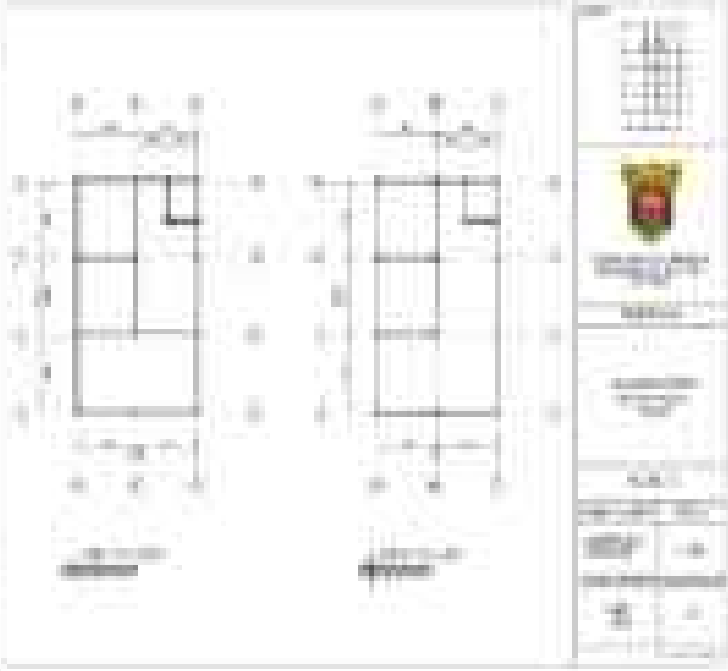

6 Dense or semi

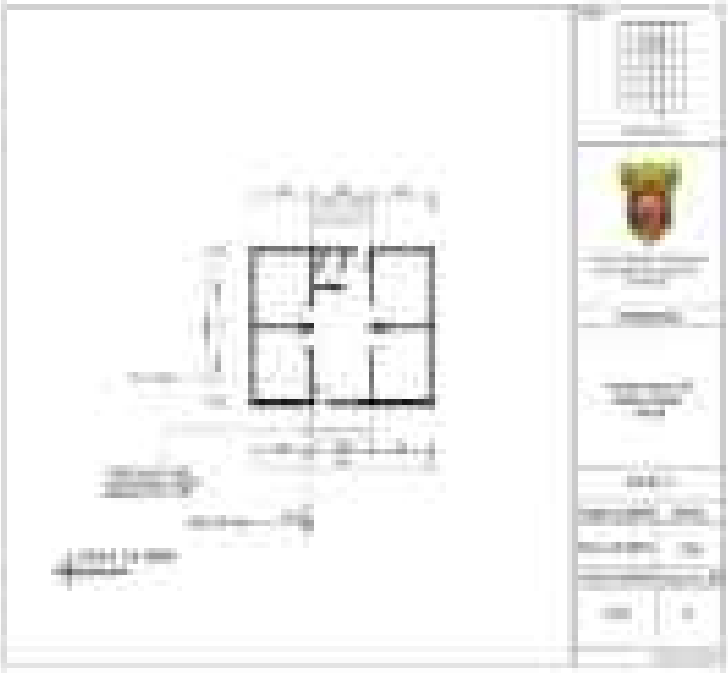

7 Detailed plan

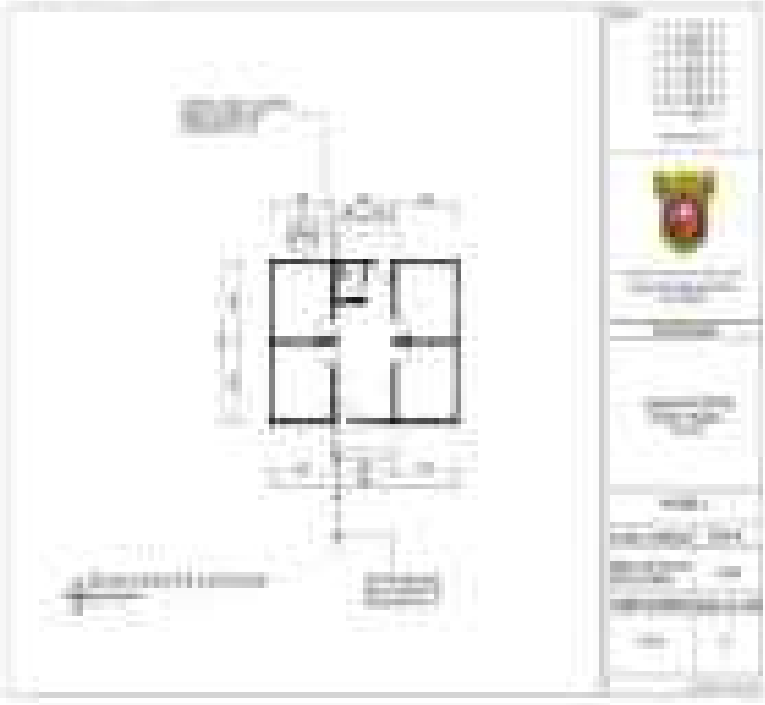

12 Level 10 and 11 floorplan

1.Pineapple

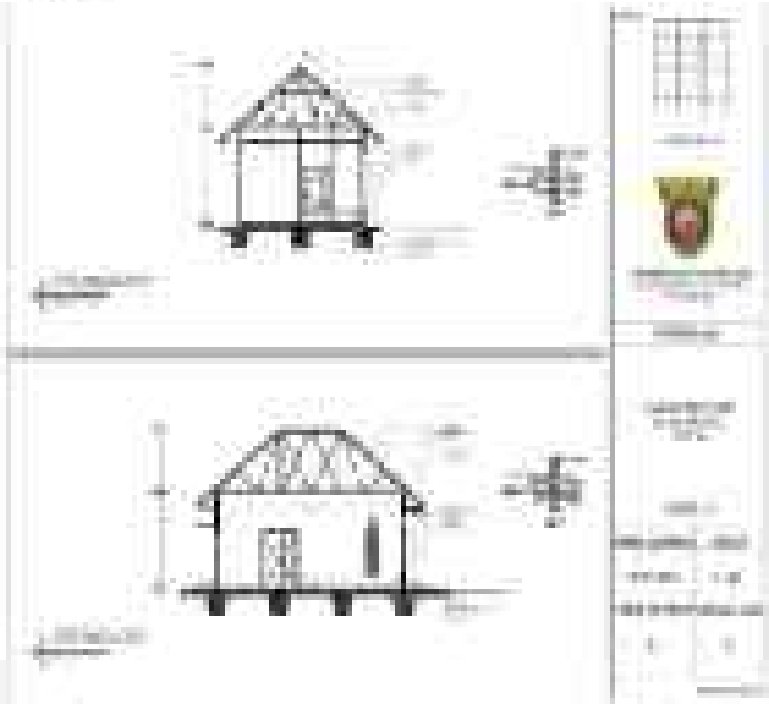

1.1.Detail Pineapple roof Ring beds,Wall section

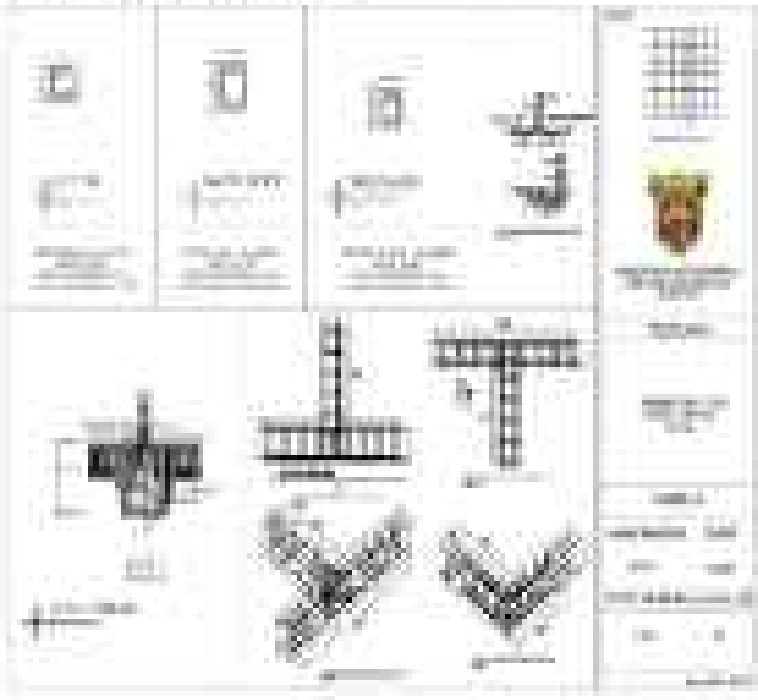

11 Detail beams

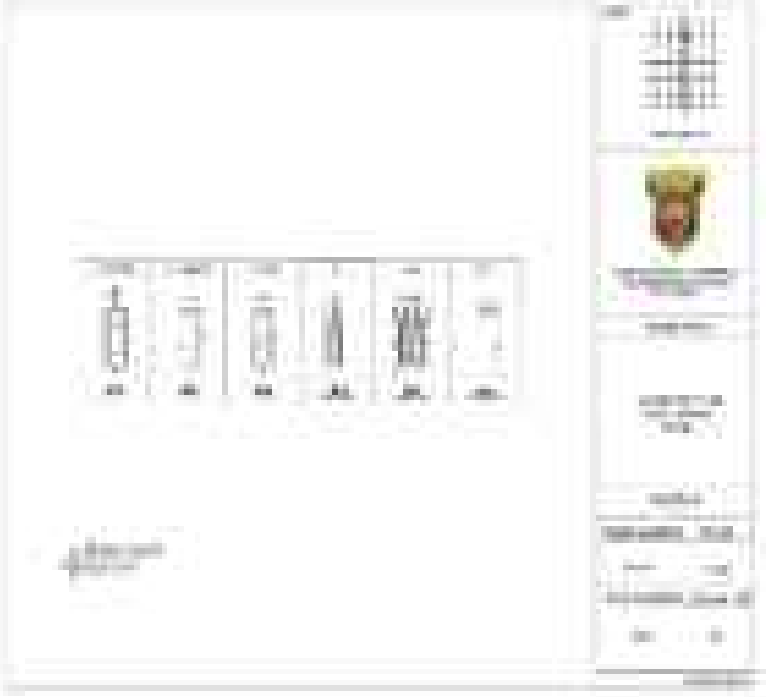

12 Detail soffit

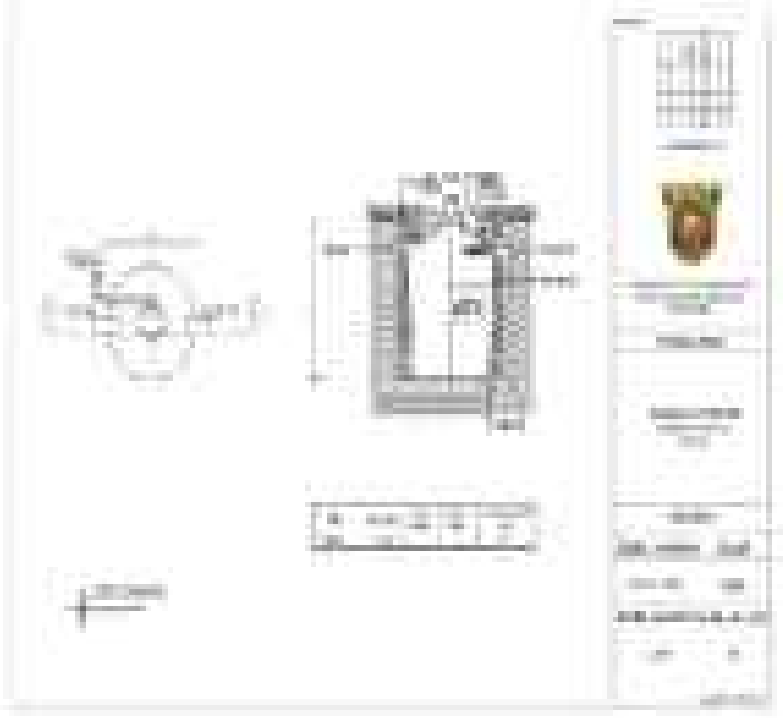

| Schedule of exercise |

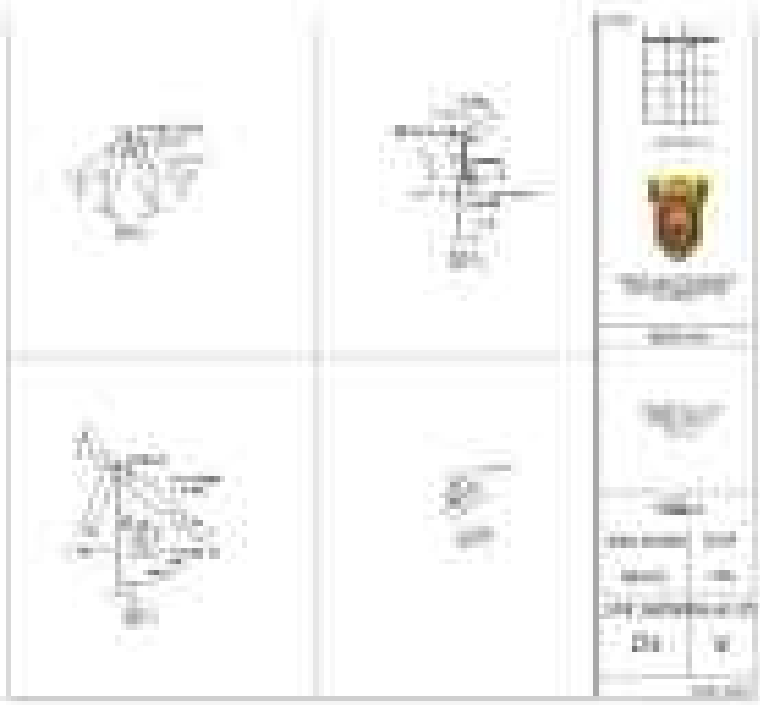

| Lifting weights |

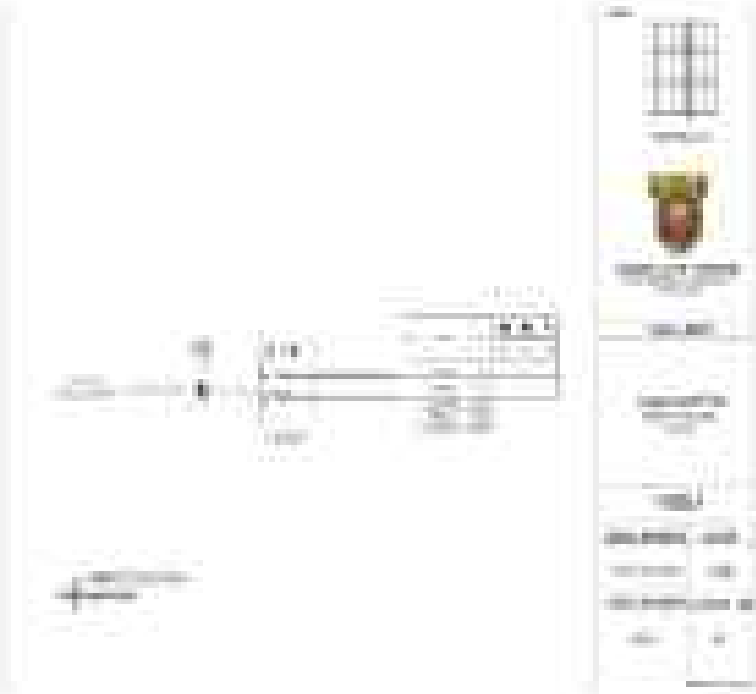

Dansih Prototipe Tipe - 34 Modal 3

1.Denah Rumah dan Denah Atap

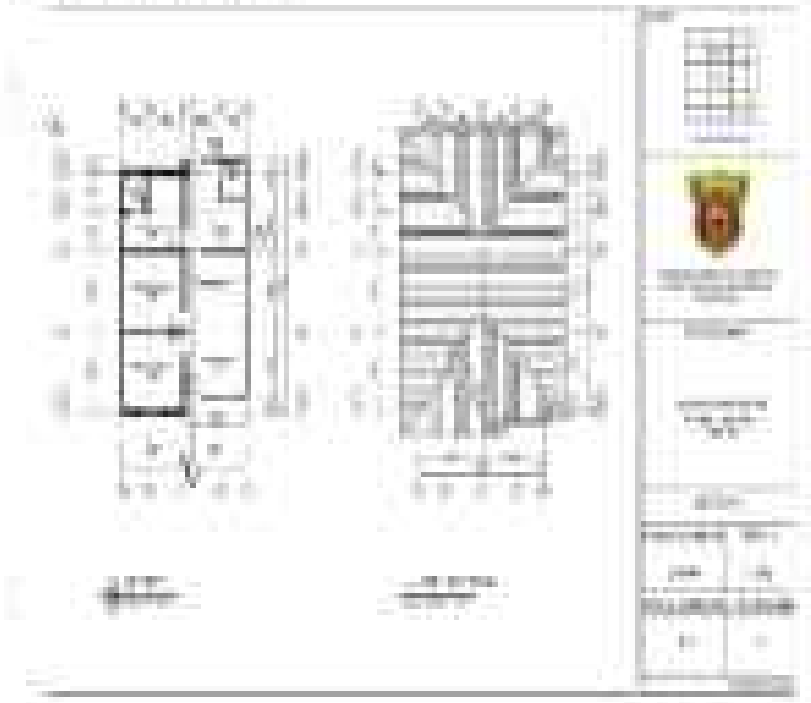

2.Tampak

1.Detail Pondasi

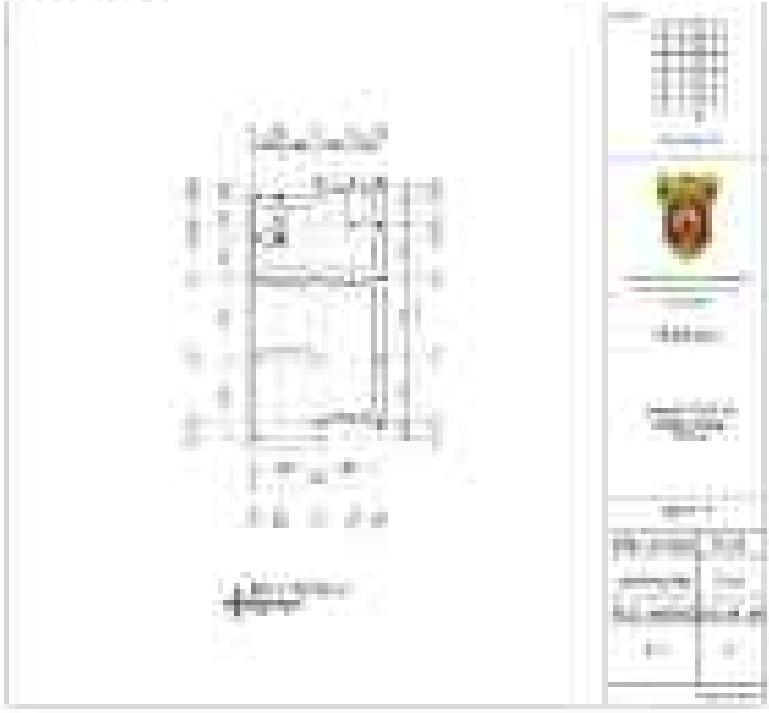

4.Detail Sloof

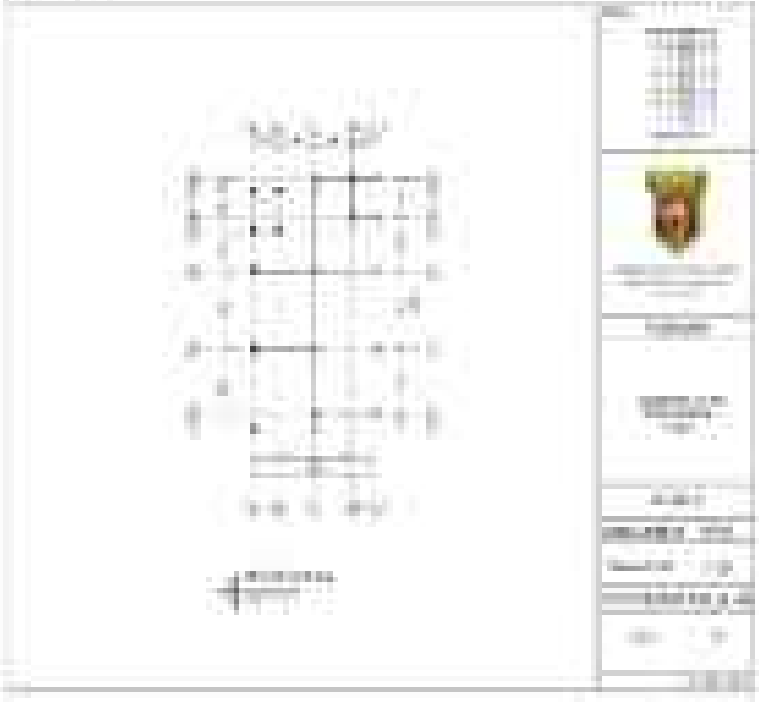

Dessin section-sol

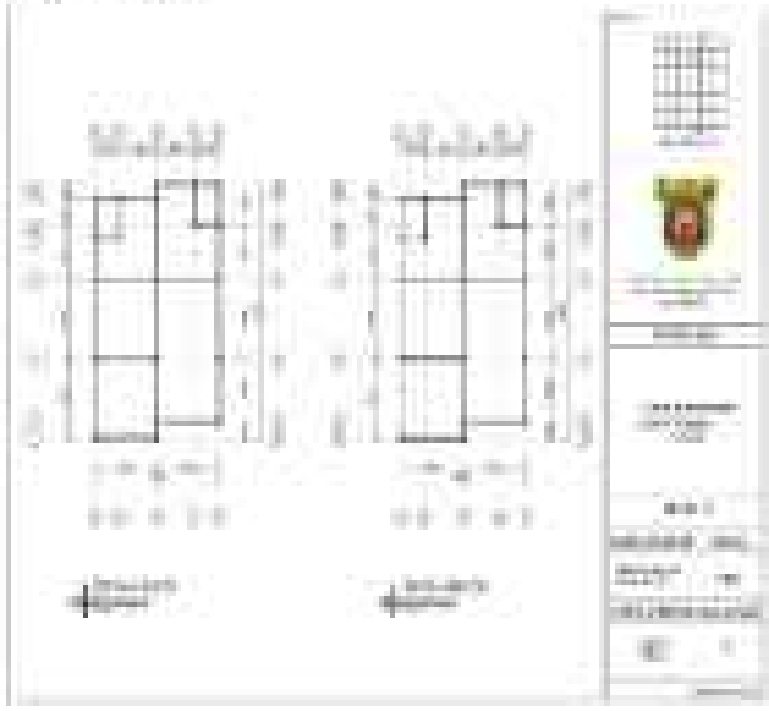

Dessin sol

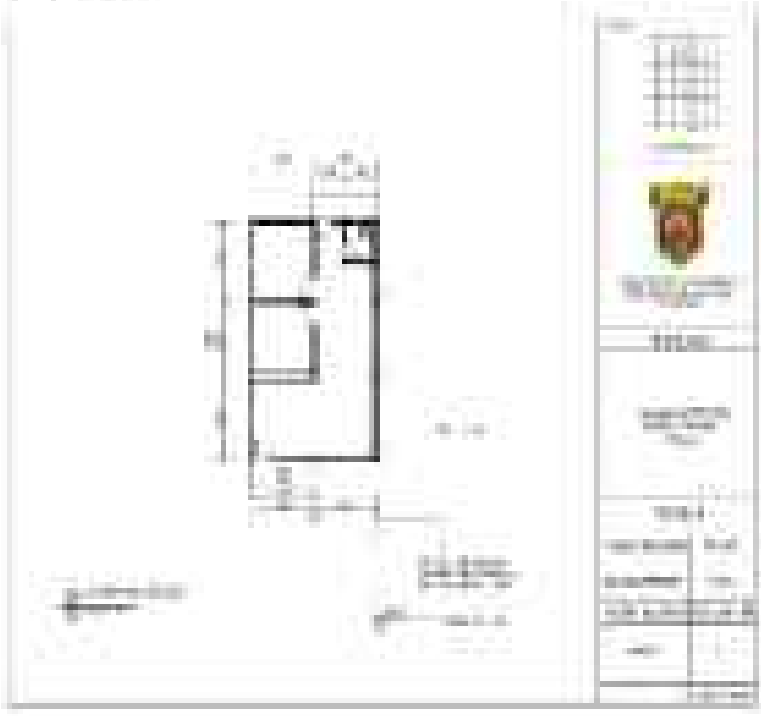

7 Detailed plan

11 Level 10 and 11 floorplan

1.Pressor

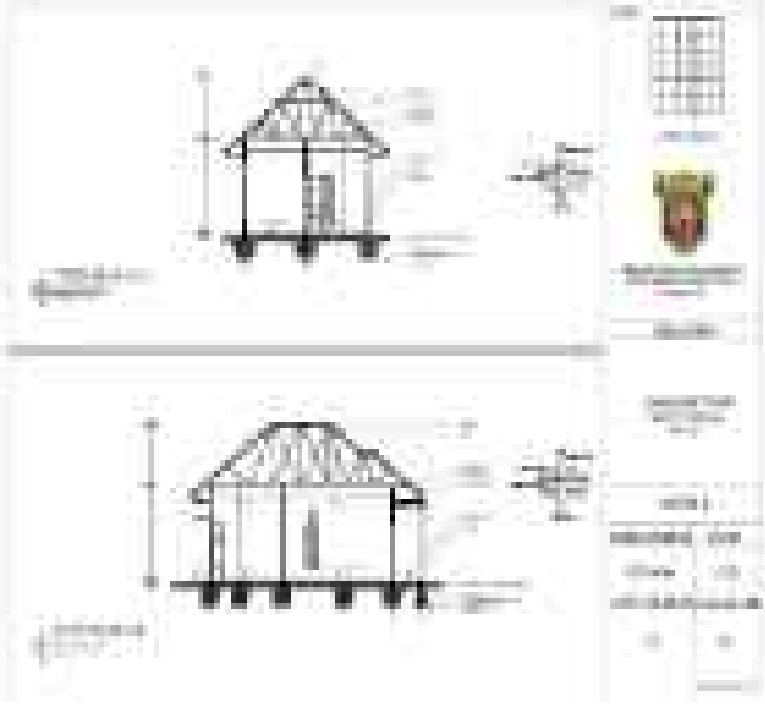

(1.Cast/Pressboard Ring (attach later)

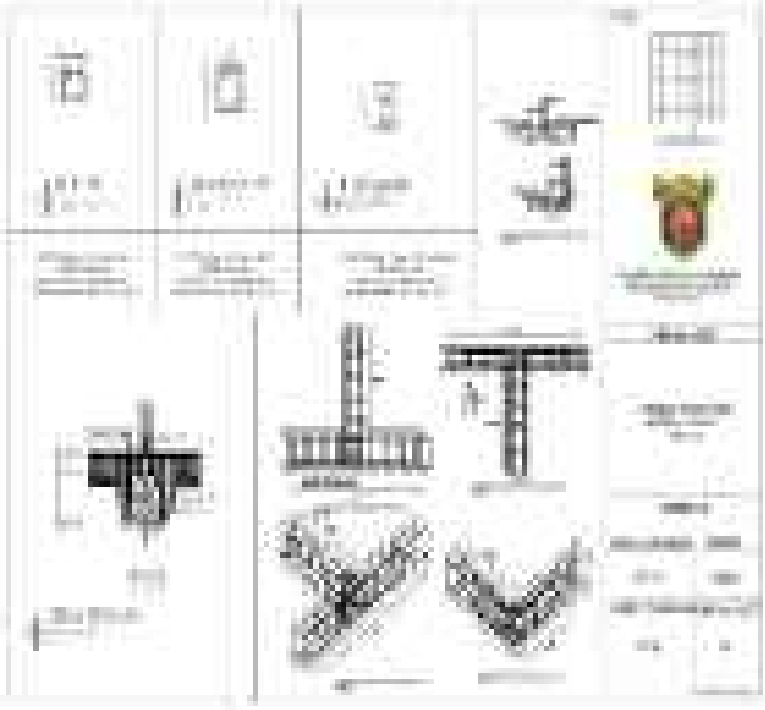

11 Detail beam

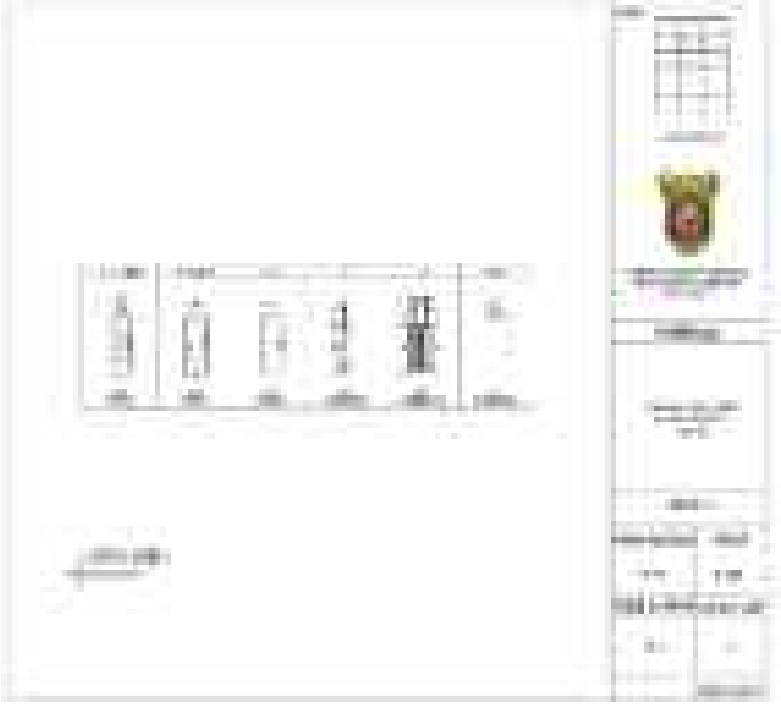

12 Detail pile

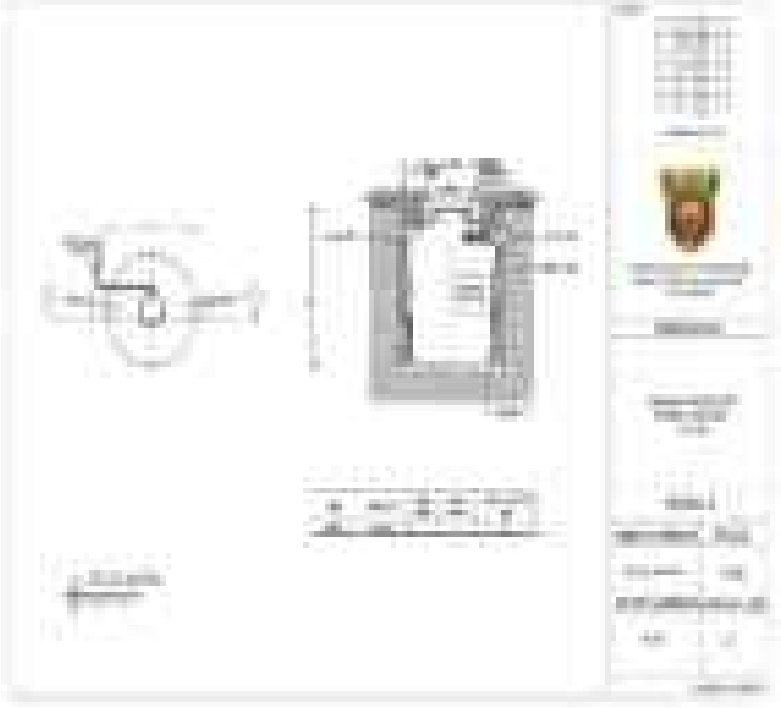

13 Dyed Waterfowl

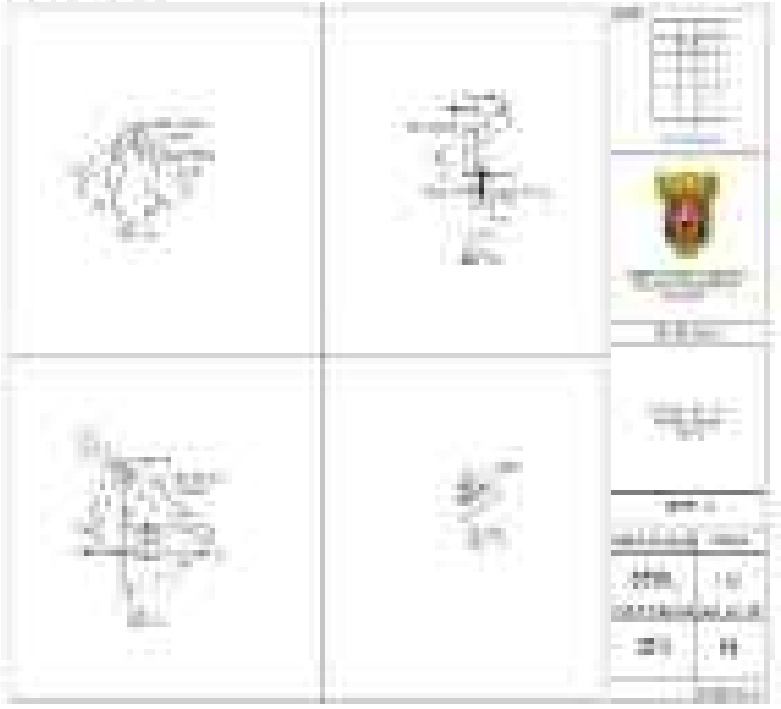

14 Mints Napkin

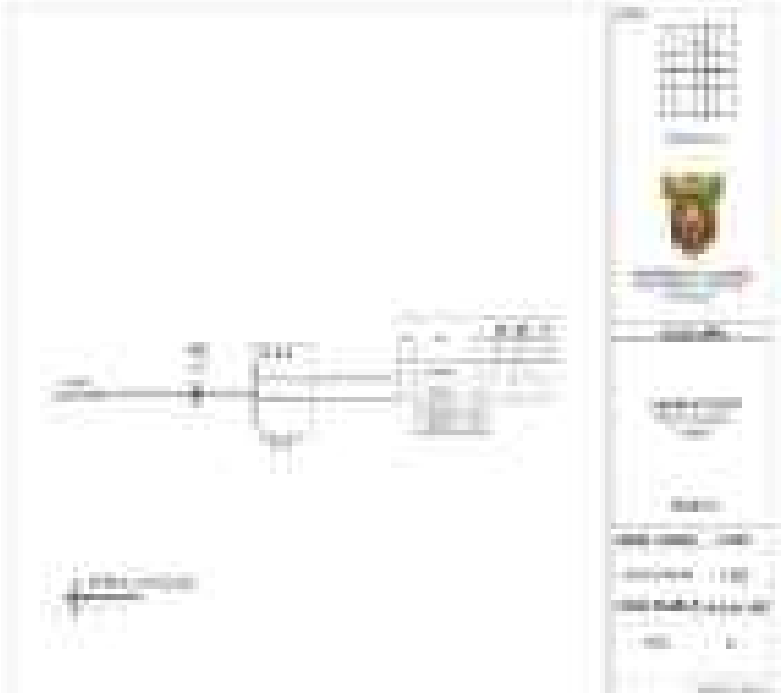

Detalle Prototipo Tipo - 06 Modal 1

1 Zonas Numeradas Detalle Mas

2 Planos

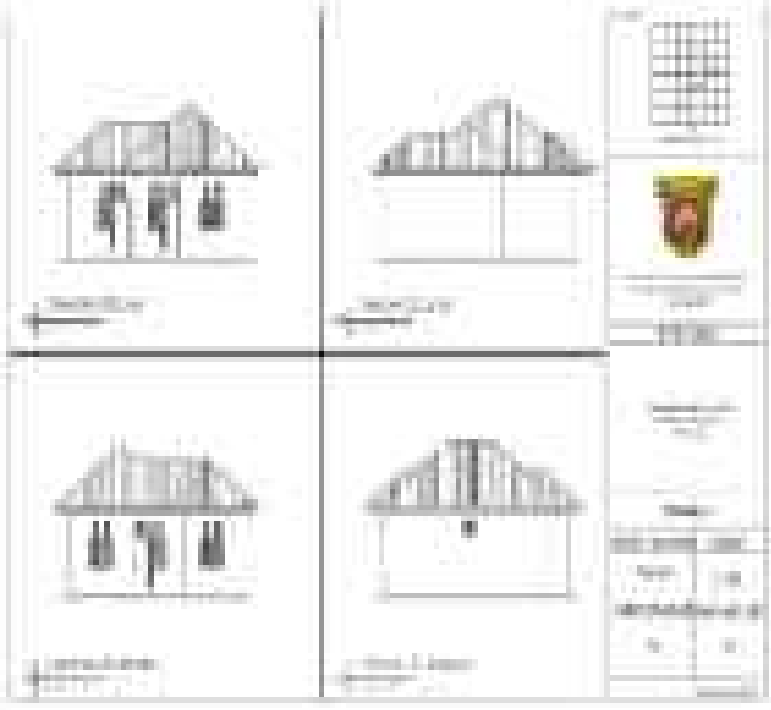

3 Dorset Rentals

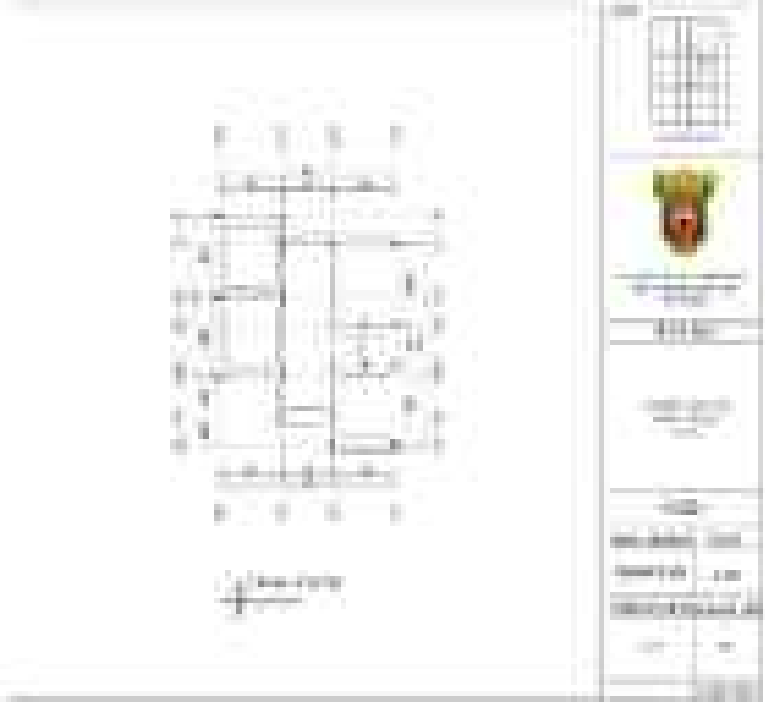

4 Dorset Gardens

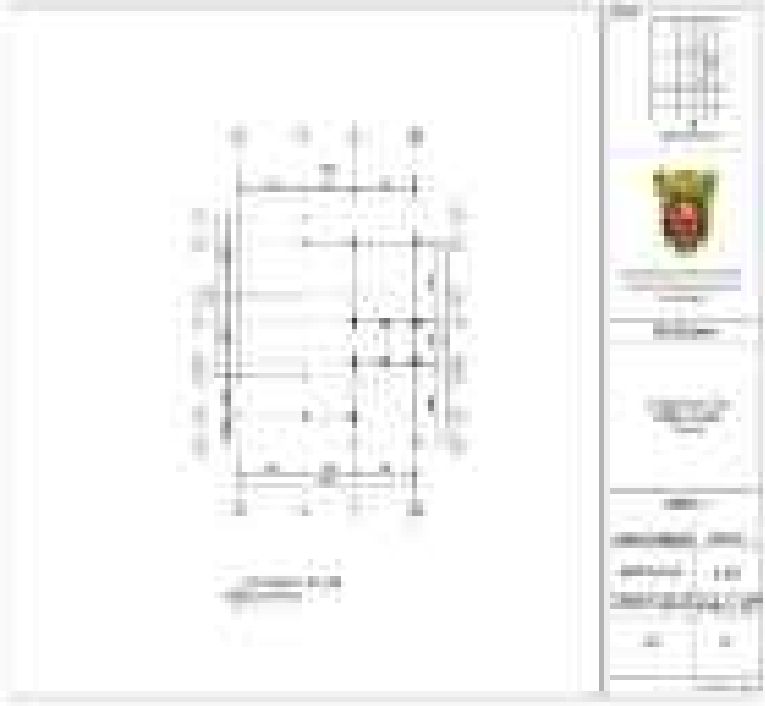

1 Design Bestehen Detail

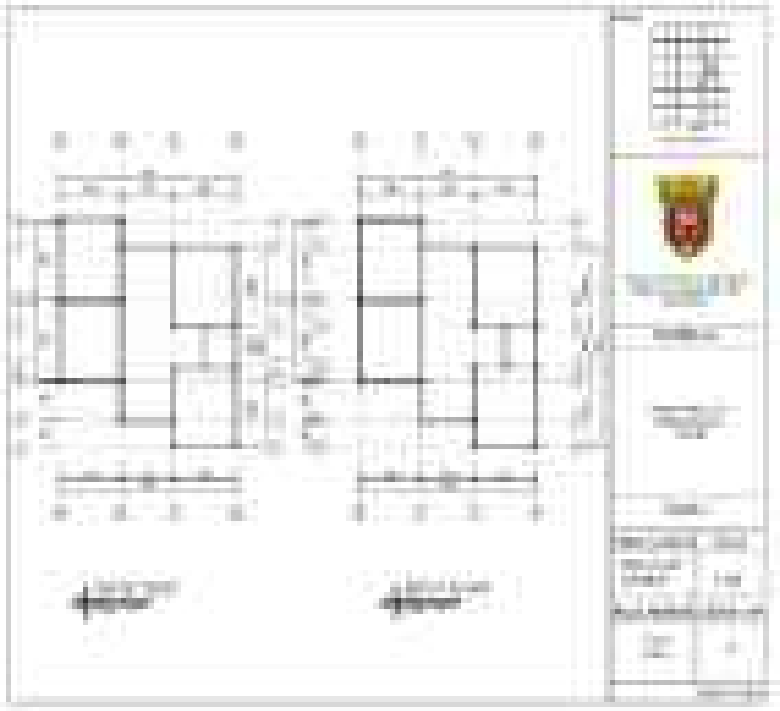

1 Detail Ansicht

T Dhal Ni Kilo

Lower Ground Floor Plan

1.Pinnacle

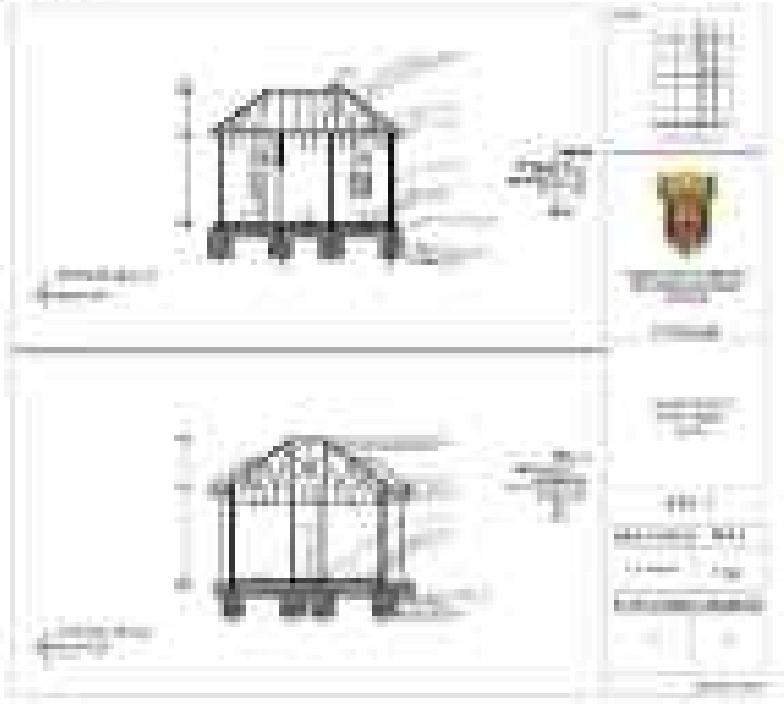

1.1.Cast/Formed Roof Tile Bob-tail Hook

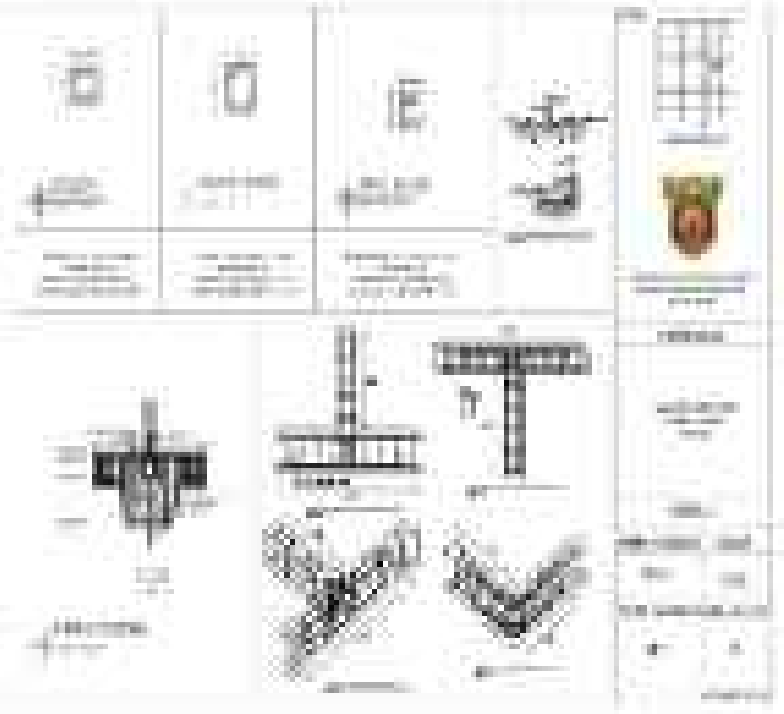

11 Detail Kuper

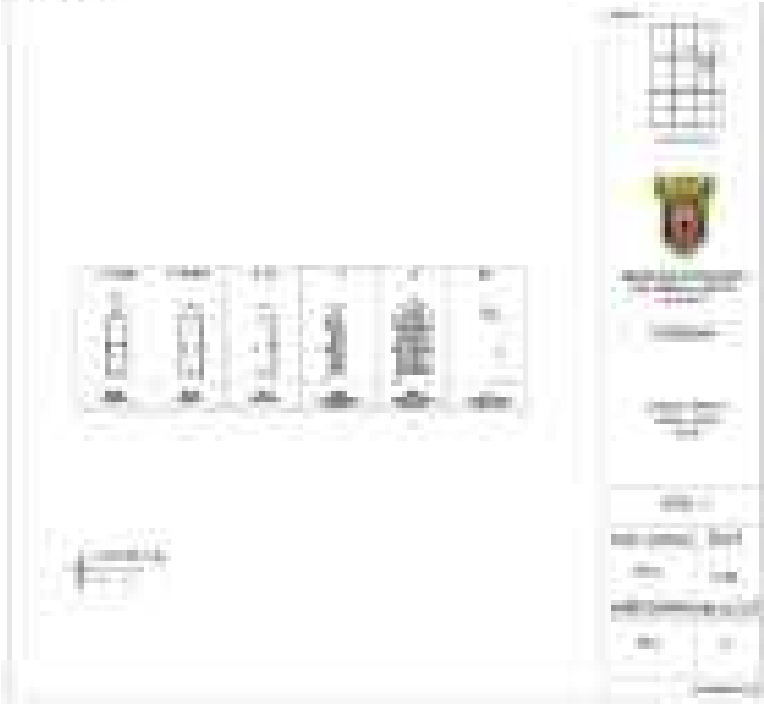

12 Detail Shaft

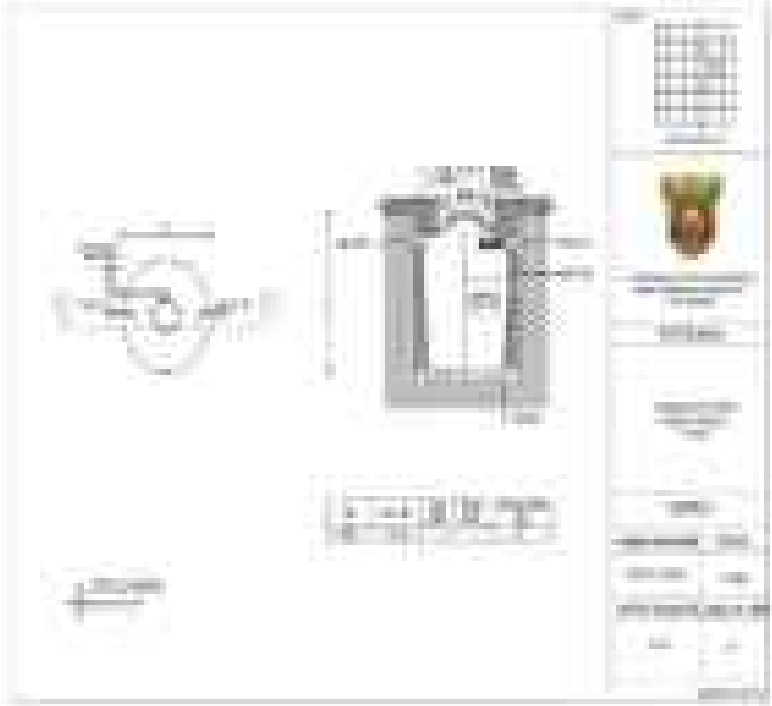

13 Dried Kale Flock

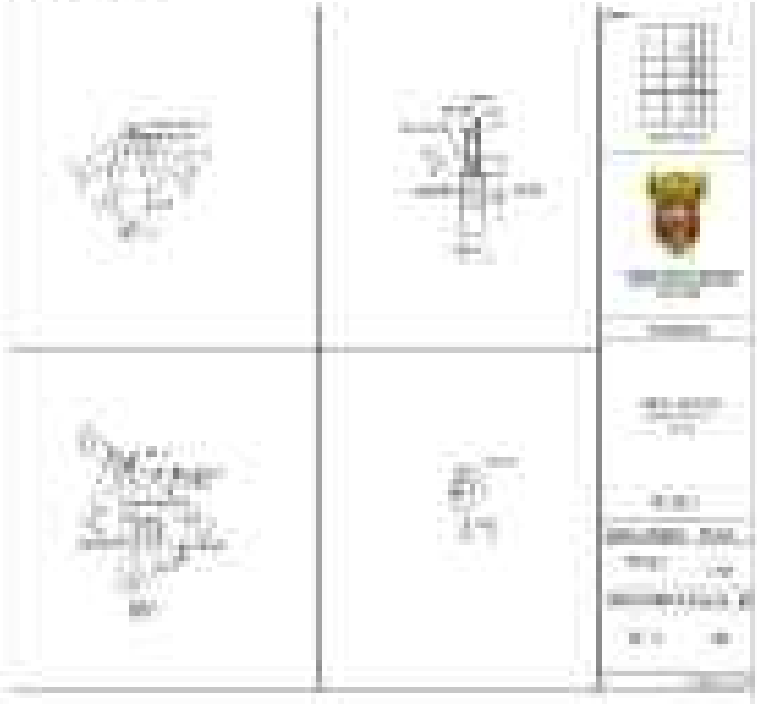

14 Drifts Dessert

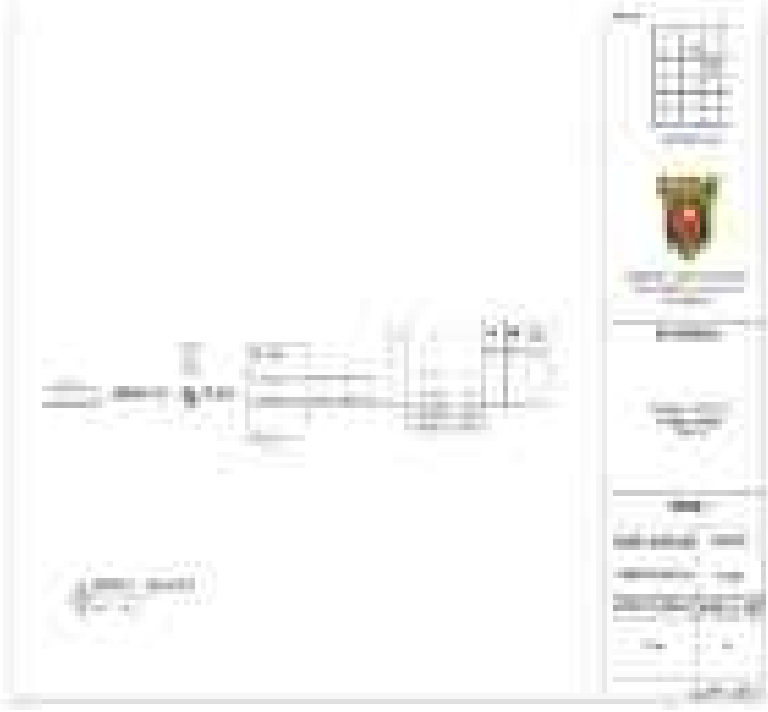

Diseño Prototipo Tipo - 06 Modal 2

(Zonas Rurales con Carreteras)

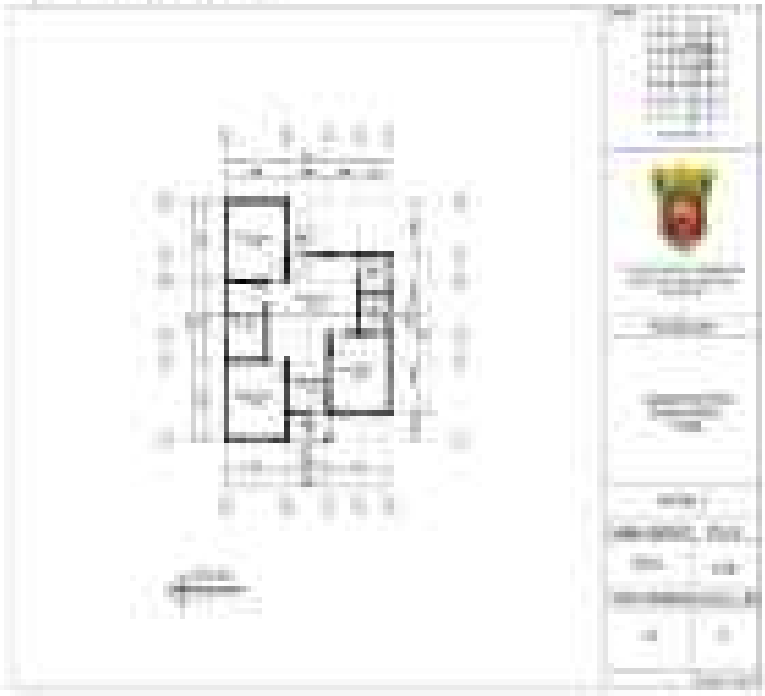

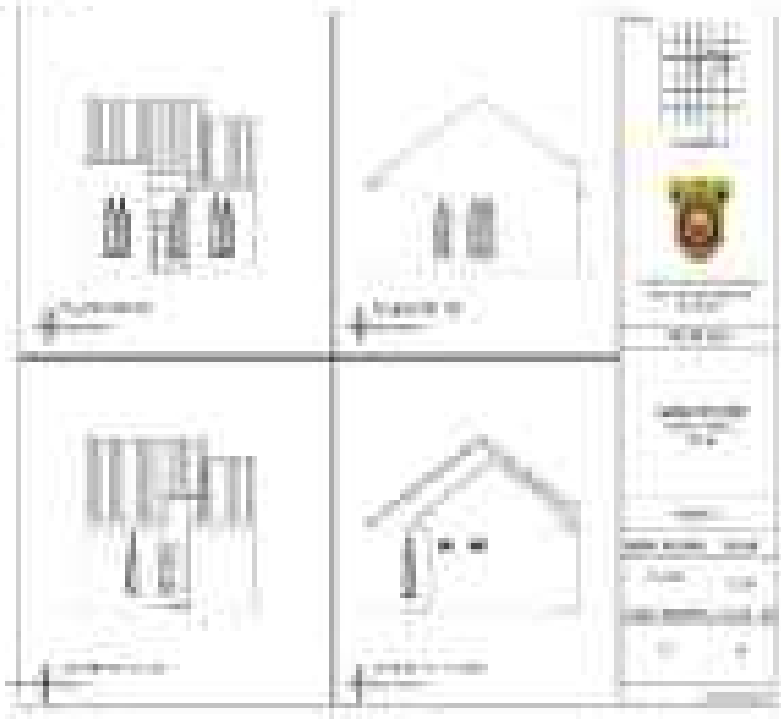

3. Denah Atap

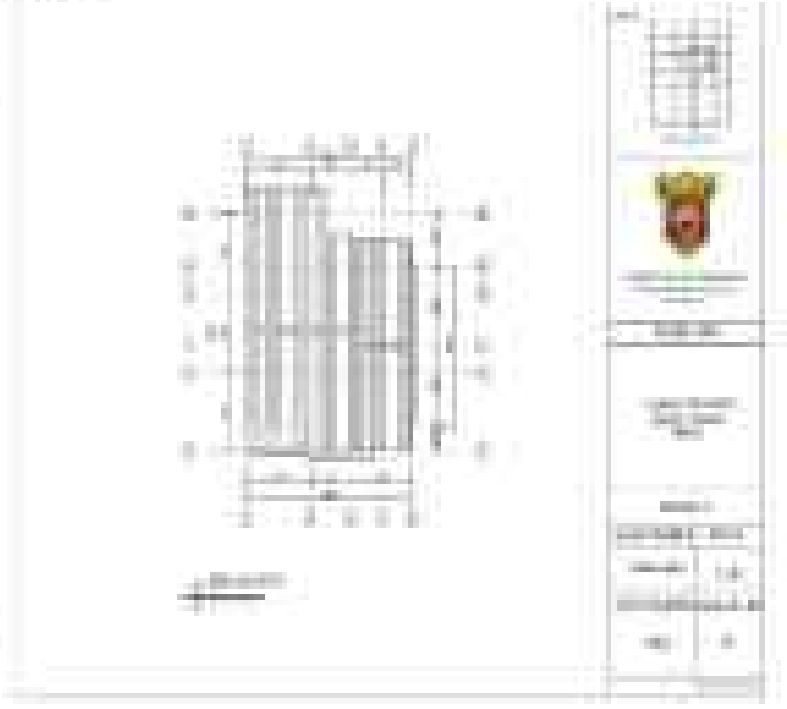

4. Denah Pondasi

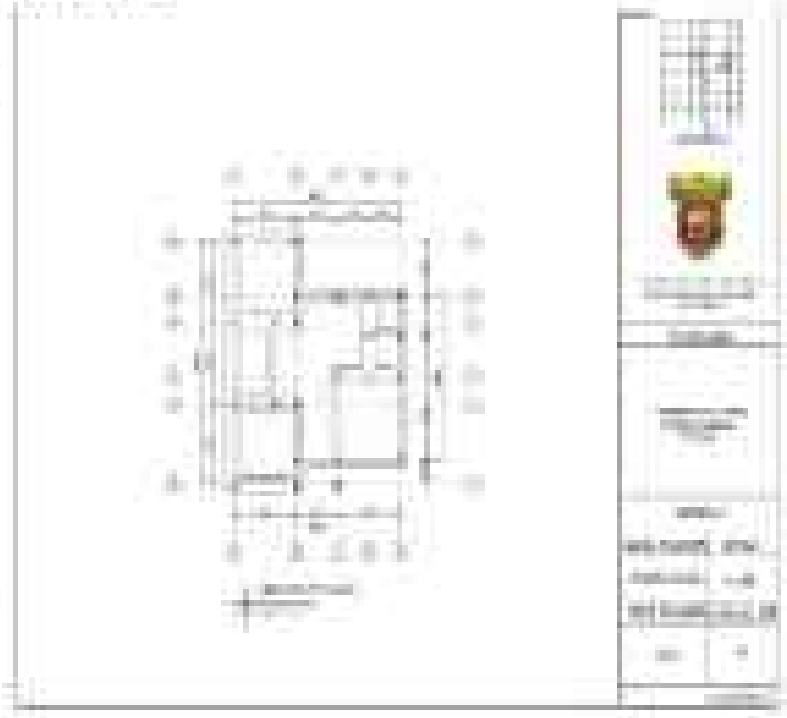

7. Design Sketch

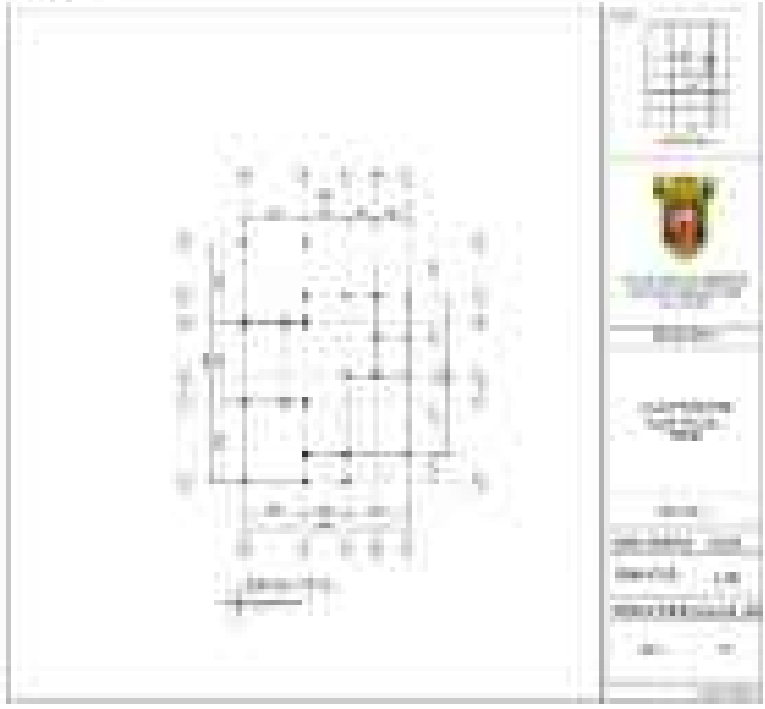

8. Details Board

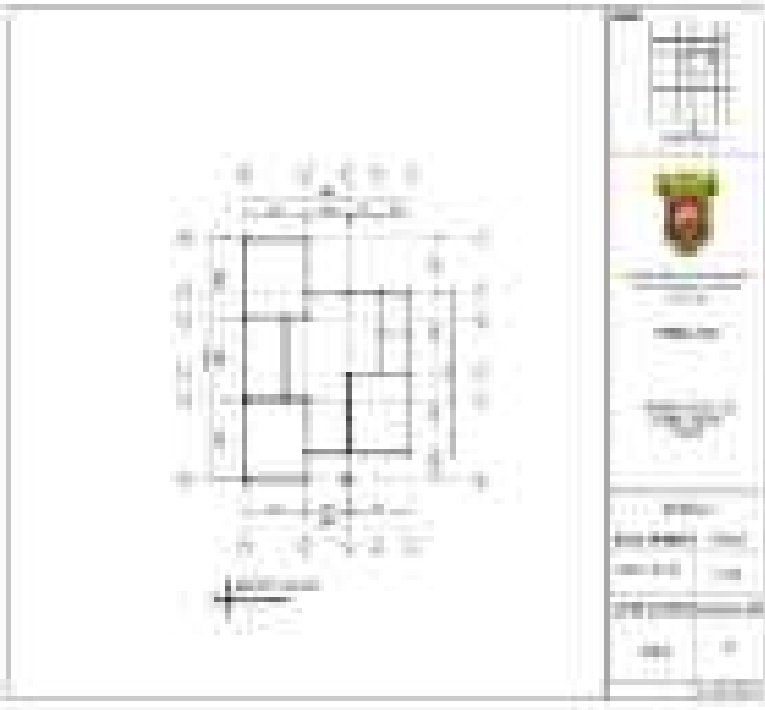

7. Denah Balok

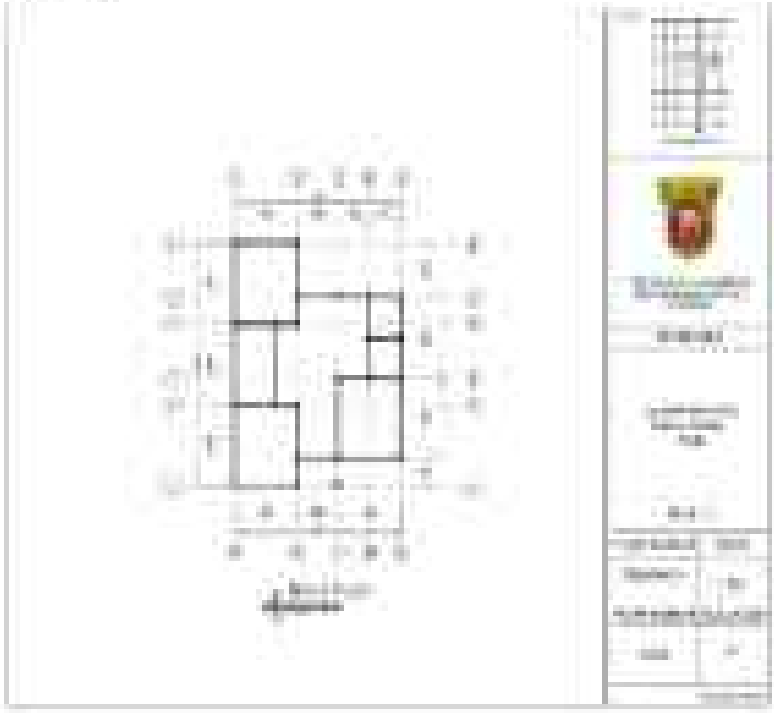

8. Detail As Balok

1 Grundriss

12 Dach Tiefgarage Erdgeschoss

11. Potongan

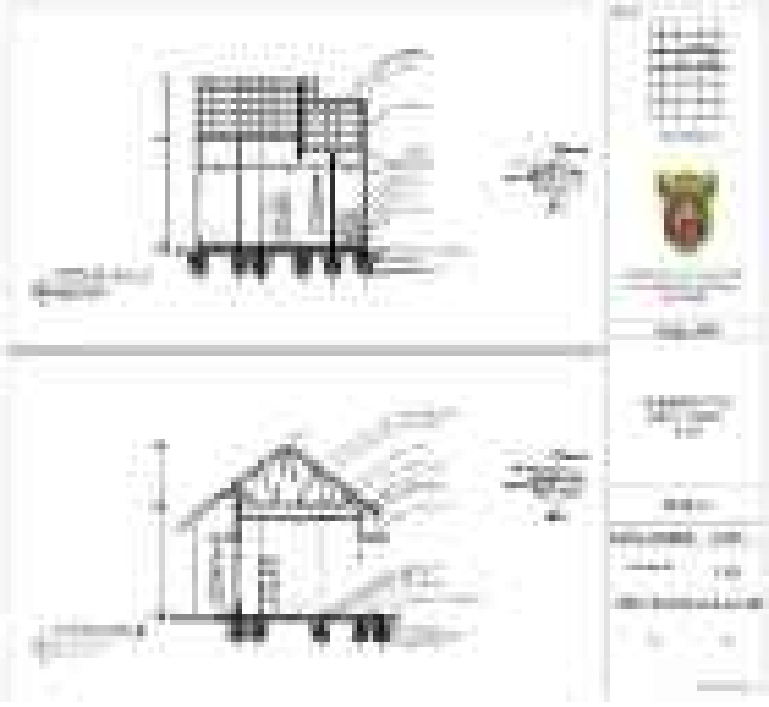

12. Detail Pondasi, Sloof, Kolom, Balok dan Kuda-kuda

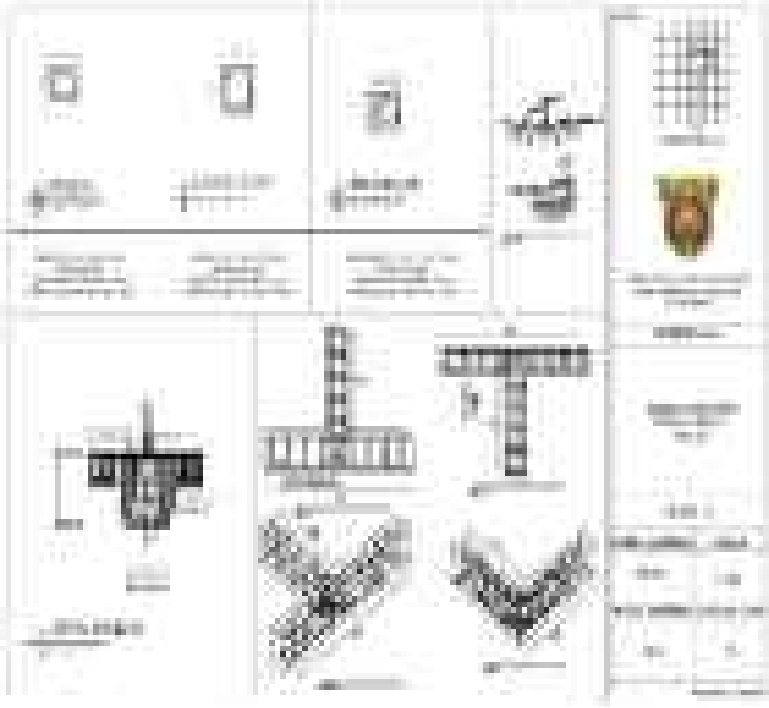

13. Detail Gavel

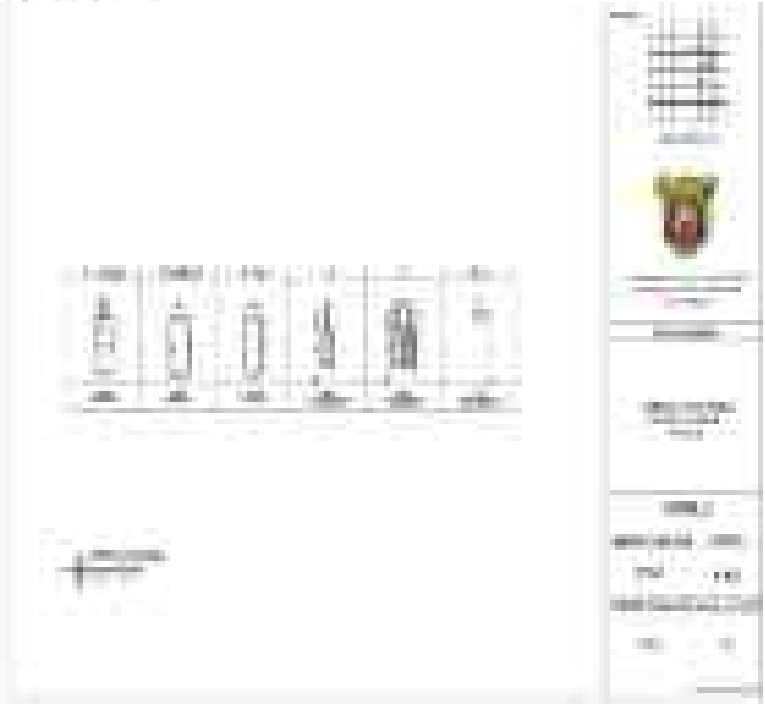

14. Detail Roof

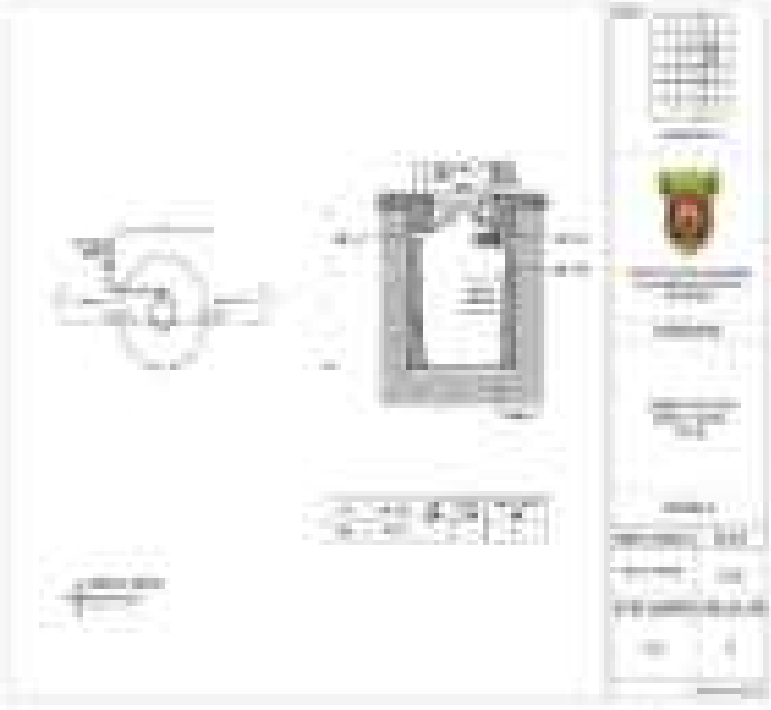

15. Detail Gate Plate

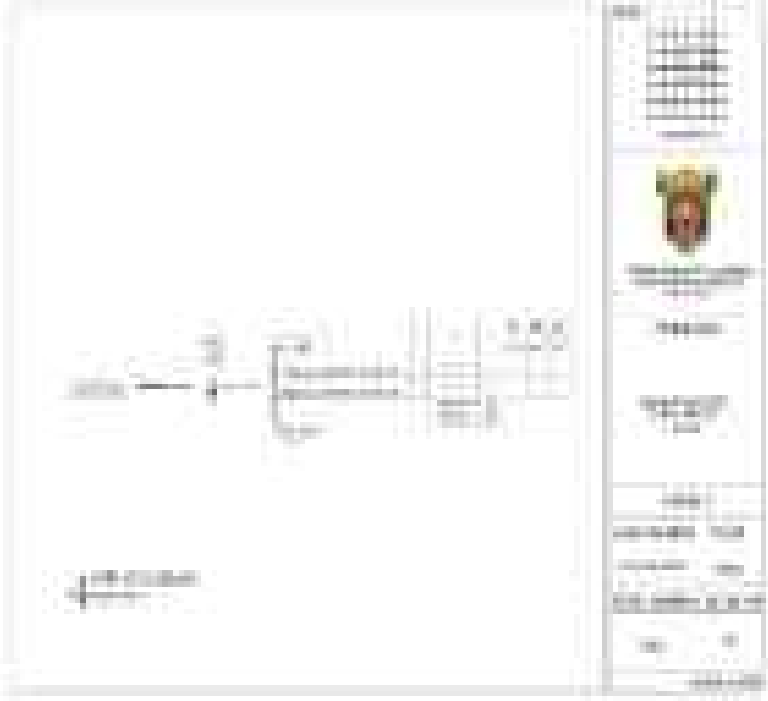

16. Wiring Diagram

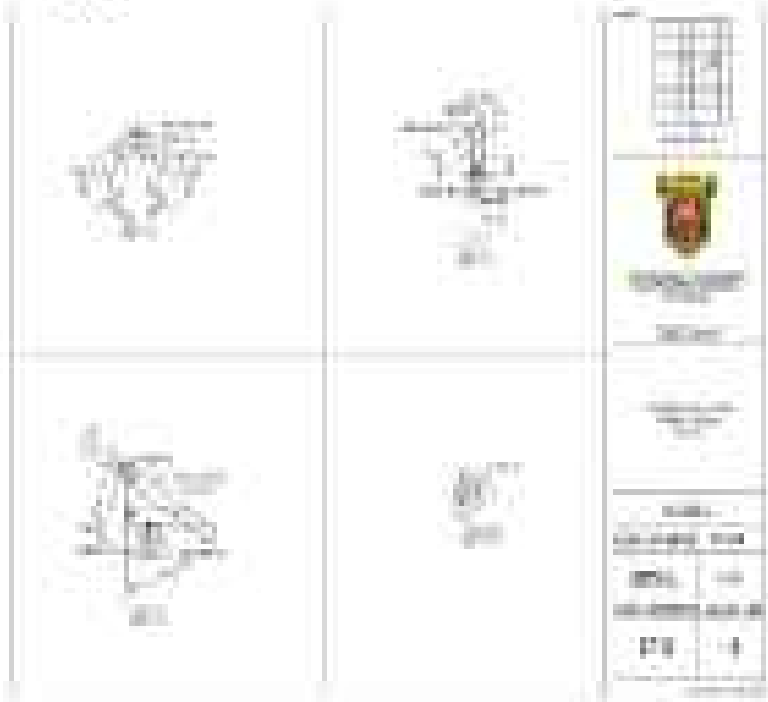

Dacuin Prototipe Tipe - 56 Model 1

* Dacuin Nomor dan Dacuin lama

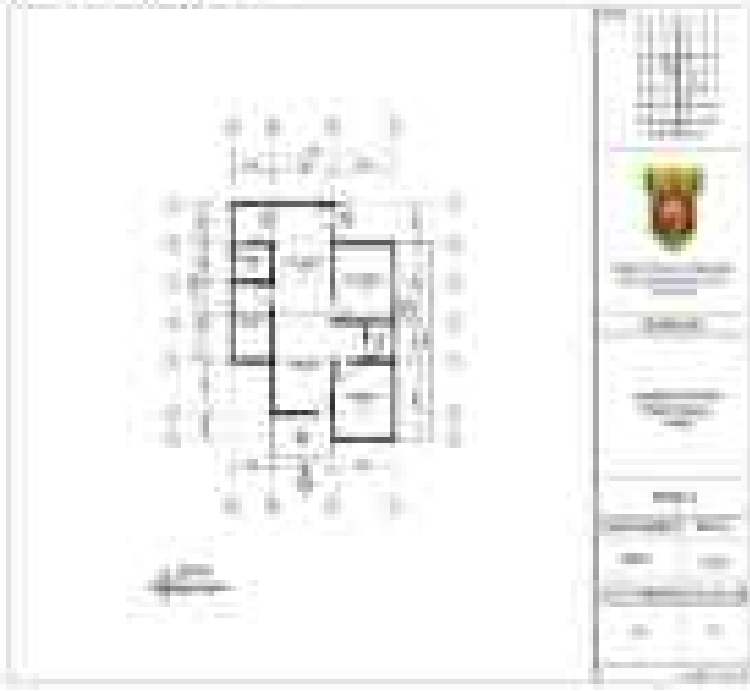

2 Tampak

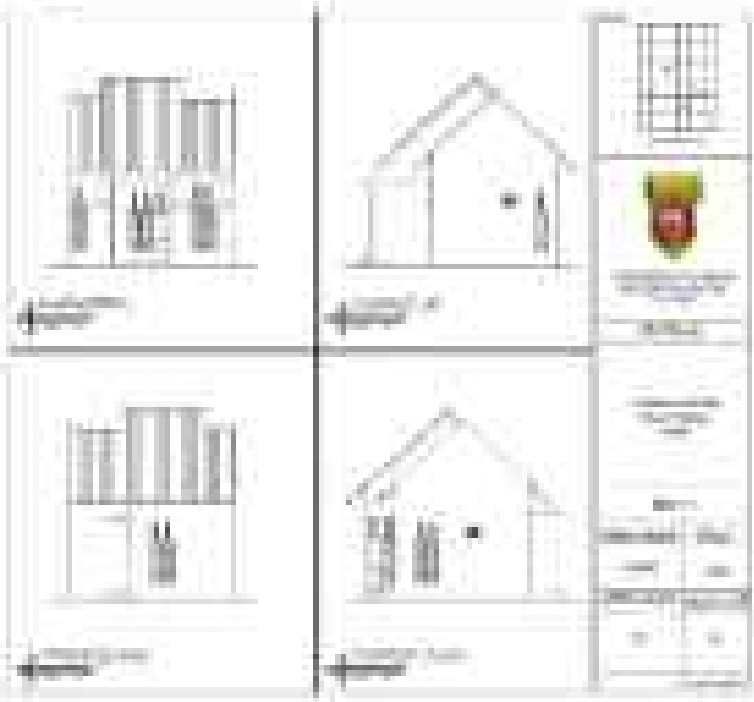

3. Denah Atap

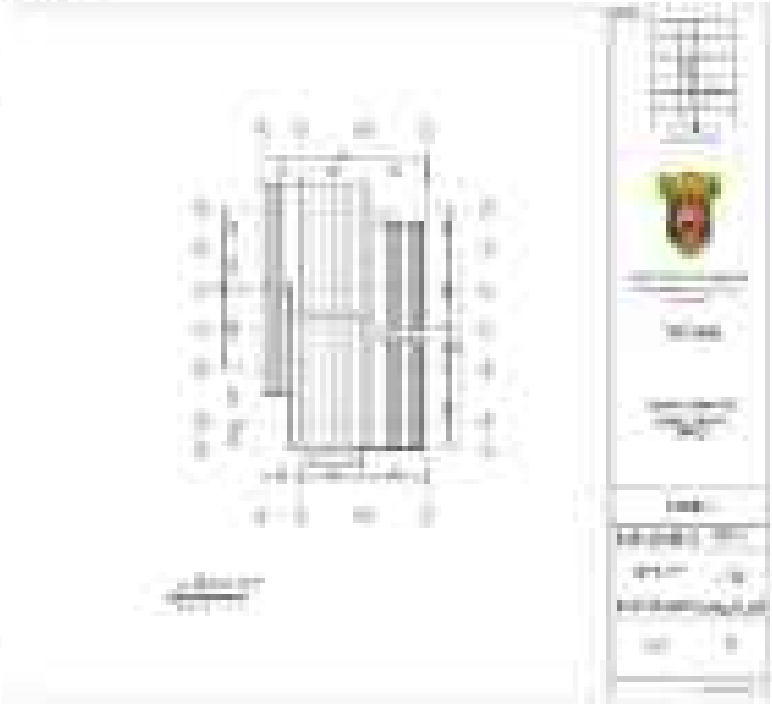

4. Denah Pondasi

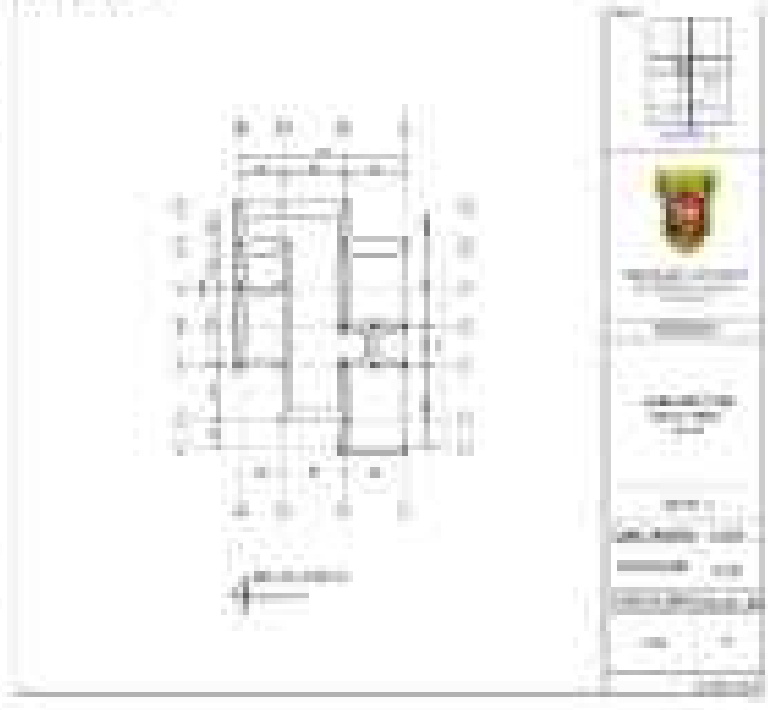

1. Denah Gedung

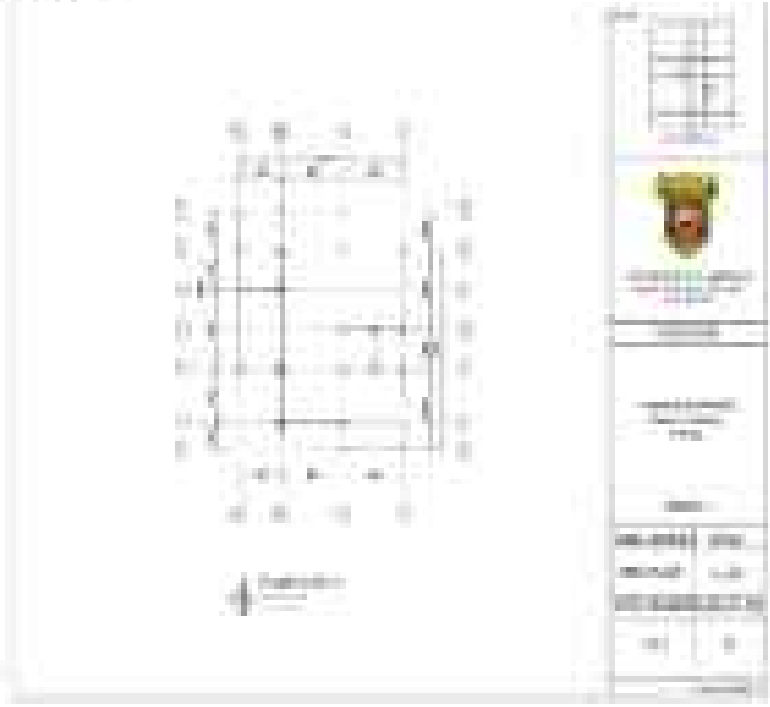

4. Denah Atap

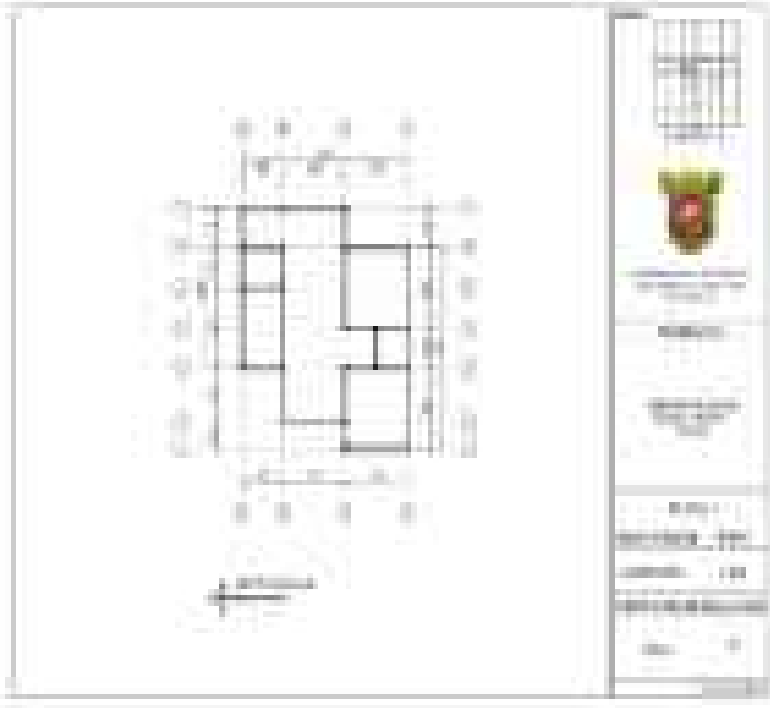

7. Denah Balok

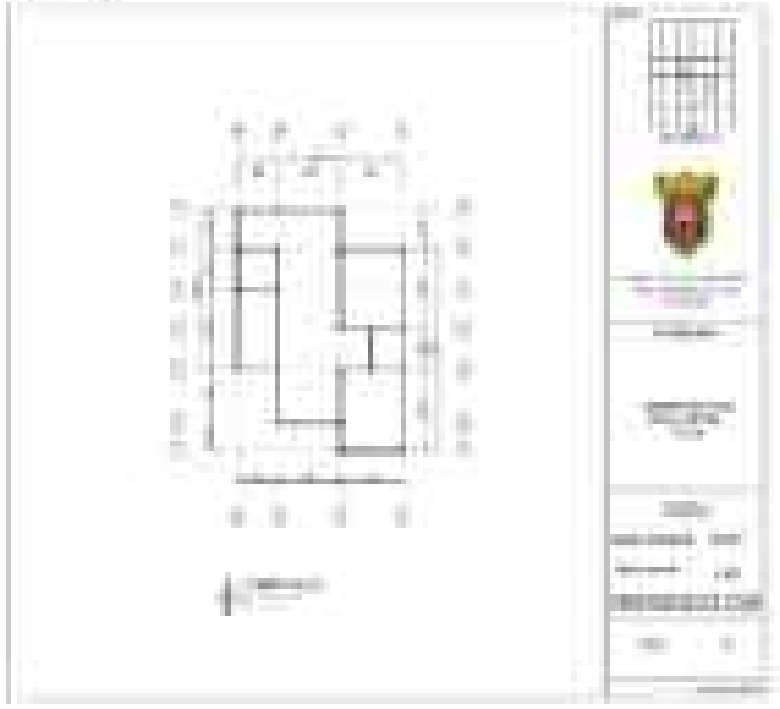

8. Detail As Balok

1 Grundriss

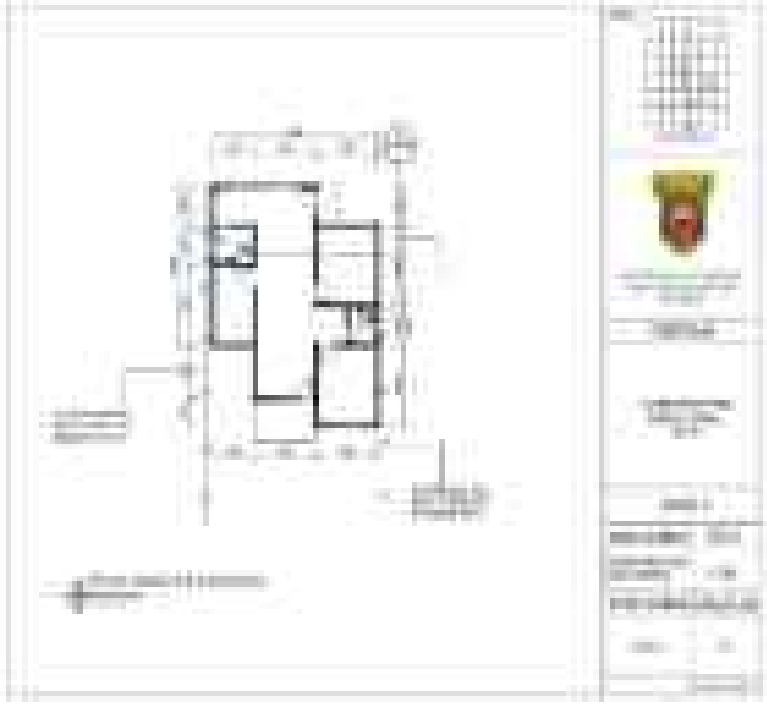

1.1 Grundriss Erdgeschoss

11. Potongan

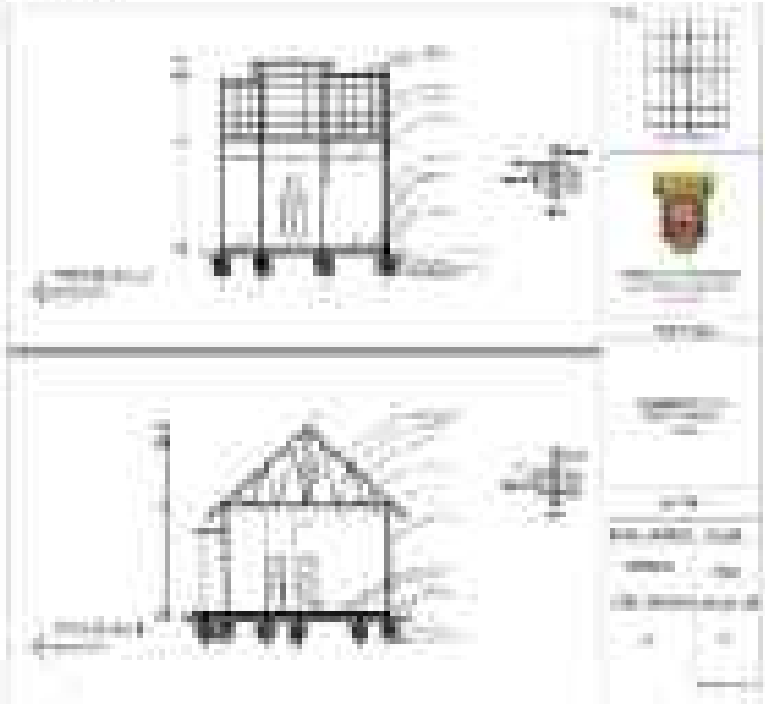

12. Detail Pondasi, Sloof, Kolom, Balok dan Kuda-kuda

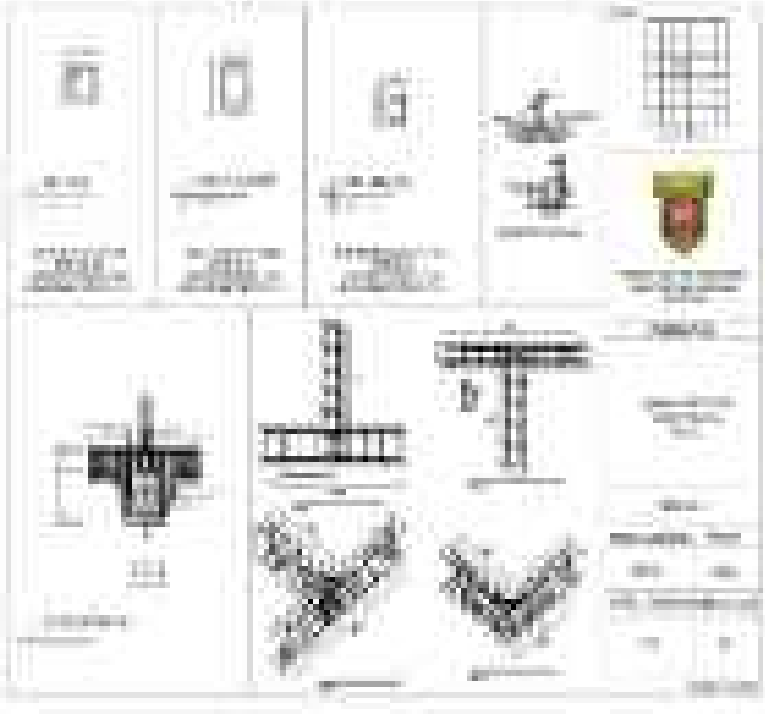

13. Detail Gavel

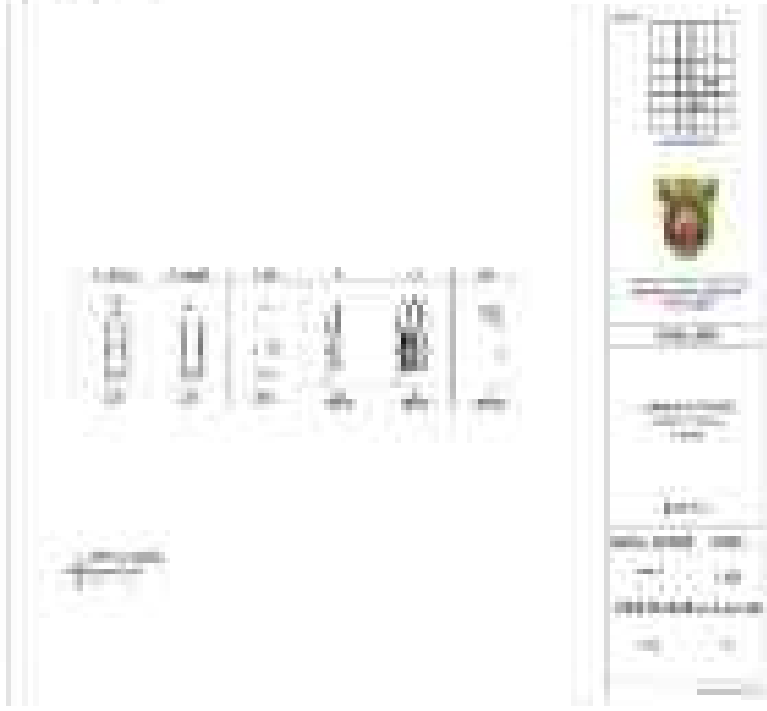

14. Detail Kursi

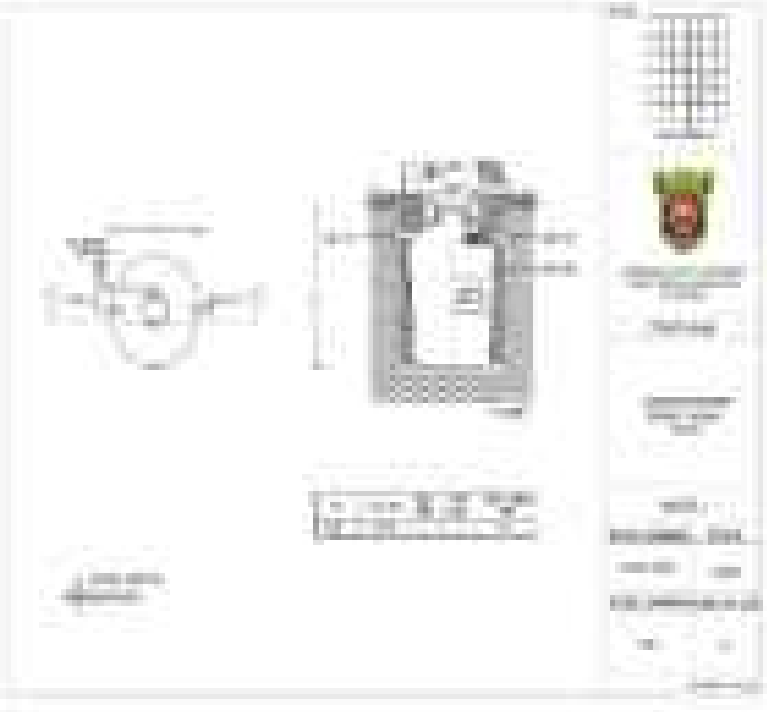

15. Detail Gulentuin

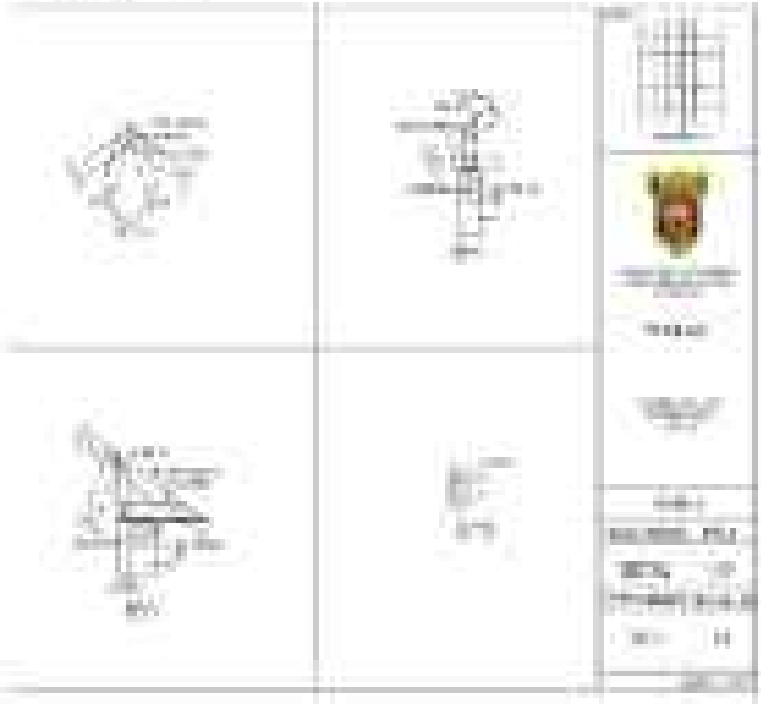

16. Inrit g Digital

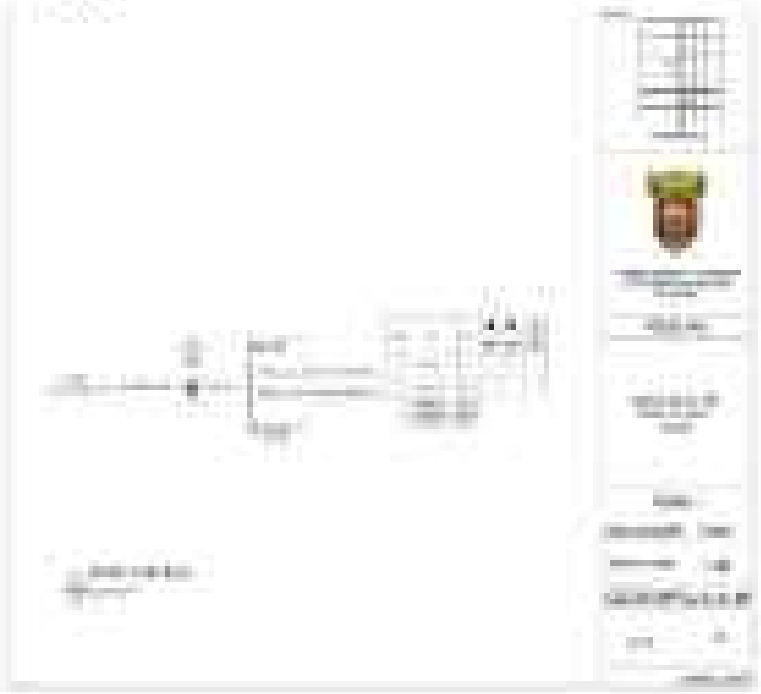

Denah Prototipe Tipe - III Model 4

Denah Rumah dan Denah Atap

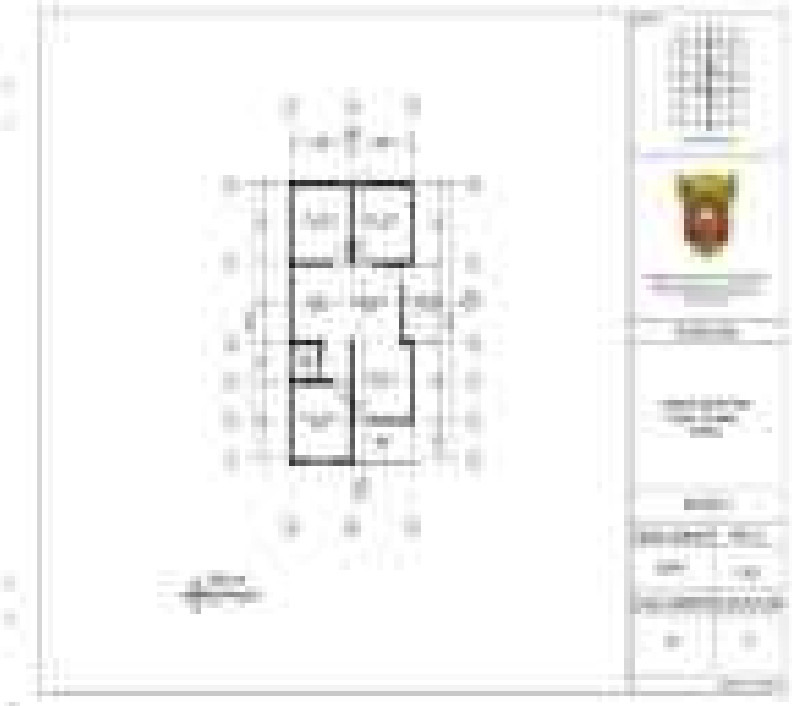

Tampak

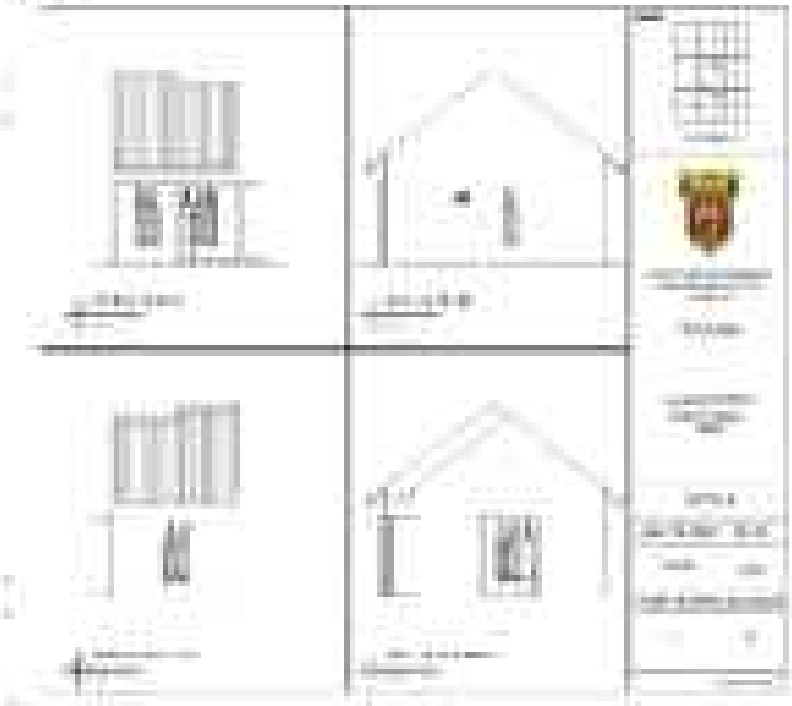

3. Denah Atap

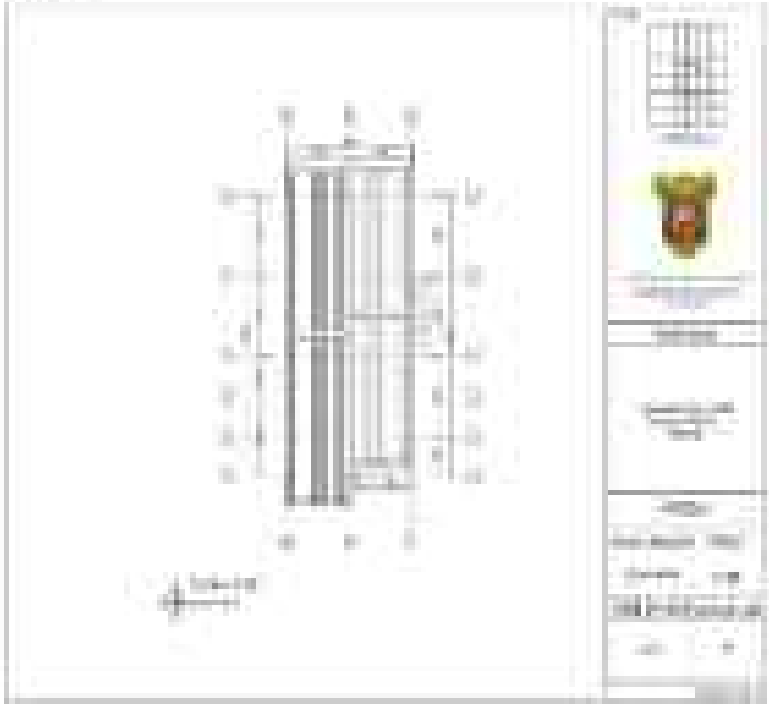

4. Denah Pondasi

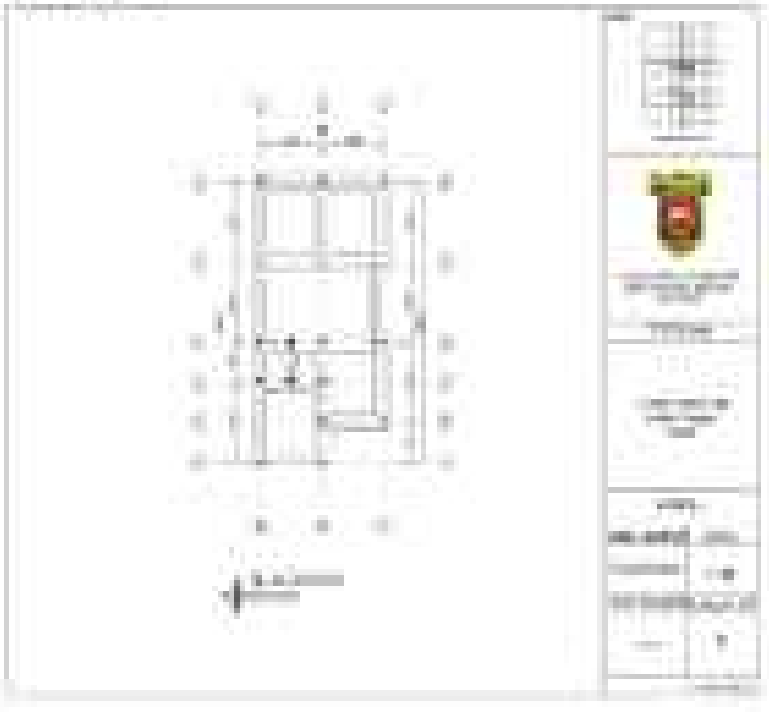

1. Dexter Gibbon

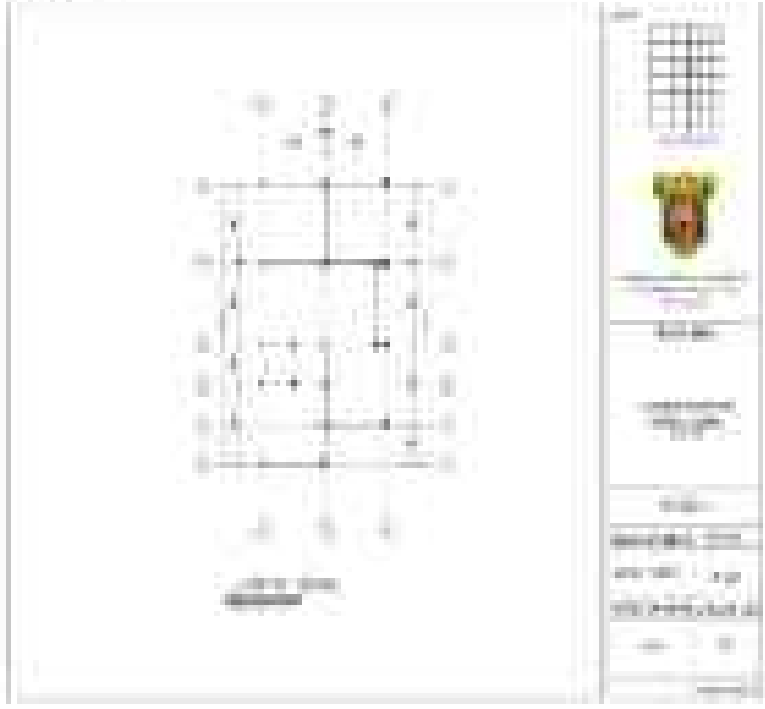

4. Derek Kent

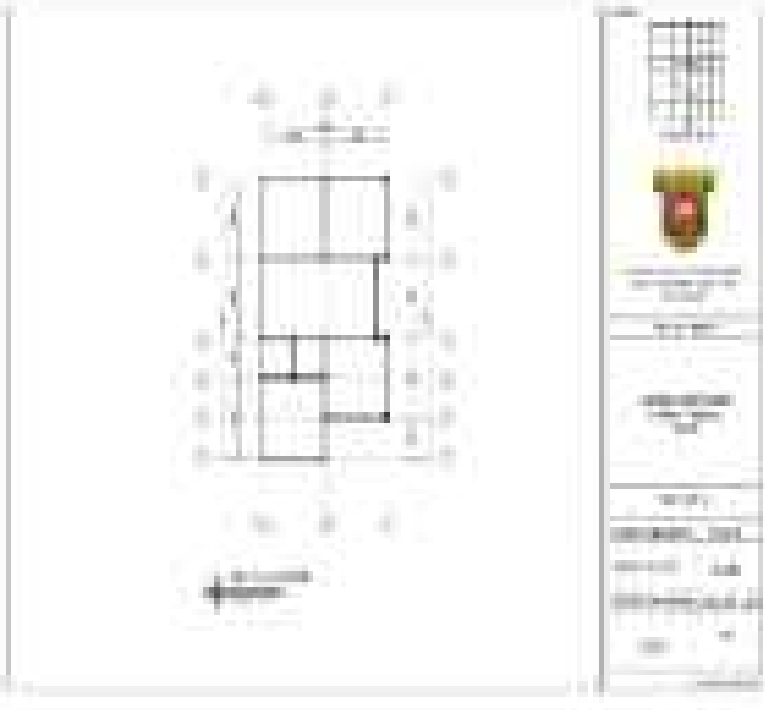

7. Denah Balok

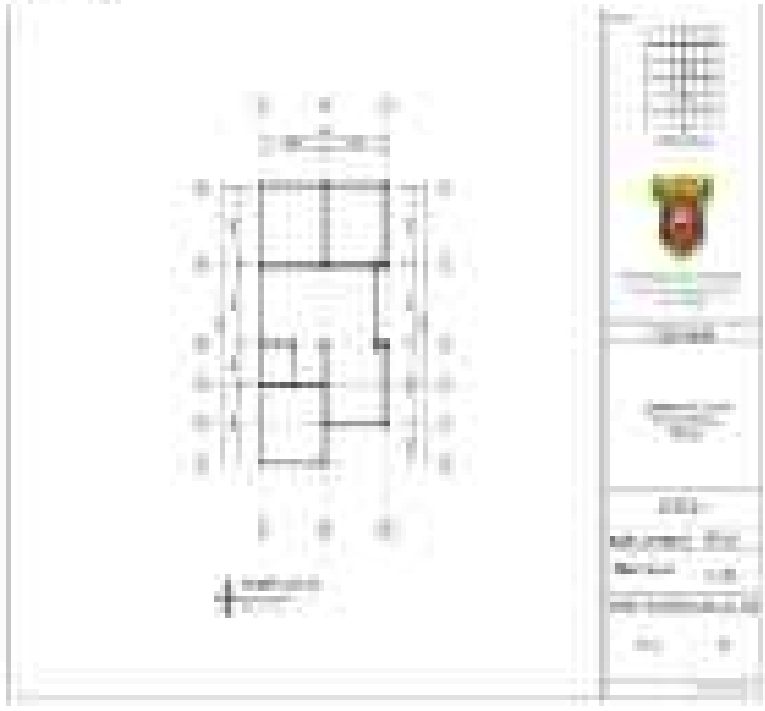

8. Denah Kolom

1.Dzień 10 kolor

12. DZIEŃ TIO LAYOUT A RYSOWANIE

11. Potongan

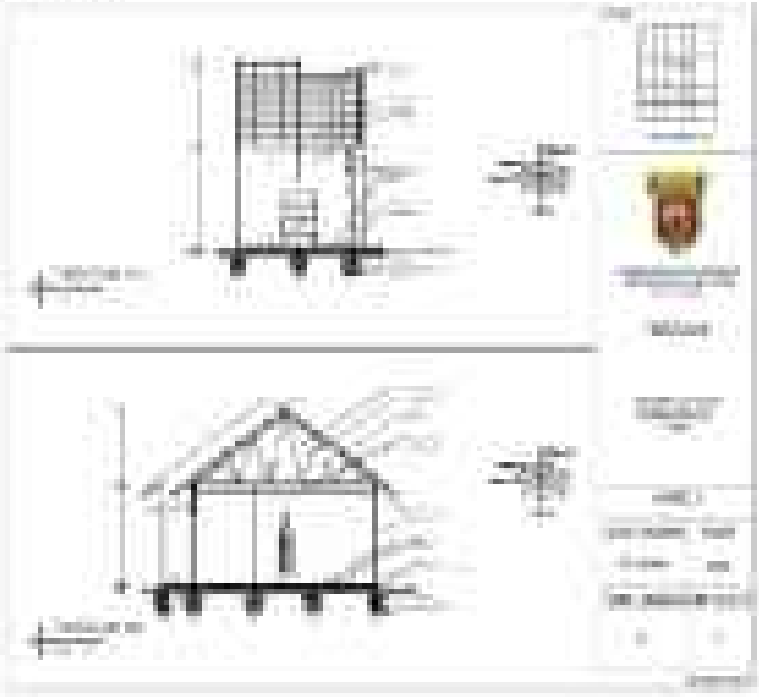

12. Detail Pondasi, Sloof, Kolom, Balok dan Kuda-kuda

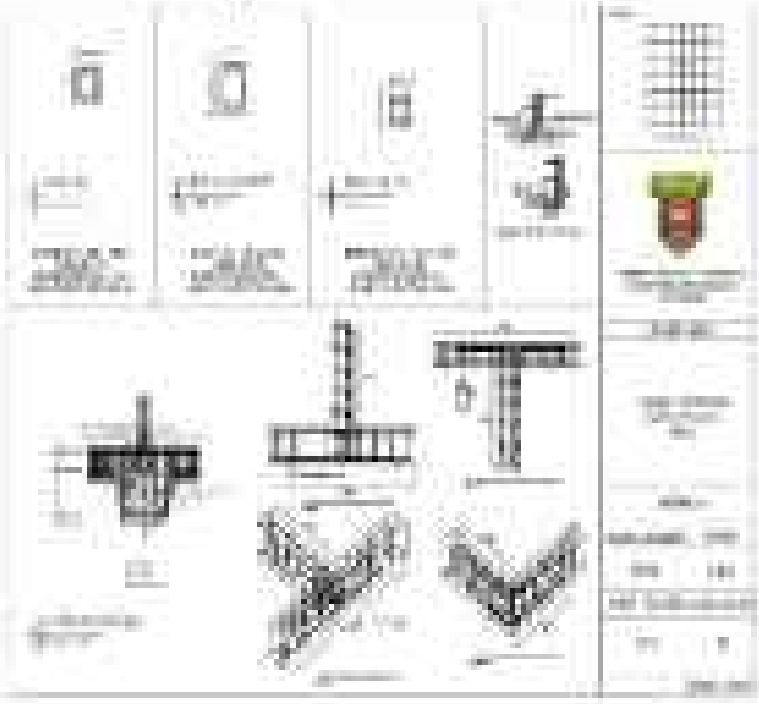

13. Detail Gavel

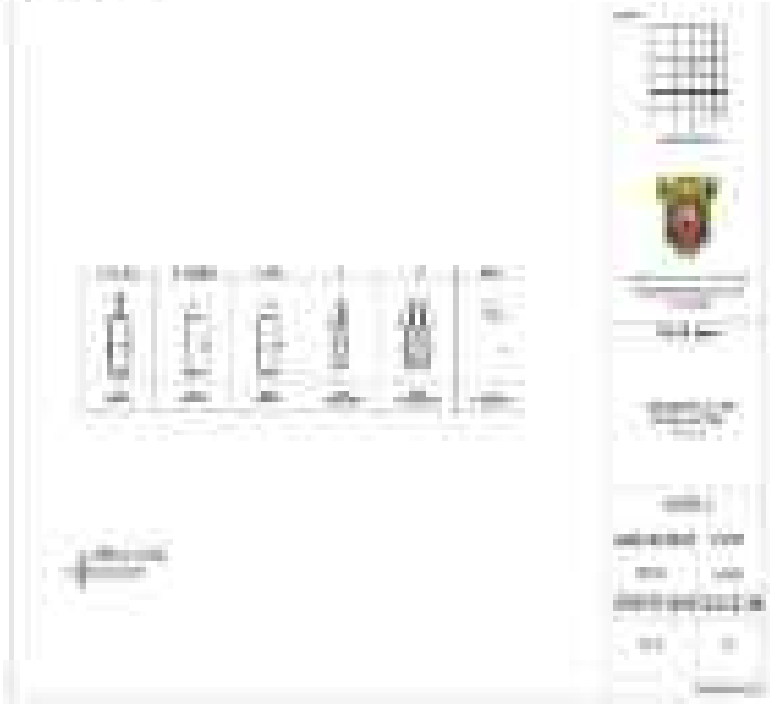

14. Detail Bolt

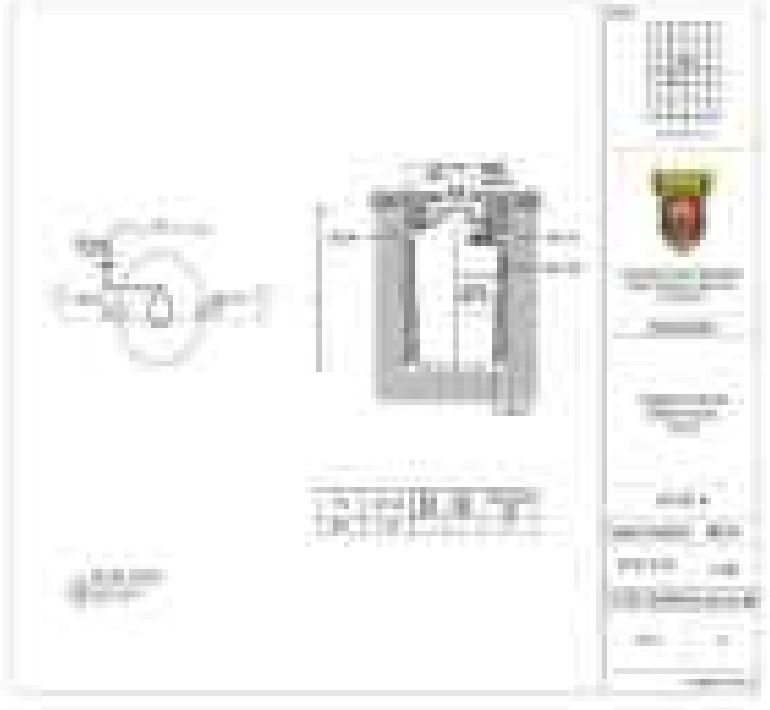

15. Detail Kuberflute

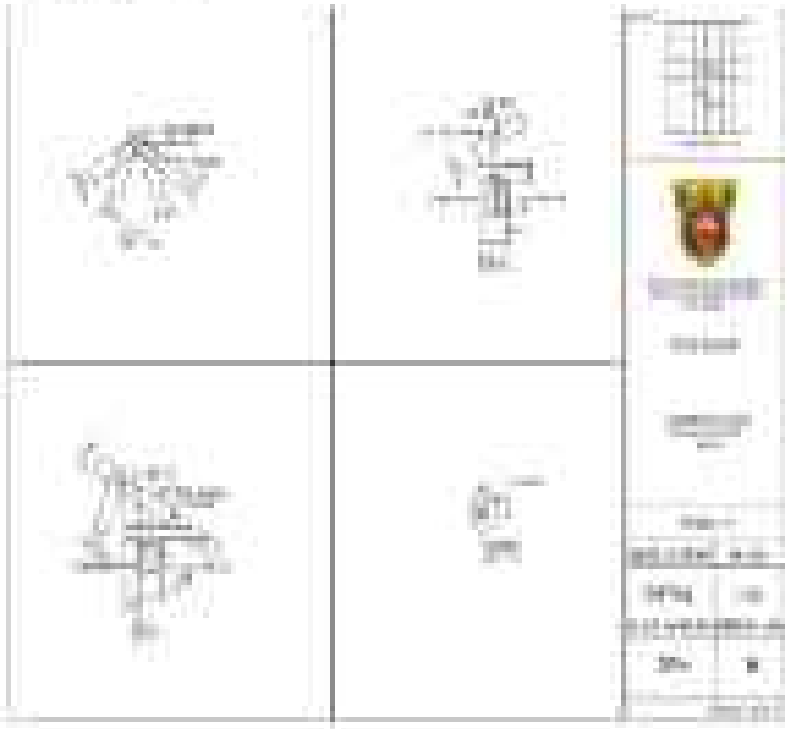

16. Wiring Diagram

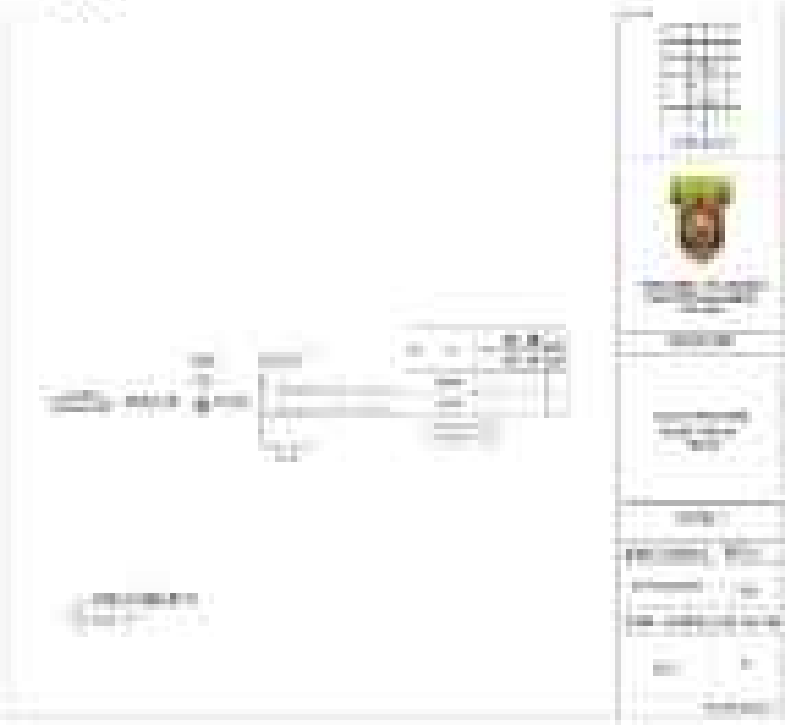

Denah Prototipe Tipe - 50 Model 3

- Denah Normal dan Denah Atap

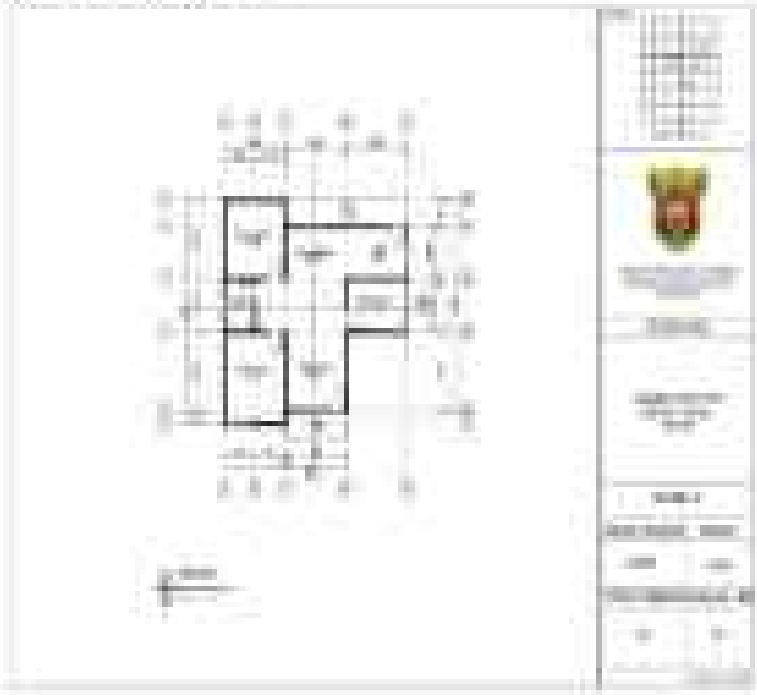

- Potongan

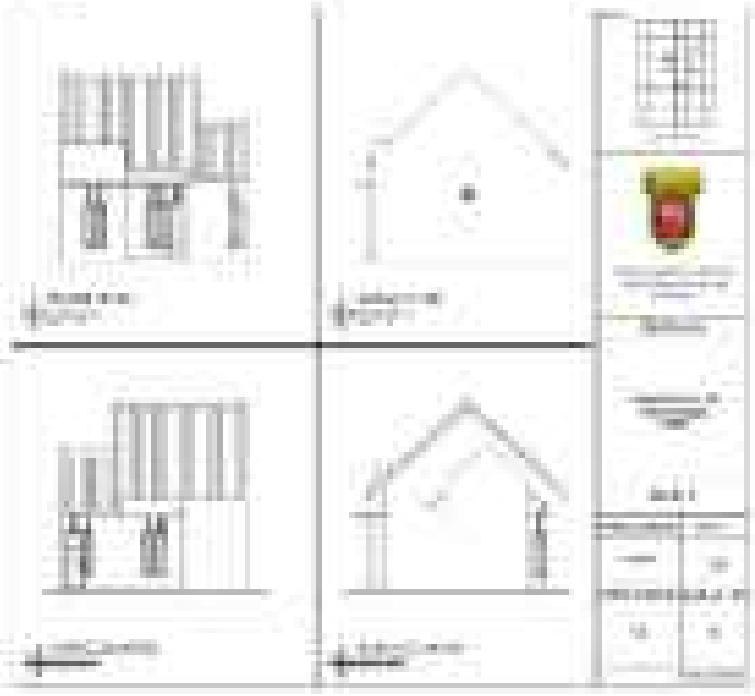

3. Denah Atap

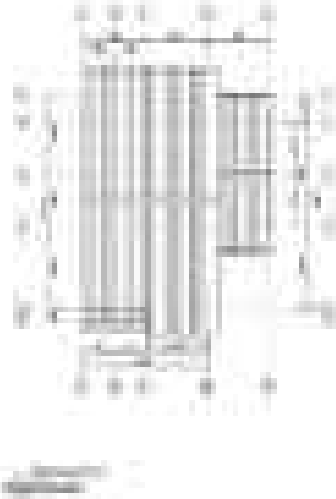

4. Denah Pondasi

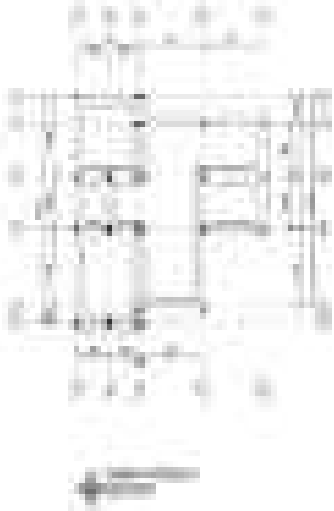

1. Denah Sistem

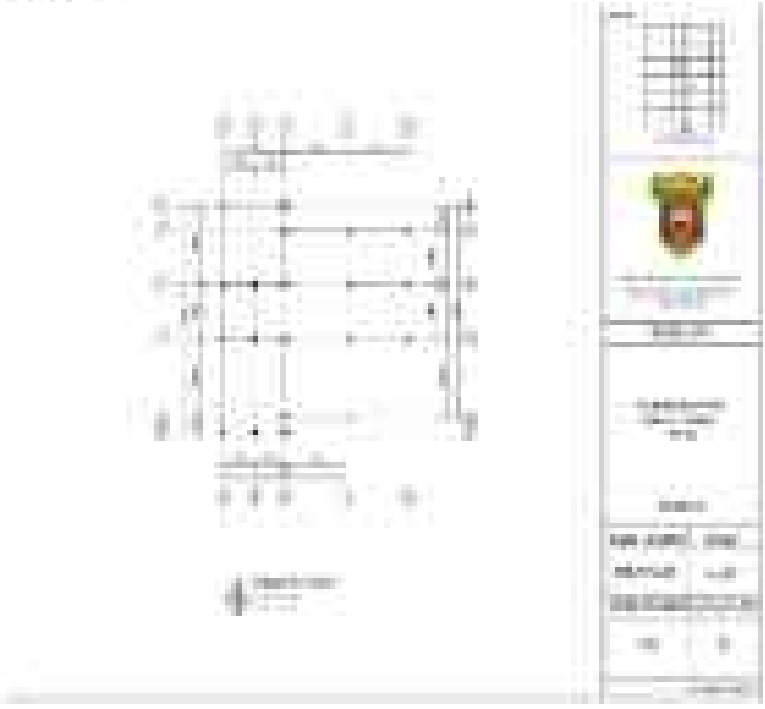

4. Denah Atap

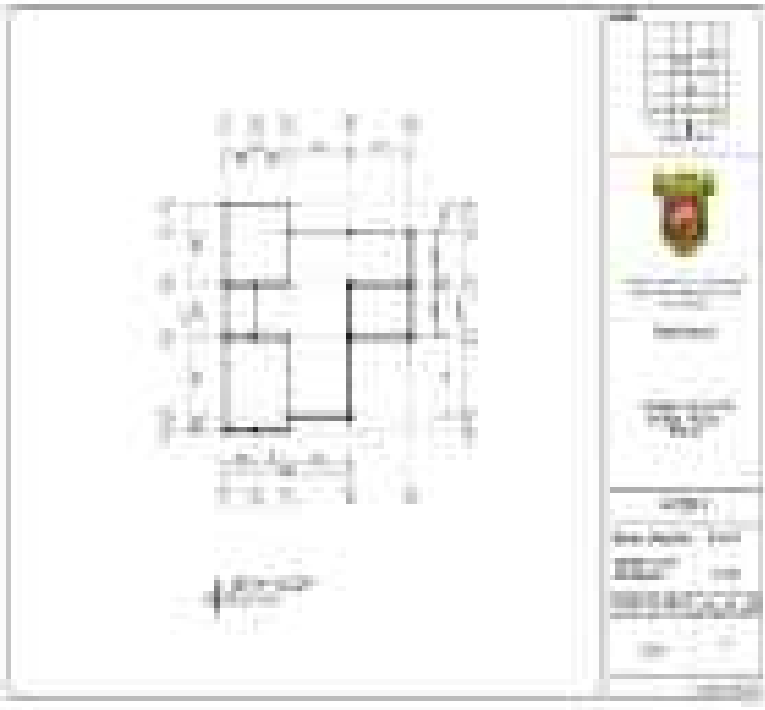

7. Denah Balok

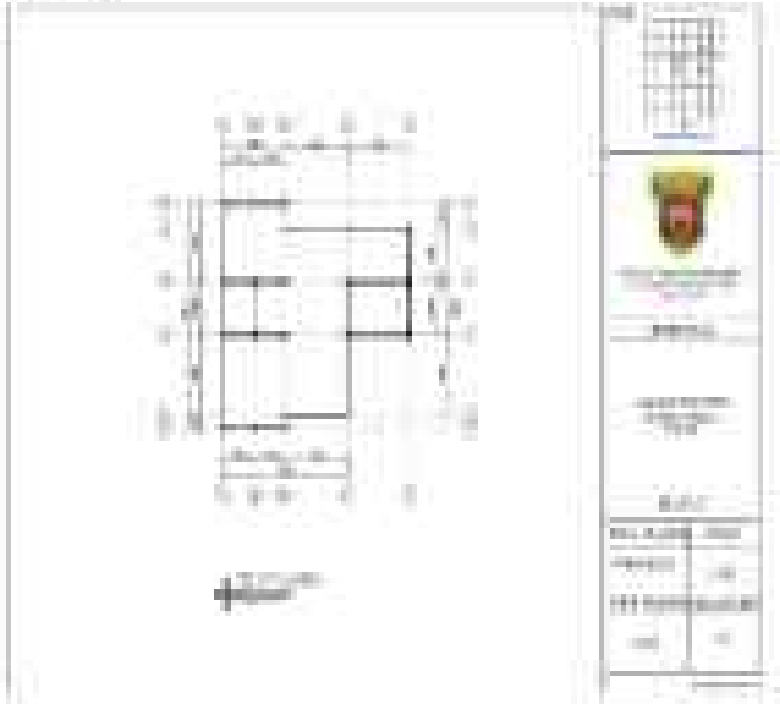

8. Detail As Balok

3 Cancel to Enter:

13 DRAW TO LAYOUT & REGISTER

11. Potongan

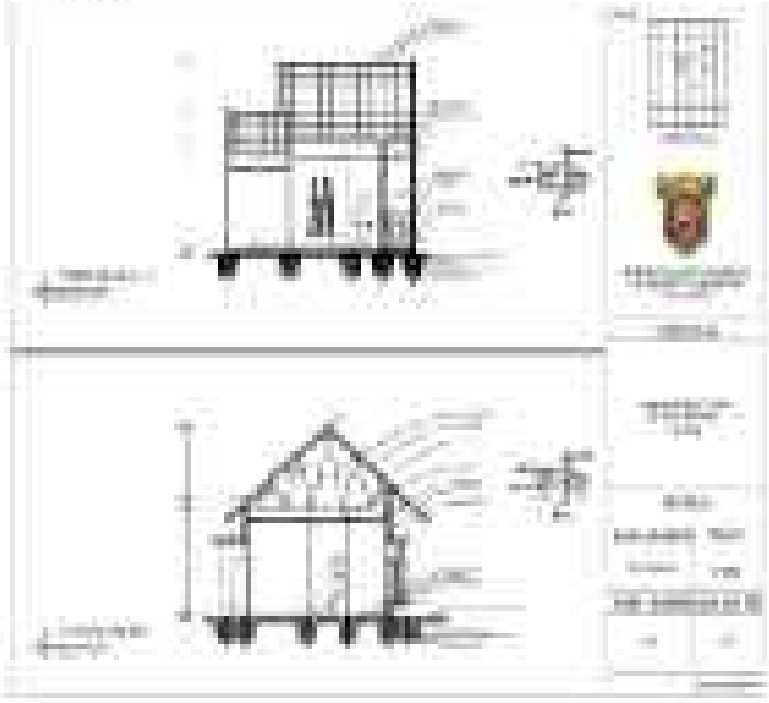

12. Detail Pondasi, Sloof, Kolom, Balok dan Atap

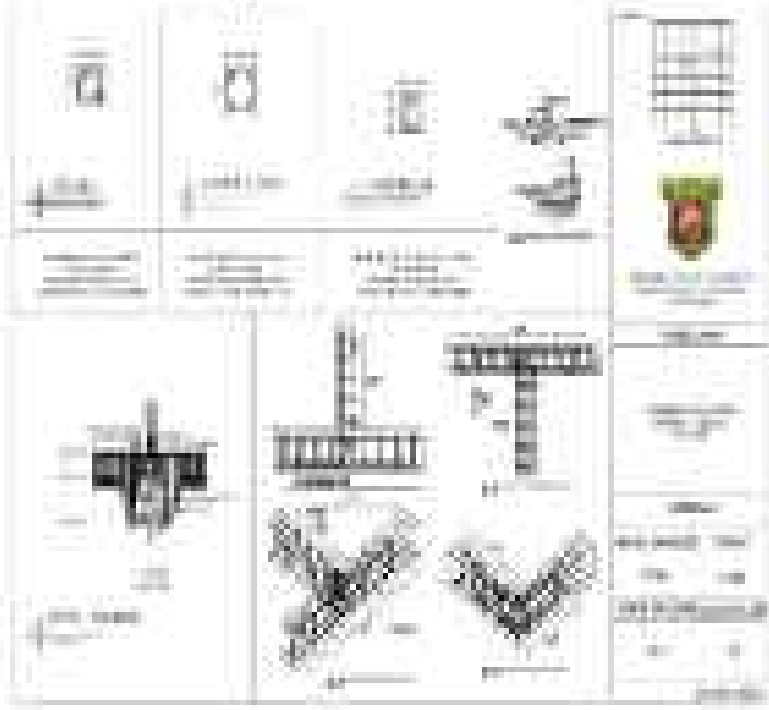

13. Detail Gavel

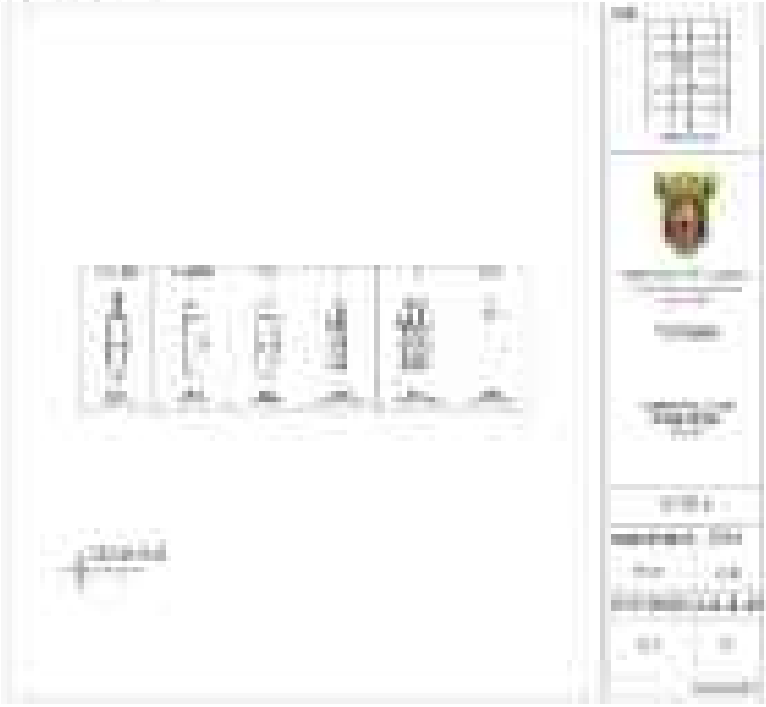

14. Detail Kursi

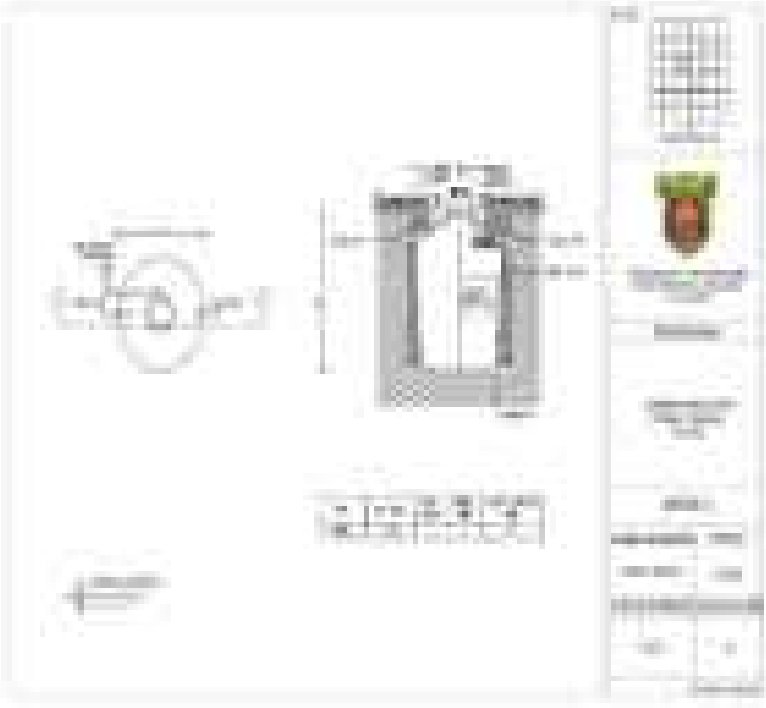

15. Detail Gate Plate

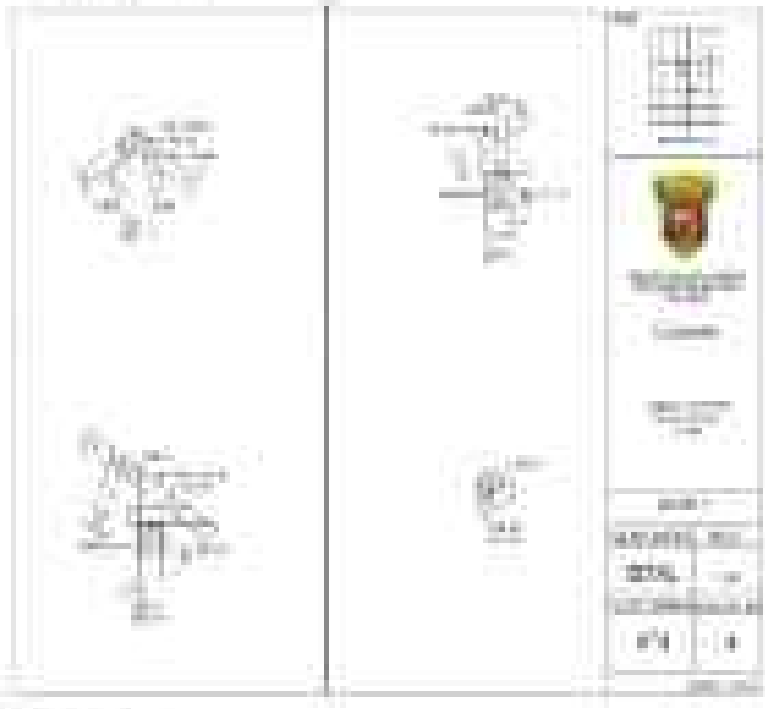

16. Wiring Diagram

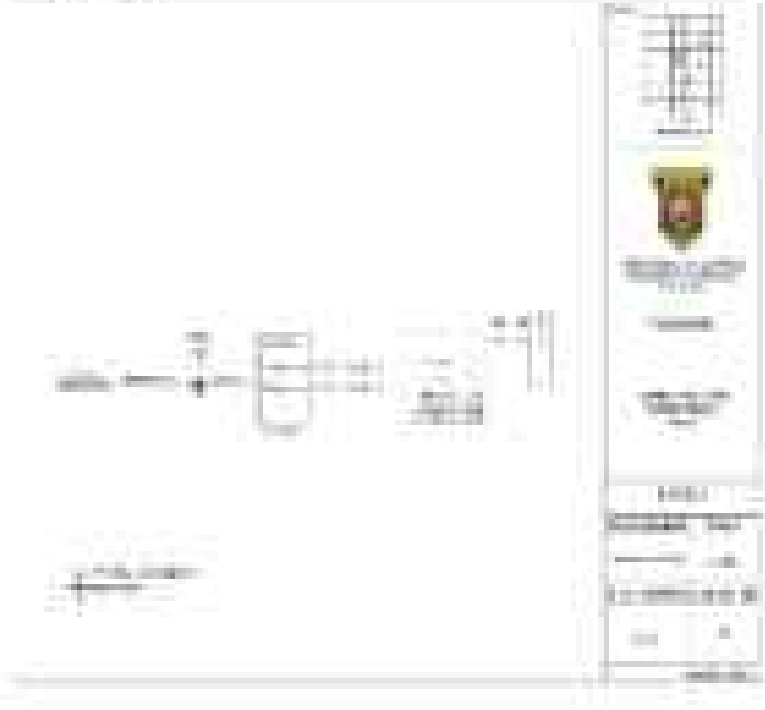

Desain Prototipe Tipe - 72 Model 1

1. Denah Rumah dan Denah Atap

2. Tampak

3. Detail Pondasi

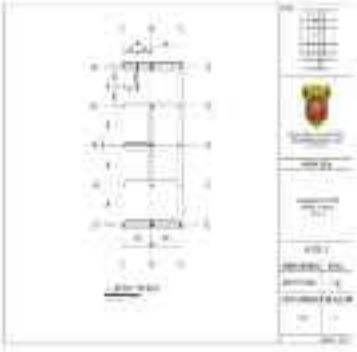

4. Detail Kolom

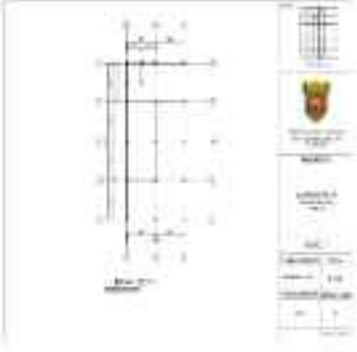

3 Denah Rumah Kayu

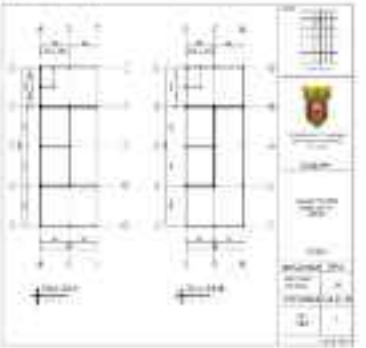

4 Detail Atap Kayu

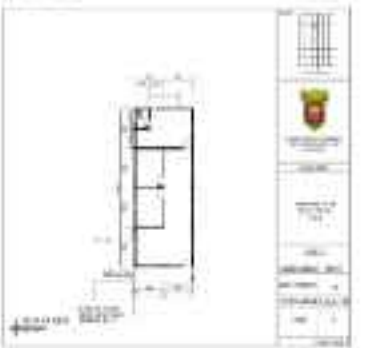

7. [illegible]

8. [illegible]

9. Pavilion

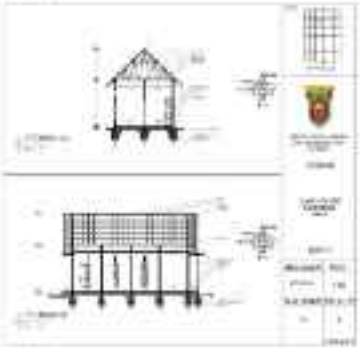

10. Deck Pavilion Roof Plan Elevation Section

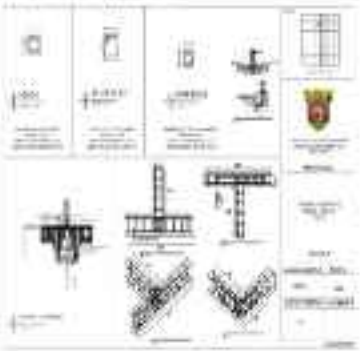

1. [illegible]

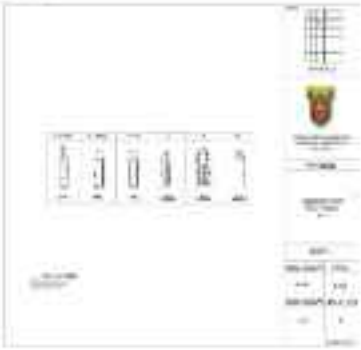

2. [illegible]

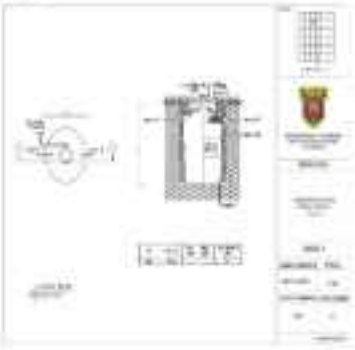

13. Detail Rude Kaos

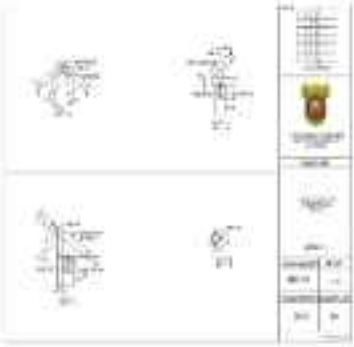

14. Wiring Diagram

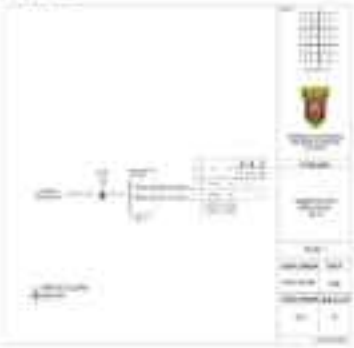

Denah Prototipe Tipe - 72 Model 2

1. Denah Rumah dan Detail Atap

2. Tampak

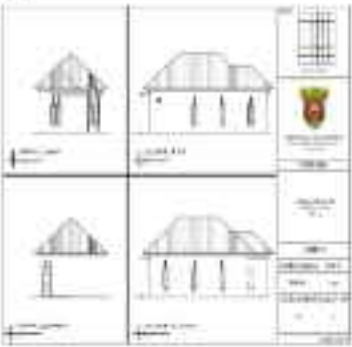

3. Denah Pondasi

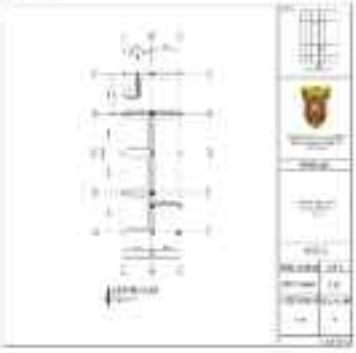

4. Denah Kolom

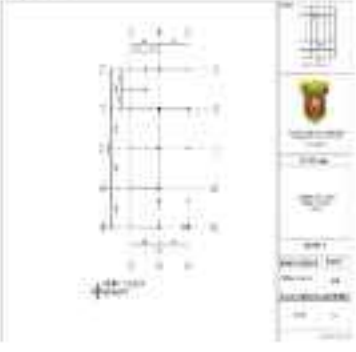

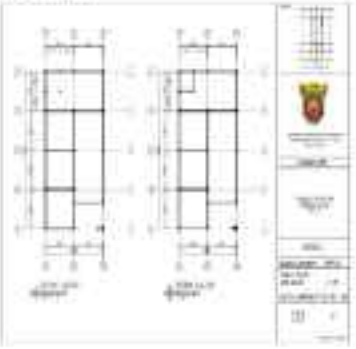

7. [illegible]

8. [illegible]

3. Potongan

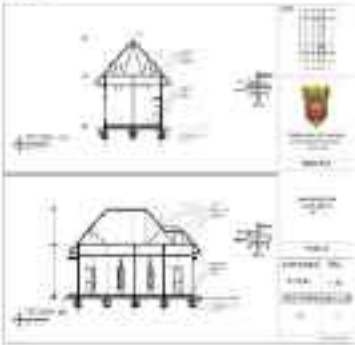

4. Detail Pondasi Atap Tiang Batu Jar Kasan

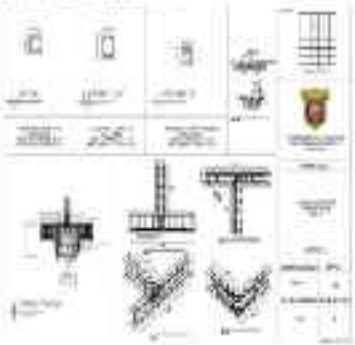

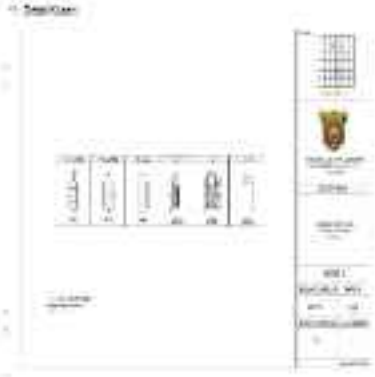

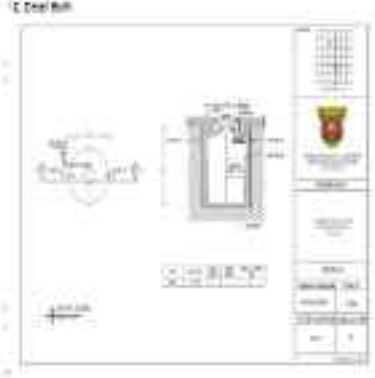

1. Detail Kolom Kus

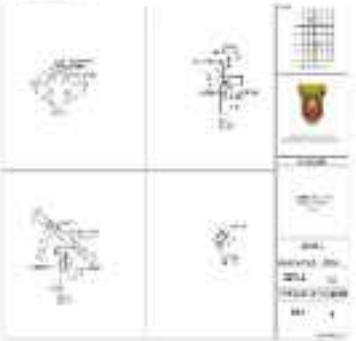

1. Wiring Diagram

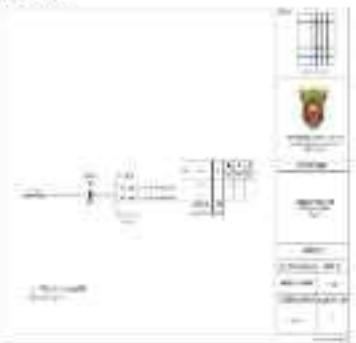

Denah Prototipe Tipe - 72 Model 2

1 Denah Rumah dan Denah Atap

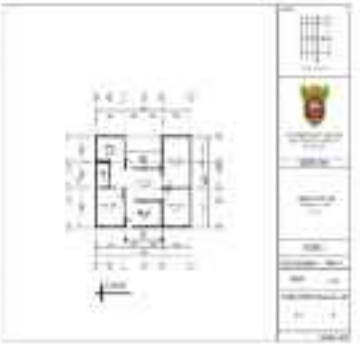

1 Tampak

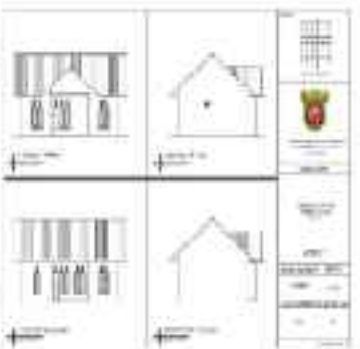

3. Denah Atap

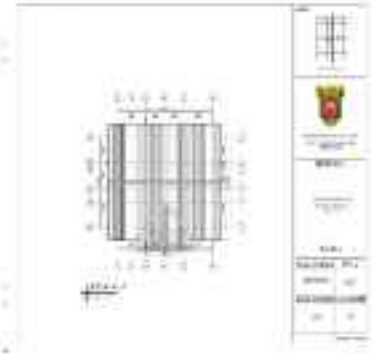

4. Denah Pondasi

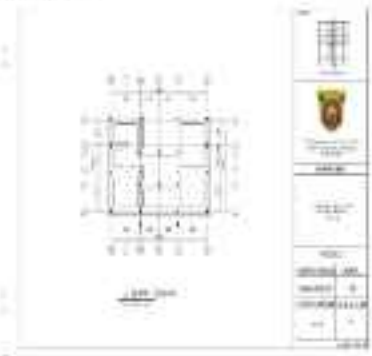

1. Denah Kolom

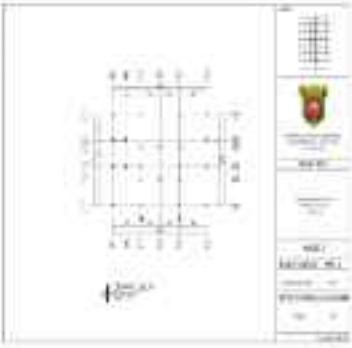

1. Denah Atap

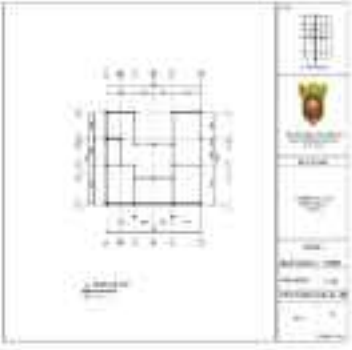

7. Denah Balai

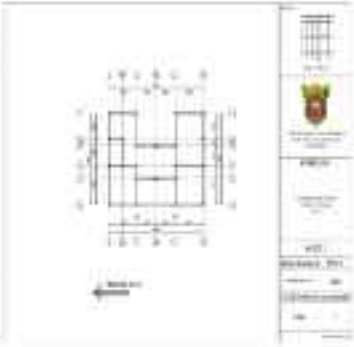

8. Denah Ruang Ganti

11. Potongan

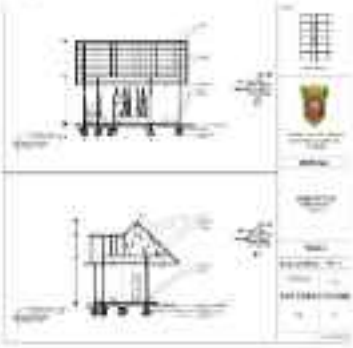

12. Detail Pondasi Batu Kali Dan Sambungan Kolom

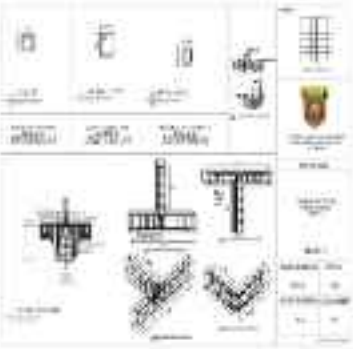

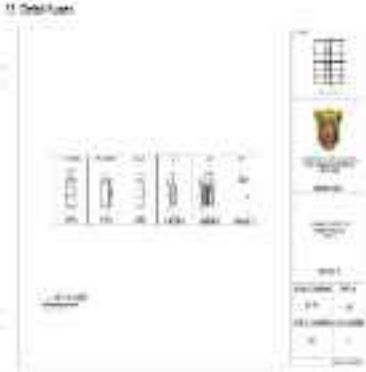

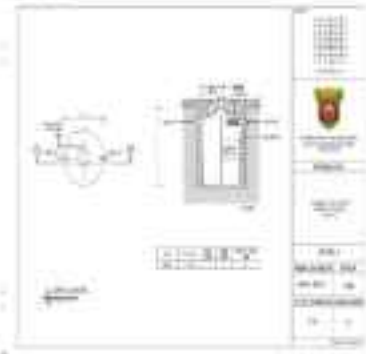

11. Detail Layout Kuda

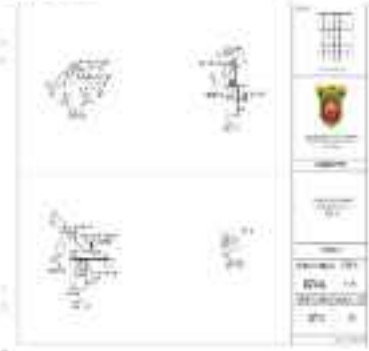

12. Wiring Diagram

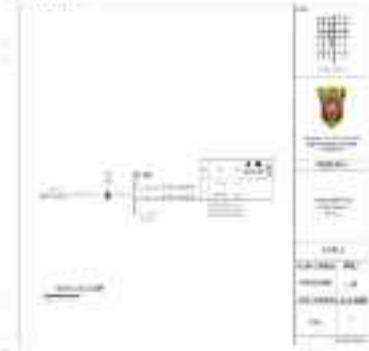

Denah Prototipe Tipe – 72 Model B

1 Denah Rumah dan Dengan Atap

2 Tampak

1. Denah Atap

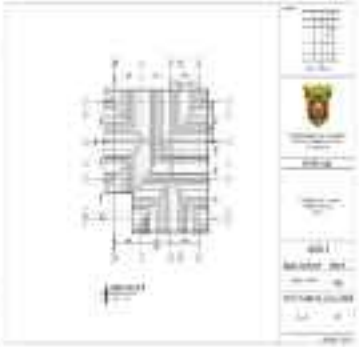

1. Denah Portal

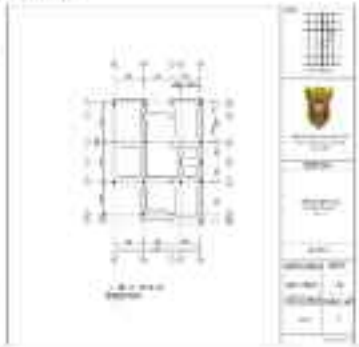

1. [illegible]

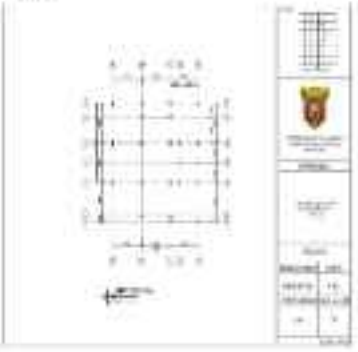

2. [illegible]

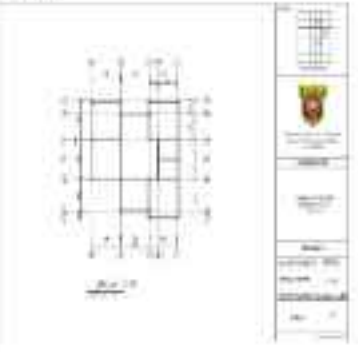

1 [illegible]

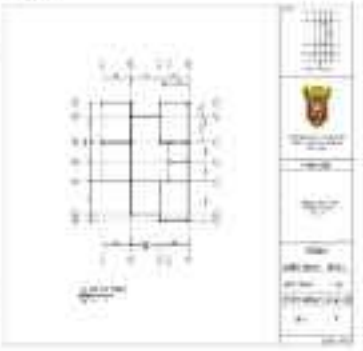

2 [illegible]

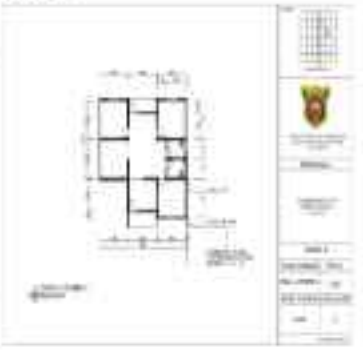

11. Potongan

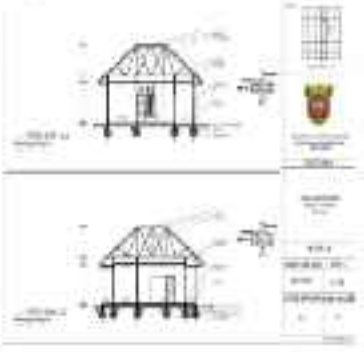

12. Detail Pondasi Batu Kali Dan Sloof Beton

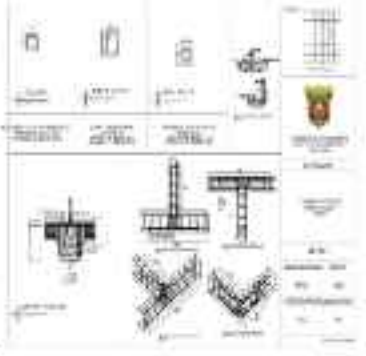

13 Detail Kuan

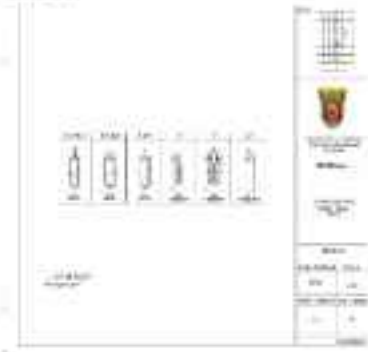

14 Detail Rak

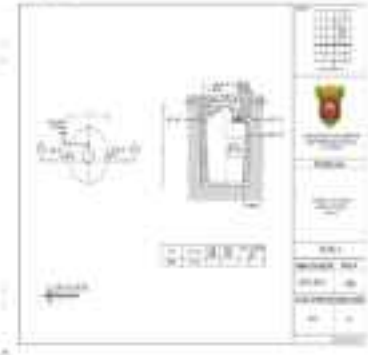

11. Detail Kuda-Kuda

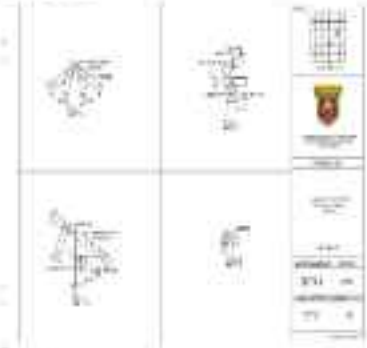

12. Jung Dagam

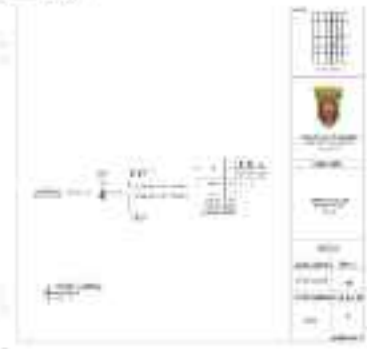

Denah Prototipe Tipe – 72 Model 4

1. Denah Rumah dan Garis Atap

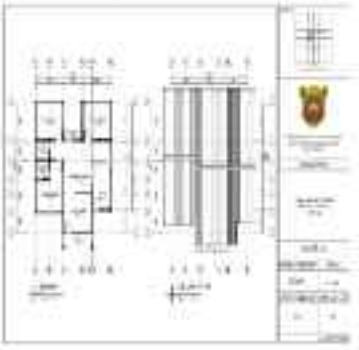

2. Tampak

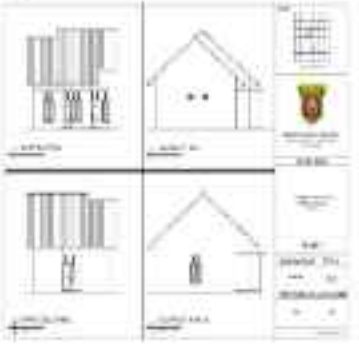

1 Detail Fondasi

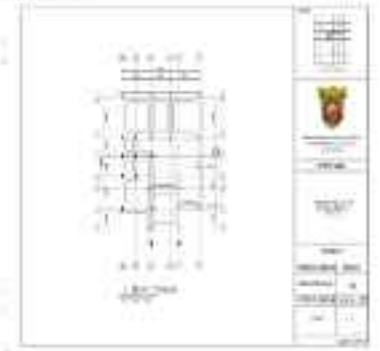

1 Detail Kolom

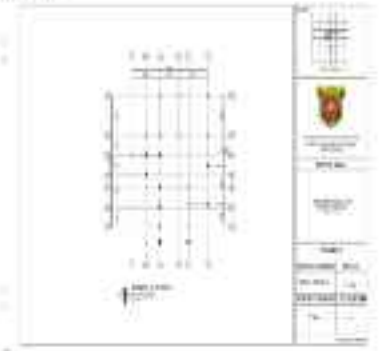

1. Denah Rumah Ibu Nina

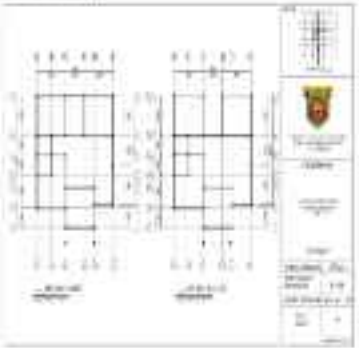

2. Denah Ke Bengkel

7. Denah Ke Atas

8. Denah Tiap Lantai 3 Ditambah

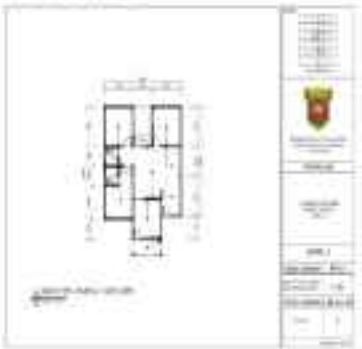

3. Potongan

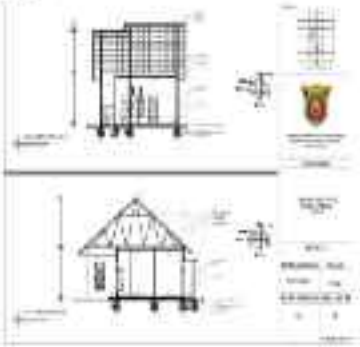

4. Detail Pondasi Sloof Rig Dinding Kolom

11. [illegible]

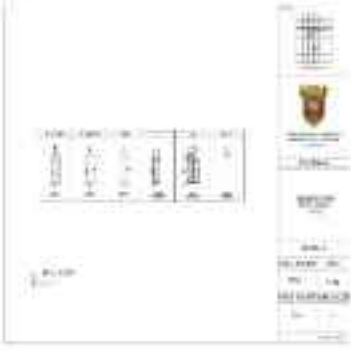

12. [illegible]

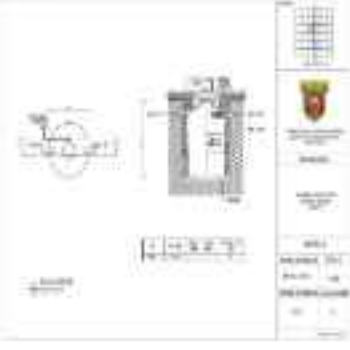

[illegible]

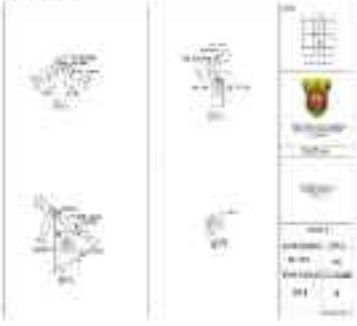

[illegible] Wiring Diagram

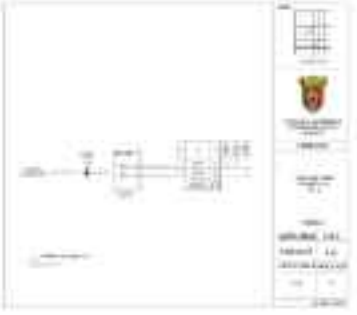

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 April 2020

WALI KOTA BANJARMASIN,

ttd

ARIFIN ARIF

WALI KOTA BANJARMASIN,

ttd

ARIFIN ARIF

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINAN

Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin

Kepala Bagian Hukum,

ABDUL [illegible], SH

Pembina , IV/a

NIP. [illegible]

SALINAN

LAMPIRAN C
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN
KEWAJIBAN PENGUTUHAN
BANGUNAN GEDUNG UNTUK
MASYARAKAT BERCIRI KEBERSIAPAN

Proses Penyelenggaraan BG Hunian Tidak Sederhana
Bangunan Dokumen Penyelenggaraan BG Hunian Tidak Sederhana

NO	KEWAJIBAN DOKUMEN	KETERANGAN	PENJELASAN
Data Umum			
1	Informasi KTP, NPWP	-	-
2	Informasi NIBG	-	-
3	Akses Pemeriksaan pemenuhan teknis [illegible] Pemilik Bangunan gedung	Dokumen hak pemilik tanah [illegible] pemilik bangunan gedung	
4	Akses [illegible] Pemenuhan Penggunaan Tanah (SPPT)	-	[illegible]
5	Dokumen bangunan [illegible] pemenuhan persyaratan [illegible]	-	-
6	Data - Perizinan [illegible] - [illegible]	-	-
7	Dokumen Rencana Pengelolaan Limbah, Rencana Pengelolaan Energi, Rencana Pengelolaan [illegible] Limbah Cair, Limbah Padat, Pengelolaan Energi, Pengelolaan Sumber, Pengelolaan Air Limbah	File dipersiapkan BGN	-
Data Teknis Tanah			
8	Gambar Rencana [illegible] yang dilampiri [illegible] gambar bangunan gedung [illegible]	File [illegible] bangunan gedung [illegible]	-
9	Gambar [illegible] Informasi [illegible] Tanah	Dokumen [illegible] [illegible] tidak sederhana [illegible] 10 Lantai [illegible]	File [illegible]
Data Teknis Arsitektur			
10	Gambar Rencana Rencana Lepas, Lantai, Bangun, Tampak dan Detail Bangunan gedung	-	-
11	Spesifikasi teknis, [illegible] spesifikasi [illegible]	-	-
Data Teknis Struktur			

12	Pertimbangan Teknis dan Standar Maximum Produksi, Konsumsi, Ketersediaan, Distribusi, Mutu Lainnya, dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Komponen Bahan Lainnya	1. Jika komponen pakan lebih dari 1 bahan pakan, dilengkapi gambar/rumus/tanggal dan gambar rumus pakan/pakan 2. Standar Antibiotik gunakan lebih dahulu 3. Standar konsumsi lebih dahulu	-
13	Standar Cara Produksi	-	-
14	Kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan spesifikasi Benih/Bibit, Pupuk, Pestisida, dan Bahan/Alat yang digunakan, sesuai lebih dahulu dan menyesuaikan untuk komponen tambahan	Kepatuhan yang dimaksud antara lain: • Alamat/lokasi, • [illegible] [illegible] pemilik/pengelola, • [illegible] • [illegible] [illegible]	-
Area Pekerja Wanita/Ibu Hamil/Ibu Menyusui			
15	Pertimbangan teknis dan Standar maximum dalam [illegible] Transportasi dalam pekerja (Manual dan atau Mekanisasi)	Wajib dipertimbangkan	Dipertimbangkan: • Komponen Gedung Operasional Pemerintah dengan [illegible] + 2 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] • Komponen Gedung Operasional Swasta yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

19	Pelabuhan Tahun dan Gambar [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (2)	[illegible]	- [illegible] - [illegible]
20	Pelabuhan [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
21	Pelabuhan [illegible] [illegible] (building [illegible])	[illegible]	[illegible]
22	Pelabuhan [illegible] [illegible] (pier) [illegible]	[illegible]	[illegible]
23	Pelabuhan Tahun dan Gambar [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] (2) [illegible]	[illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4)

24	Pelabuhan Tahun dan Gambar [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	- [illegible] (2) [illegible]
			- [illegible]
			  - [illegible]
			  - [illegible]
			- [illegible]
			  - [illegible]
			  - [illegible]

			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd.

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal [illegible] April [illegible]
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd.

ALI FIRDAUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: [illegible]

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

ASRAN, [illegible], SH
Pembina / IV a
NIP. [illegible]